



Editor :

Syaiful Bahri, SE., M.SA., Akt., ACPA., CRA.

TEORI AKUNTANSI

Nelly Ervina, S.E., M.Si.

Syarifah Zuhra, S.S.T., M.E.

Dr. Desak Nyoman Sri Werastuti, S.E., M.Si., Ak., CA.

Tatik Amani, S.E., M.Akun

Putu Ayu Anggya Agustina, S.E., M.Si., Ak

Dr. Wahidahwati, S.E., M.Si., Ak., C.A

Dr. Tenriwaru., S.E., M.Si., Ak., CA.

Layly Dwi Rohmatunnisa', S.Pd., M.Akun

Aniek Murniati, S.Sos., M.SA

Dr. Riyanto Setiawan Suharsono, S.E., M.SA., Ak., CA., CSRS.

Leni Saleh, SEI., M.Sc., M.Sc (Tan).

Hadriana Hanafie, S.E., M.M.

Justita Dura, S.E., M.Ak, CRA., CSRS., CPMSA



BOOK CHAPTER

TEORI AKUNTANSI

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

TEORI AKUNTANSI

Nelly Ervina, S.E., M.Si.
Syarifah Zuhra, S.S.T., M.E.
Dr. Desak Nyoman Sri Werastuti, S.E., M.Si., Ak., CA.
Tatik Amani, S.E., M.Akun
Putu Ayu Anggya Agustina, S.E., M.Si., Ak
Dr. Wahidahwati, S.E., M.Si., Ak., C.A
Dr. Tenriwaru., S.E., M.Si., Ak., CA.
Layly Dwi Rohmatunnisa', S.Pd., M.Akun
Aniek Murniati, S.Sos., M.SA
Dr. Riyanto Setiawan Suharsono, S.E., M.SA., Ak., CA., CSRS.
Leni Saleh, SEI., M.Sc., M.Sc (Tan).
Hadriana Hanafie, S.E., M.M.
Justita Dura, S.E., M.Ak, CRA., CSRS., CPMSA

Editor:

Syaiful Bahri, SE., M.SA., Akt., ACPA., CRA.

Penerbit



CV. MEDIA SAINS INDONESIA
Melong Asih Regency B40 - Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
www.medsan.co.id

Anggota IKAPI
No. 370/JBA/2020

TEORI AKUNTANSI

Nelly Ervina, S.E., M.Si.
Syarifah Zuhra, S.S.T., M.E.
Dr. Desak Nyoman Sri Werastuti, S.E., M.Si., Ak., CA.
Tatik Amani, S.E., M.Akun
Putu Ayu Anggya Agustina, S.E., M.Si., Ak
Dr. Wahidahwati, S.E., M.Si., Ak., C.A
Dr. Tenriwaru., S.E., M.Si., Ak., CA.
Layly Dwi Rohmatunnisa', S.Pd., M.Akun
Aniek Murniati, S.Sos., M.SA
Dr. Riyanto Setiawan Suharsono, S.E., M.SA., Ak., CA., CSRS.
Leni Saleh, SEI., M.Sc., M.Sc (Tan).
Hadriana Hanafie, S.E., M.M.
Justita Dura, S.E., M.Ak, CRA., CSRS., CPMSA

Editor :

Syaiful Bahri, SE., M.SA., Akt., ACPA., CRA.

Tata Letak :

Dimas Haikal Hafidhien

Desain Cover :

Rintho R. Rerung

Ukuran :

A5 Unesco: 15,5 x 23 cm

Halaman :

vi, 202

ISBN :

978-623-362-362-9

Terbit Pada :

Februari 2022

Hak Cipta 2022 @ Media Sains Indonesia dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis.

PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA

(CV. MEDIA SAINS INDONESIA)

Melong Asih Regency B40 - Cijerah

Kota Bandung - Jawa Barat

www.medsan.co.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga buku kolaborasi dalam bentuk book chapter dapat dipublikasikan dan dapat sampai di hadapan pembaca. Book chapter ini disusun oleh sejumlah akademisi dan praktisi sesuai dengan kepakarannya masing-masing. Buku ini diharapkan dapat hadir memberi kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan Teori Akuntansi.

Sistematika buku Teori Akuntansi ini mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan. Buku ini terdiri atas 13 bab yang dibahas secara rinci, diantaranya: Sejarah dan Perkembangan Akuntansi, Profesi Akuntan, Dasar-Lingkup Dan Hakikat Akuntansi, Struktur Teori Akuntansi, Teori Akuntansi dan Perumusannya, Kerangka Konseptual, Standar Akuntansi Untuk *Corporate Social Responsibility*, Konsep Aset, Konsep Kewajiban dan Ekuitas, Konsep Pendapatan, Konsep Biaya, Konsep Laba, dan Pengungkapan Laporan Keuangan.

Kami menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat banyak kekurangan, sejatinya kesempurnaan itu hanya milik Yang Kuasa. Oleh sebab itu, kami tentu menerima masukan dan saran dari pembaca demi penyempurnaan lebih lanjut.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung dalam proses penyusunan dan penerbitan buku ini, secara khusus kepada Penerbit Media Sains Indonesia sebagai inisiator book chapter ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Bandung, 28 Desember 2021
Editor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
1 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN AKUNTANSI.....	1
Sejarah Awal Akuntansi.....	1
Kontribusi Luca Pacioli.....	2
Perkembangan Pembukuan Pencatatan Berpasangan.....	4
Perkembangan Akuntansi Di Amerika Serikat	5
Perkembangan Akuntansi Di Negara Lainnya	8
Perkembangan Akuntansi Di Indonesia	9
2 PROFESI AKUNTANSI.....	15
Profesi Akuntansi.....	15
Macam-Macam Profesi Akuntan	16
Manfaat Akuntan Untuk Perusahaan	20
Pedoman Profesi Akuntan	22
Aturan Etika Profesi Akuntansi.....	23
Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)	25
3 RUANG LINGKUP TEORI AKUNTANSI.....	29
Sifat-Sifat Akuntansi.....	31
Siklus Akuntansi	33
Teori Akuntansi	33
Elemen dan Struktur Teori Akuntansi	34
Tujuan Laporan Keuangan (FASB).....	34
APB Statement No.4.....	35
Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) 1984	36
Trueblood Report	36

	Sifat Postulat Akuntansi	37
	Konsep-Konsep Teoritis Akuntansi	39
	Prinsip-Prinsip Akuntansi.....	41
4	STRUKTUR TEORI AKUNTANSI	45
	Pengertian	45
	Tujuan Laporan Keuangan	46
	Postulat Akuntansi	46
	Konsep Teoritis Akuntansi	49
	Prinsip Dasar Akuntansi.....	52
	Standar Akuntansi.....	56
5	TEORI AKUNTANSI DAN PERUMUSANNYA.....	59
	Teori dan Praktik Akuntansi	59
	Klasifikasi Perumusan Teori Akuntansi	61
6	KERANGKA KONSEPTUAL.....	75
	Pengertian	75
	Kebutuhan Kerangka Konseptual	76
	Kerangka Konseptual IFRS	76
	Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK)	82
	Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLK Syariah)	84
7	STANDAR AKUNTANSI UNTUK <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>	93
	Pendahuluan	93
	Pembahasan	94
	Aktifitas <i>Corporate Social Responsibility</i>	97
	Manfaat Aktifitas <i>Corporate Social Responsibility</i> ..	99

	Pengukuran Biaya	
	<i>Corporate Social Responsibility</i>	100
	Akuntansi Untuk CSR	101
	Kesimpulan.....	105
8	KONSEP ASET	109
	Pendahuluan	109
	Pengertian Aset.....	109
	Pengukuran	113
	Penilaian.....	114
	Pengakuan.....	118
	Pengungkapan	119
	Penyajian	119
	Aset Dalam Kacamata FASB vs SAK	120
9	KONSEP LIABILITAS DAN EKUITAS	125
	Pengertian Liabilitas	125
	Jenis-Jenis Liabilitas	128
	Konsep Ekuitas.....	132
10	KONSEP PENDAPATAN.....	139
	Pengertian	139
	Proses Pendapatan.....	140
	Manfaat Pendapatan	141
	Karakteristik Pendapatan	142
	Sumber Pendapatan	143
	Penilaian Pendapatan	144
	Pengakuan Pendapatan	147
	Bunga, Royalti, dan Dividen.....	149

11	KONSEP BIAYA.....	155
	Pendahuluan	155
	Pengertian Akuntansi Biaya dan Konsep Biaya...	158
12	KONSEP LABA	173
	Pengertian	173
	Teori Laba.....	174
	Fungsi Laba.....	175
	Jenis-Jenis Laba.....	176
	Kegiatan Laba	177
	Laporan Laba/Rugi.....	177
	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain.....	179
13	PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.....	187
	Pendahuluan	187
	Pengertian Pengungkapan Laporan Keuangan ...	187
	Tujuan Pengungkapan Laporan Keuangan	188
	Jenis Pengungkapan.....	190
	Kriteria Pengungkapan Laporan Keuangan.....	191
	Metode Pengungkapan Laporan Keuangan	191
	Bentuk Pengungkapan Laporan Keuangan	193
	Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan.....	195
	Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan.....	196
	Pengungkapan Dalam Laporan Keuangan	196
	Praktik Pengungkapan Laporan Keuangan	198
	Pengungkapan Laporan Keuangan di Negara Berkembang.....	199

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN AKUNTANSI

Nelly Ervina, S.E., M.Si.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung,
Pematangsiantar, Indonesia

Sejarah Awal Akuntansi

Berbagai percobaan dilakukan untuk menyatakan mengenai perkembangan dari lahirnya sistem pencatatan/ sistem tata buku berpasangan yang sekarang dikenal namanya dengan *double entry*. Sejak sekitar 3.000 tahun sebelum masehi yaitu kebudayaan Mesir menunjukkan bahwa gudang-gudang Mesir pada masa lalu dijadikan sebagai bukti yang menunjukkan adanya pencatatan atas transaksi-transaksi. Pada masa ini gudang dijadikan sebagai tempat penyimpanan barang berharga seperti emas, gandum, permata, tekstik dan hewan ternak. Kemudian kebudayaan Babilonia menunjukkan bahwa pada ribuan tablet tanah liat Babilonia menunjukkan beberapa catatan umum mengenai sistem akuntansi yaitu berapa jumlah uang dan barang yang diterima, nama orang yang memberikannya, nama orang yang menerimanya, dan tanggal kejadiannya. Selain itu, ada juga tablet pengeluaran yang dicatat atas arus keluar dari entitas yang memuat daftar sejumlah uang dan kekayaan yang dibelanjakan sebagai hasil dari pengguna internal, pembelian, kerugian dan lain-lain. Kadang-kadang juga mencatat mengenai biaya, laba dan produksi yang meliputi apa laba yang diterima, siapa yang menerima, alasan untuk menerima dan juga tanggal

penerimaan. Untuk catatan tentang produksi terdiri dari daftar mengenai apa yang dibuat dan kepada siapa dijual. Sedangkan catatan tentang obligasi terdiri dari informasi mengenai jumlah dan dasar dari komoditas yang dipinjamkan, tingkat bunga, nama peminjam dan yang meminjam, waktu pembayaran, spesifikasi mengenai metode pembayaran, saksi dan tanggal. (Ikhsan et al. 2016).

Periode Yunani dimana Zenon dari wilayah Appolonius memperkenalkan di tahun 256 sebelum masehi sebuah sistem akuntansi pertanggungjawaban yang terperinci dimana setiap bagian diatur oleh seorang supervisor yang meminjamkan akun sehari-hari dari aktivitas di bawah yuridiksi. Dokumen-dokumen tertulis menyajikan setiap transaksi diantaranya mengambil bentuk dari akun untuk meminjam uang dan aktiva lainnya yang diterima oleh kepala bagian.

Pada periode Romawi ada hukum yang mengharuskan para pembayar pajak membuat pelaporan mengenai posisi keuangan mereka dimana hak-hak sipil bergantung kepada jumlah harta benda yang dilaporkan oleh para penduduknya. Catatan pembukuan menunjukkan kegemaran orang Romawi akan organisasi dan administrasi dimana ada sebuah buku harian yang dicatat atas penerimaan dan pengeluaran-pengeluaran (Ikhsan et al. 2016).

Kontribusi Luca Pacioli

Pembukuan Italia berkembang seiring dengan perkembangan perdagangan dari Italia dan penggunaan metode pembukuan pencatatan berpasangan di abad ke 14. Buku pencatatan berpasangan yang pertama kali dikenal adalah pembukuan Massari dari Genoa yang bertanggal sejak tahun 1340. Pembukuan pencatatan berpasangan ini lebih dahulu berkembang sekitar dua ratus tahun dari Pacioli. Raymond de Rover (Riahi and Belkaoui 2006) menggambarkan perkembangan awal dari akuntansi di Italia adalah sebagai berikut pencapaian terbesar dari para pedagang Italia kira-kira berkisar

antara tahun 1250 dan 1400 adalah penggabungan dari berbagai elemen ke dalam sebuah sistem pengkategorian yang terintegrasi yang disebut dengan rekening/ perkiraan/ akun (*accounts*) dan dikembangkan dengan berdasarkan pada prinsip dari pencatatan ganda untuk seluruh transaksi.

Luca Pacioli merupakan seorang pastur dari ordo Fransiskus yang diidentikkan dengan dengan pengenalan pembukuan pencatatan berpasangan untuk pertama kalinya. Pada tahun 1494 ia menerbitkan bukunya, *Summa de Arithmetica Geometria, Proportioni et Proportionalita* yang di dalamnya terdapat dua buah bab yaitu *de Computis et Scripturis* yang menjelaskan pembukuan pencatatan berpasangan. Beliau menyatakan bahwa tujuan pembukuan adalah untuk memberikan informasi yang tidak tertunda kepada para pedagang mengenai keadaan aktiva dan utang-utangnya. Debit (*adebeo*) dan kredit (*credito*) digunakan dalam pencatatan untuk memastikan sebuah pencatatan berpasangan. Jika ada kredit maka harus ada debit dan ada tiga buku yang digunakan yaitu sebuah memorandum, sebuah jurnal dan sebuah buku besar.

Pacioli menyarankan agar tidak hanya nama dari pembeli atau penjual saja yang dicatat, begitu pula deskripsi mengenai barangnya dengan berat, ukuran atau hasil pengukuran dan harganya tetapi syarat pembayaran juga harus ditampilkan dan kapan saja uang diterima atau dikeluarkan pencatatan akan menyajikan jenis mata uang yang dipergunakan dan nilai tukarnya. Pada waktu yang bersamaan mengingat umur yang pendek dari perusahaan bisnis, Pacioli menyarankan penghitungan dari laba suatu periode dan penutupan buku yaitu merupakan suatu hal yang baik untuk menutup buku setiap tahun, terutama jika anda memiliki kerja sama kemitraan dengan pihak lain. Seringnya melakukan pencatatan akuntansi akan memperpanjang persahabatan.

Perkembangan Pembukuan Pencatatan Berpasangan

Oleh karena Pacioli dan metode Italianya yang terkenal hingga menyebar ke seluruh Eropa pada abad ke 16 dan 17 sehingga kita mengenal dengan model pencatatan berpasangan dan hingga saat ini masih terus berkembang menjadi model pencatatan yang kita kenal. Cushing (Riahi and Belkaoui 2006) mencatatkan serangkaian perkembangan yaitu pada abad 16 terjadi perubahan yaitu diperkenalkannya jurnal-jurnal khusus untuk pencatatan berbagai jenis transaksi yang berbeda yang meliputi penggunaan buku tambahan khusus misalnya untuk mencatat transaksi kas, penagihan atau jenis pengeluaran tertentu. Tujuannya adalah untuk menjaga agar detail berada di luar jurnal dan buku besar, dengan maksud untuk tidak membuatnya cepat penuh. Pada abad ke 16 dan 17 terjadi evolusi pada praktik laporan keuangan periodik. Penerapan dari sistem pencatatan berpasangan juga diperluas ke jenis organisasi yang lain.

Menurut Peragallo (Riahi and Belkaoui 2006) sepanjang tahun 1559 hingga 1795 telah muncul suatu unsur baru kritik atas pembukuan dan merupakan periode dimana pencatatan berpasangan memperluas bidang pengaplikasiannya ke jenis organisasi yang lain seperti biara dan negara bagian. Selain itu juga mencatat terjadinya penggunaan akun-akun persediaan yang terpisah untuk jenis barang yang berbeda. Dimulai dengan East India Company di abad ke 17 dan selanjutnya diikuti dengan perkembangan dari perusahaan tadi seiring dengan revolusi industri akuntansi mendapatkan status yang lebih baik, yang ditunjukkan dengan adanya kebutuhan akan akuntansi biaya, dan kepercayaan yang diberikan kepada konsep mengenai kelangsungan, periodisitas dan akrual.

Metode untuk pencatatan aktiva tetap mengalami evolusi pada abad ke 18 dimana menurut Yamey (Riahi and Belkaoui 2006) pertama-tama aktiva tersebut dicatat sesuai dengan biaya perolehannya, perbedaan antara pembayaran pendapatan dan penerimaannya yang umumnya dimasukkan ke dalam akun aktiva,

dipindahkan ke akun laba rugi pada saat tanggal neraca. Kedua akun aktiva yang berisi pencatatan mengenai pembiayaan awal dan pengeluaran serta penerimaan lain ditutup pada saat tanggal neraca dan perbedaan antara total debit dan total kredit dibawa sebagai saldo akun. Tidak ada debit atau kredit yang dicatat ke akun laba rugi. Ketiga aktiva tersebut direvaluasi naik atau pun turun pada saat tanggal neraca atas nilai yang direvisi dicatat di dalam akun dan perbedaannya dicatat ke dalam akun laba rugi untuk menyeimbangkannya.

Pada awal abad 19 depresiasi untuk aktiva tetap hanya diperhitungkan pada barang dagangan yang tidak terjual. Meskipun tidak terlalu banyak dipergunakan tetapi terdapat bukti yang ditunjukkan oleh Saliero pada tahun 1915 akan adanya metode depresiasi yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun, metode dana pelunasan dan anuitas dan metode unit biaya. Baru setelah tahun 1930an metode depresiasi menjadi lebih umum dipergunakan. Pada paruh terakhir dari abad 19 terjadi perkembangan pada teknik akuntansi untuk pembayaran dibayar di muka dan akrual sebagai cara untuk memungkinkan dilakukannya perhitungan dari laba periodik. Akhir abad 19 dan 20 terjadi perkembangan pada laporan dana.

Pada abad ke 20 terjadi perkembangan pada metode akuntansi untuk isu kompleks mulai dari perhitungan laba per saham, akuntansi untuk perhitungan bisnis, akuntansi untuk inflasi, sewa jangka panjang dan pension (Riahi and Belkaoui 2006).

Perkembangan Akuntansi Di Amerika Serikat

Pada tahap pertama yaitu tahun 1900 sampai dengan tahun 1933 disebut dengan tahap kontribusi manajemen dan manajemen memiliki kendali penuh atas pemilihan dari informasi keuangan yang akan diungkapkan di dalam laporan tahunan. Pengaruh manajemen muncul dari meningkatnya jumlah pemegang saham dan peranan ekonomi dominan yang dimainkan oleh perusahaan perusahaan industri setelah tahun 1900. Peleburan

kepemilikan saham memberikan kendali penuh kepada manajemen atas format dan isi dari pengungkapan-pengungkapan akuntansi. Situasi ini menimbulkan ketidakpuasan selama tahun 1920-an oleh William Z Ripley dan J.M.B Hoxley yang dengan jelas mendesak untuk melakukan perbaikan di dalam standar untuk pelaporan keuangan. Adolph A. Berle dan Gardiner C. Means juga meminta adanya perlindungan terhadap investor.

Asosiasi akuntan profesional yaitu *American Institute of Accountants* (AIA) pada tahun 1917 menetapkan suatu Dewan Pemeriksa (*Board of Examiners*) untuk membuat ujian akuntan publik yang seragam dan Bursa Efek New York (*New York Stock Exchange*) sejak tahun 1900 mensyaratkan seluruh perusahaan yang masuk ke bursa saham untuk menerbitkan laporan keuangan tahunan. Pada akhir abad 19 kontroversial yang terjadi adalah mengenai akuntansi untuk biaya bunga. Posisi AIA atas permintaan dari Komisi Dagang Federal (*Federal Trade Commission*) adalah bahwa tidak ada biaya penjualan, beban bunga dan beban administrasi di dalam biaya overhead pabrik. Penentang menghadapi pernyataan yang menyatakan bahwa diperhitungkannya bunga di dalam biaya produksi adalah teori yang tidak berdasar dan salah dan dapat dikatakan mustahil di dalam praktiknya sehingga penentang pun mengalami kekalahan.

Kejadian penting lain adalah meningkatnya dampak dari teori akuntansi terhadap perpajakan atas laba usaha. Meskipun Undang Undang Pendapatan tahun 1913 telah memberikan dasar perhitungan laba kena pajak dengan dasar penerimaan dan pengeluaran kas, akan tetapi Undang Undang tahun 1918 merupakan yang pertama mengakui peranan dari prosedur akuntansi di dalam penentuan laba kena pajak sehingga menjadi awal dari adanya suatu harmonisasi di antara akuntansi perpajakan dengan akuntansi keuangan.

Pada tahap kedua yaitu tahun 1933 sampai dengan tahun 1959 disebut dengan tahap kontribusi institusi ditandai dengan adanya pembuatan dan peningkatan peranan institusi di dalam pengembangan prinsip akuntansi yang

meliputi pendirian *Securities and Exchange Commission* (SEC) dan peran baru yang dimainkan oleh Komite Prosedur Akuntansi (*Committee on Accounting Procedures*). Pada tahun 1934 Kongres menciptakan SEC dengan tugas untuk mengelola beragam hukum investasi federal termasuk Undang Undang Sekuritas tahun 1934 yang mengatur tentang perdagangan sekuritas. Pada tanggal 25 April 1938 SEC mengirimkan sebuah pesan yang tegas bahwa kecuali jika profesi dapat menetapkan suatu badan yang menetapkan standar maka SEC akan menggunakan mandate yang dimiliki dan mengembangkan prinsip-prinsip akuntansi.

Setelah publikasi yang dilakukan oleh Ripley di dalam artikel mengenai kritik atas teknik pelaporan, George O. May yang berkebangsaan Inggris mengusulkan agar Institut Akuntan Publik Bersertifikat Amerika (*American Institute of Certified Public Accountant*) memulai kerjasama dengan busa efek. Sebagai akibatnya komite khusus dari AICPA menyarankan solusi umum kepada komite NYSE dan sebagai tambahan komite juga mengusulkan percobaan resminya yang pertama untuk mengembangkan teknik akuntansi yang berlaku umum dan dikenal dengan prinsip-prinsip umum (*board principles*) dari May. Setelah diterbitkannya ASR no 4 oleh SEC dan meningkatnya kecaman dari Asosiasi Akuntansi Amerika (*American Accounting Association*) dan para anggotanya yang baru saja dibentuk, di tahun 1938 diputuskan memberikan kuasa kepada Komite Prosedur Akuntansi (*Committee Accounting Procedure*) untuk mengumumkan keputusannya. CAP kemudian menerbitkan 12 *Accounting Reseach Bulletins* (ARB) selama periode 1938-1939 hingga masa perang. Mulai tahun 1946 hingga tahun 1953 diterbitkn 18 ARB untuk mengeliminasi praktek akuntansi yang dicurigai dan dipertanyakan serta focus pada masalah pelaporan khusus. Pada tahun 1957 hingga tahun 1959 ditandai dengan kritik intensif yang ditujukan kepada CAP untuk berbagai alasan.

Pada tahap ketiga dinamakan tahap kontribusi profesional yaitu tahun 1959 hingga tahun 1973

ketidakpuasan terhadap CAP dengan jelas diungkapkan oleh presiden AICPA pada waktu itu yaitu Alvin R. Jennings. Suatu komite khusus atas program riset yang dibuat tahun 1957 dan 1958 mengusulkan untuk melakukan pembubaran CAP dan departemen risetnya. AICPA menerima rekomendasi dari komite dan pada tahun 1959 mendirikan Dewan Prinsip Akuntansi (*Accounting Principal Board*) dan Divisi Riset Akuntansi (*Accounting Research Division*) dengan misi untuk memajukan pernyataan tertulis dari apa yang dinyatakan sebagai prinsip akuntansi yang berlaku umum. APB juga menerbitkan berbagai opini yang menangani isu-isu kontroversial mencapai sejumlah 31 opini antara tahun 1959 sampai dengan tahun 1973.

Pada tahap keempat yaitu tahun 1973 hingga sekarang dan disebut dengan tahap politisasi menyatakan bahwa keterbatasan yang dimiliki atas teori akuntansi telah mengarah kepada pengadopsian suatu pendekatan yang lebih deduktif sekaligus melakukan politisasi atas proses penetapan standarnya yaitu sebuah situasi yang diciptakan oleh pandangan yang berlaku umum bahwa angka-angka akuntansi mempengaruhi perilaku berekonomi dan sebagai konsekuensinya aturan akuntansi hendaknya dibuat dalam politik (Riahi and Belkaoui 2006).

Perkembangan Akuntansi Di Negara Lainnya

Negara Inggris, Kanada dan Australia serta beberapa negara persemakmuran Inggris memiliki hal yang disamakan dengan CPA (*Certified Public Accountant*) yaitu *Chartered Accountant* (CA) di Inggris, persemakmuran Inggris dan beberapa negara bekas negara bagian Inggris lainnya. Sedangkan *Chartered Certified Accountant* (ACCA) di Inggris, *International Accountant* (AIA) di Inggris, *Certified Public Accountant* (CPA) di Irlandia dan Hong Kong, dan *Certified Practising Accountant* (CPA) di Australia.

Untuk negara Kanada terdapat tiga lembaga yang disamakan dengan CPA (*Certified Public Accountant*) yaitu

The Canadian Institute of Chartered Accountants (CA), the Certified General Accountants Association of Canada (CGA) dan the Society of Management Accountants of Canada (CMA), CA dibentuk pada tahun 1902 sedangkan CGA dibentuk pada tahun 1913 berdasarkan Undang Undang Parlemen. CMA dibentuk pada tahun 1920. Perbedaan antara CA, CGA, dan CMA yaitu jika CA ditujukan untuk menjadi akuntan publik dan harus memiliki pengalaman auditing dari kantor akuntan public, CGA ditujukan untuk memilih karir di bidang keuangan, sedangkan CMA ditujukan untuk akuntansi manajemen. Syarat utama untuk CA, CGA, dan CMA adalah harus punya gelar sarjana dan pengalaman praktek sebelum memperoleh sertifikasi gelar profesi (Mursyidi 2010).

Perkembangan Akuntansi Di Indonesia

Ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945 hanya ada satu orang akuntan pribumi yaitu Prof. Dr. Abutari. Pada saat itu Prof. Soemardjo belum menyelesaikan pendidikan akuntannya di Belanda. Beliau baru menyelesaikan pendidikan akuntannya pada tahun 1956. Basuki Siddharta, Hendra Darmawan, Tan Tong Djoe, dan Go Tie Siem adalah akuntan Indonesia pertama yang merupakan lulusan dalam negeri dan lulus pada tahun 1957. Prof. Dr. Soemardjo bersama dengan mereka berempat yang memprakarsai berdirinya perkumpulan akuntan Indonesia.

Pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 1957 kelima orang akuntan tersebut mengadakan pertemuan di aula Universitas Indonesia dan sepakat untuk mendirikan perkumpulan akuntan Indonesia. Pada tahap awal dibentuk Panitia Persiapan Pendirian Perkumpulan Akuntan Indonesia karena pada saat itu pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh semua akuntan yang ada sehingga tugas dari panitia tersebut adalah menghubungi akuntan lainnya untuk menanyakan pendapat mereka mengenai usulan pendirian perkumpulan akuntan Indonesia. Susunan panitianya yaitu sebagai ketua adalah Prof. Dr. Soemardjo, Go Tie Siem sebagai penulis, Basuki Siddharta sebagai bendahara, sedangkan Hendra

Darmawan dan Tan Tong Djoe sebagai komisaris. Akhirnya pada tanggal 23 Desember 1957 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) terbentuk setelah pada pertemuan ketiga yang diadakan di aula Universitas Indonesia pada pukul 19.30.

Untuk susunan pengurus pertama IAI antara lain: sebagai ketua adalah Prof. Dr. Soemardjo Tjitrosidojo, sebagai panitera adalah Drs. Mr. Go Tie Siem, sebagai bendahara adalah Drs. Sie Bing Tat (Basuki Siddaharta), sebagai komisaris adalah Drs. Tan Tong Djoe dan Drs. Oey Kwie Tek (Hendra Darmawan), dan sebagai pendiri IAI lainnya adalah Prof. Dr. Abutari, Tio Po Tjiang, Tan Eng Oen, Tang Siu Tjhan, Liem Kwie Liang, dan The Tik Him.

IAI pertama kali menyelesaikan konsep anggaran dasarnya pada tanggal 15 Mei 1958 dan untuk anggaran dasar yang telah disetujui selesai pada tanggal 19 Oktober 1958 sehingga kemudian Menteri Kehakiman mengesahkan anggaran dasar pada tanggal 11 Februari 1959. Sedangkan untuk pendirian IAI ditetapkan pada tanggal 23 Desember 1957. Tujuan dari IAI adalah untuk membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan dan pekerjaan akuntan.

Prinsip Akuntansi Indonesia pertama kali diterbitkan oleh IAI pada tahun 1973. Prinsip Akuntansi Indonesia memiliki tujuan untuk menghimpun prinsip akuntansi yang lazim dan berlaku di Indonesia dan juga sebagai prasarana bagi penerbitan laporan keuangan untuk perusahaan yang akan memasuki bursa pasar modal karena merupakan salah satu prasarana mutlak dimana laporan keuangan dari perusahaan yang akan menerbitkan surat berharga kepada publik wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi tersebut.

Pada tahun 1974, Komite Prinsip Akuntansi Indonesia (Komite PAI) dibentuk dan memiliki tugas untuk menyusun standar keuangan. Kemudian PAI 1973 disempurnakan dan digantikan dengan PAI 1984 dan untuk perumusan prinsip, prosedur, metode, dan teknik dibatasi pada hal yang berhubungan dengan akuntansi keuangan yang diungkapkan secara garis besar atau

bersifat umum dan tidak mencakup praktik akuntansi untuk industri tertentu. Pada tahun 1984 komite PAI menerbitkan serangkaian pernyataan PAI dan interpretasi PAI untuk mengembangkan, menambah, mengubah dan juga menjelaskan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

IAI melakukan revisi total pada tahun 1994 dan standar keuangan diberi nama Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan pertama kalinya diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 1994. Komite PAI kemudian juga diganti namanya menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan (komite SAK) dan memiliki masa bakti empat tahun yaitu dari tahun 1994 sampai dengan tahun 1998. Pada tanggal 23-24 September 1998 diselenggarakan Kongres IAI VIII di Jakarta dan nama komite SAK kemudian diubah menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dan memiliki wewenang untuk menyusun dan mengesahkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK).

Pada tanggal 18 Oktober 2005 dibentuk Komite Akuntansi Syariah (KAS) dan Dewan Konsultatif Standar Akuntansi Keuangan (DKSAK). Tujuannya adalah untuk mendukung kelancaran kegiatan penyusunan PSAK oleh DSAK yang memiliki kaitan dengan perlakuan akuntansi terhadap transaksi Syariah. DKSAK merupakan mitra DSAK yang memiliki tugas untuk merumuskan arah dan pengembangan SAK di Indonesia dan para anggotanya terdiri dari profesi akuntan maupun di luar profesi akuntan.

Sejak tahun 1994 IAI memutuskan untuk melakukan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional dalam pengembangan standar akuntansinya tetapi akhirnya menjadi adopsi dalam rangka konvergensi dengan *International Financial Reporting Standards* (IFRS). Kini IAI telah mengalami perkembangan yang sangat luas karena profesi akuntan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan dunia usaha. IAI secara terus menerus menanggapi perkembangan akuntansi baik yang terjadi pada tingkat nasional maupun internasional sehingga IAI juga secara terus menerus merevisi SAK untuk mengikuti

kebutuhan perkembangan bisnis dan juga profesi akuntan. Bisa dilihat bahwa dalam perkembangannya sejak tahun 1994, SAK terus menerus dilakukan revisi dengan cara berkesinambungan baik disempurnakan maupun ditambah standar baru (Hery 2009).

Akuntansi di Indonesia pada awalnya menganut sistem seperti yang dipakai di Belanda yaitu sistem kontinental dimana disebut juga dengan nama tata buku tetapi tidak sama dengan akuntansi. Tata buku menyangkut kegiatan yang bersifat konstruktif dari proses pencatatan, kemudian meringkas dan selanjutnya menggolongkan serta aktivitas lain yang tujuannya adalah untuk menciptakan informasi akuntansi yang didasarkan pada data. Sedangkan akuntansi menyangkut kegiatan-kegiatan yang bersifat konstruksi dan analitikal seperti kegiatan analisis dan interpretasi berdasarkan informasi akuntansi. Oleh karena tata buku merupakan bagian dari akuntansi. Selanjutnya di Indonesia mulai menerapkan sistem akuntansi Anglo Saxon (sistem akuntansi Amerika Serikat), hal ini disebabkan karena adanya penanaman modal asing di Indonesia yang lebih banyak menggunakan sistem akuntansi tersebut dan tentunya hal ini membawa dampak yang positif terhadap perkembangan akuntansi. Alasan lainnya adalah karena sebagian besar dari mereka yang memiliki peran di dalam perkembangan akuntansi adalah merupakan lulusan dari Amerika sehingga menerapkan sistem akuntansi tersebut di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Hery. 2009. *Teori Akuntansi*. Edisi Pert. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ikhsan, Arfan, Muhammad Yamin Noch, Sukma Lesmana, and Pandopatan Ritonga. 2016. *Teori Akuntansi*. Medan: Madenatera.
- Mursyidi. 2010. *Akuntansi Dasar*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Riahi, Ahmed, and Belkaoui. 2006. *Accounting Theory Teori Akuntansi*. Edisi Keli. Jakarta: Salemba Empat.

Profil Penulis**Nelly Ervina, S.E., M.Si.**

Lahir di Pematangsiantar pada tanggal 27 Mei 1989. Ia merupakan lulusan S1 jurusan Akuntansi pada tahun 2012 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sultan Agung Pematangsiantar dan S2 jurusan Ilmu Akuntansi tahun 2016 di Universitas Sumatera Utara (USU) Medan. Ia juga merupakan Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sultan Agung Pematangsiantar dan ditempatkan pada Program Studi Akuntansi. Bidang keahliannya adalah Perpajakan, Akuntansi Manajemen dan Penganggaran Perusahaan. Beberapa buku yang telah ditulisnya adalah: Manajemen Operasional, Perpajakan dan Dasar-Dasar Analisa Laporan Keuangan. Pada tahun 2020 mengikuti Penelitian Dosen Pemula yang dibiayai Oleh Kemenristekdikti dan berhasil lulus sebagai Anggota Peneliti 1. Selain aktif mengajar juga merupakan konsultan pajak terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Sinta ID 6695611.

Email Penulis: nellyervinastie@gmail.com

PROFESI AKUNTANSI

Syarifah Zuhra, S.S.T., M.E.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Profesi Akuntansi

Bidang akuntansi cukup diminati, karena ruang lingkup dan jangkauannya luas. Ada banyak bentuk profesi akuntansi. Bisa dikatakan hampir setiap perusahaan atau organisasi membutuhkan orang yang berprofesi di bidang akuntansi. Orang yang bekerja dan memiliki keahlian di bidang akuntansi dapat disebut akuntan. Terdapat berbagai jenis akuntan, tergantung pada bidang pekerjaannya. Umumnya seorang akuntan memiliki pendidikan serta keahlian di bidang ekonomi dan keuangan. Apa sajakah profesi akuntansi dan bagaimana tanggung jawab pekerjaannya? Akuntan dibagi menjadi beberapa macam profesi seperti akuntansi publik, pemerintah, pendidik, internal, syariah, dan pajak. Seorang akuntan memiliki peranan yang sangat penting di perusahaan jenis apapun, baik kecil maupun besar. Manfaat akuntan untuk perusahaan cukup banyak, sebab mereka sendiri memiliki tugas yang beragam. Menurut KBBI, pengertian akuntan adalah ahli akuntansi yang bertugas menyusun, membimbing, mengawasi, menginspeksi, dan memperbaiki tata buku serta administrasi perusahaan atau instansi pemerintah. Dari pengertian di atas, dapat diartikan bahwa tugas mereka untuk perusahaan cukup kompleks. Akuntan memonitor dan mencatat aliran keuangan yang ada dalam sebuah bisnis atau organisasi. Selain itu, seorang akuntan juga

memiliki tugas untuk memverifikasi keakuratan dan memastikan keabsahan semua transaksi dan memonitor transaksi tersebut agar sesuai dengan ketentuan perusahaan.

Macam-Macam Profesi Akuntan

Pada dasarnya seorang akuntan tidak hanya bekerja untuk perusahaan saja. Mereka juga dapat memilih bekerja untuk individu. Dalam hal ini akuntan membantu individu terkait keuangan seperti keputusan keuangan, pengembalian pajak dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa macam profesi akuntan serta tugas dan manfaatnya masing-masing. Macam-macam profesi akuntan tersebut antara lain:

1. Akuntan Publik

Lebih dikenal sebagai akuntan eksternal, profesi ini bekerja secara independen dalam memberikan jasa-jasanya. Karena bersifat independen, akuntan publik biasanya memiliki kantor akuntannya sendiri dan menawarkan jasanya kepada masyarakat umum. Jasa yang ditawarkan akuntan publik antara lain perpajakan, penyusunan sistem akuntansi, pemeriksaan kewajaran laporan keuangan, konsultasi manajemen perusahaan dan penyusunan laporan keuangan dalam rangka pengajuan kredit. Mereka bekerja secara bebas dan biasanya mendirikan sebuah kantor akuntan. Akuntan jenis ini bertugas untuk melakukan pemeriksaan atau audit, memberikan jasa perpajakan dan memberikan jasa konsultasi manajemen. Profesi akuntan publik menghasilkan berbagai macam jasa bagi masyarakat, yang dapat digolongkan ke dalam dua kelompok:

a. *Jasa Assurance*

Jasa assurance adalah jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan. *Jasa assurance* ini lebih dikenal dengan jasa audit.

b. Jasa Atestasi

Salah satu tipe jasa *assurance* yang disediakan oleh profesi akuntan publik adalah jasa atestasi. Atestasi atau (*attestation*) adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai, dalam suatu hal yang material, dengan kriteria yang ditetapkan.

c. Jasa *Non-assurance*

Jasa *non-assurance* adalah jasa yang dihasilkan oleh mereka yang di dalamnya tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Jenis jasa *non-assurance* yang dihasilkan oleh akuntan publik adalah jasa kompilasi, jasa perpajakan dan jasa konsultasi.

2. Akuntan Pemerintah (*Government Accountant*)

Seperti namanya, seorang akuntan pemerintah bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan. Yaitu lembaga seperti Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tugas-tugas yang diemban oleh akuntan pemerintah antara lain melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap aliran keuangan negara serta melakukan perancangan sistem akuntansi untuk pemerintah. Tiap lembaga pemerintah membutuhkan akuntan untuk melacak uang. Akuntan pemerintah merupakan akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah, misalnya di kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pengawas Keuangan (BPK), perpajakan dan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kabupaten, kota, hingga kecamatan. Tugas utamanya adalah menyusun laporan keuangan pemerintah atau bisa juga mengaudit setiap institusi-institusi pemerintah di berbagai tingkat pemerintahan. Akuntan pemerintah juga membantu lembaga pemerintah merencanakan kegiatan mereka untuk tahun fiskal.

3. Akuntan Pendidik

Jika dua profesi di atas lebih condong kepada profesi sebagai praktisi akuntansi, maka profesi yang satu ini berfokus di dunia pendidikan. Seorang akuntan pendidik bertugas mengajar dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi. Selain itu, akuntan pendidik juga dituntut untuk mampu melakukan penelitian dan pengembangan ilmu akuntansi. Akuntan yang bertugas dalam bidang pendidikan akuntansi, melakukan penelitian dan pengembangan akuntansi, mengajar dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi di sebuah perguruan tinggi. Dapat diartikan pula bahwa akuntan pendidik sebagai tenaga pengajar di institusi pendidikan dan bertugas untuk mengembangkan pendidikan akuntansi.

Pada umumnya, mereka tidak semata-mata mengajar tetapi merangkap dengan pekerjaan lain, seperti membuka praktik untuk melayani kebutuhan masyarakat atau pihak-pihak yang membutuhkan keahliannya.

4. Akuntan Internal

Profesi akuntan selanjutnya merupakan jenis yang kerap ditemukan pada perusahaan atau disebut dengan internal. Layaknya susunan organisasi dalam perusahaan, akuntan internal juga menduduki suatu jabatan. Baik itu staf hingga kepala bagian akuntansi atau direktur keuangan. Tugas dari akuntan internal adalah menyusun sistem akuntansi perusahaan, menyusun laporan untuk pihak luar, menyusun anggaran hingga menangani masalah pajak.

5. Akuntan Syariah

Profesi akuntan syariah terbilang baru dan juga masih jarang ditemukan di Indonesia. Mereka biasanya dipekerjakan pada perusahaan-perusahaan yang menerapkan hukum syariat islam dalam mengelola keuangannya. Mereka bekerja sesuai dengan Standar Akuntansi Syariah dan juga berpegang pada keputusan MUI.

6. Akuntan Pajak

Pada beberapa perusahaan saat ini, membagi-bagi tugas akuntansi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Salah satu sub-akuntan yang saat ini mulai diterapkan oleh perusahaan adalah akuntan pajak. Akuntan pajak adalah mereka yang hanya berfokus pada pencatatan dan pembukuan pajak. Seorang akuntan pajak akan mengatur keuangan yang akan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

7. Akuntan Manajemen

Jenis-jenis profesi akuntansi selanjutnya adalah akuntan manajemen. Akuntan manajemen bekerja untuk memberikan informasi terkait kesehatan keuangan suatu organisasi atau perusahaan sehingga keputusan yang baik dapat dibuat mengenai masa depan perusahaan. Beberapa tugas umum seorang akuntan manajemen adalah perencanaan dan penganggaran, pelaporan keuangan eksternal, manajemen risiko, analisis profitabilitas dan banyak lagi. Selain keterampilan akuntansi teknis, akuntan manajemen harus memiliki kemampuan untuk mengatur informasi dan menyajikannya dengan cara yang sederhana untuk dipahami oleh eksekutif bisnis.

8. Akuntan investasi

Akuntan investasi bekerja di bidang keuangan dan investasi yang bergerak cepat. Akuntan investasi biasanya bekerja untuk perusahaan pialang dan manajemen aset. Para akuntan ini menjadi sangat berpengetahuan tentang saham, obligasi, mata uang, logam mulia dan sarana investasi lainnya. Tanggung jawab utama seorang akuntan investasi adalah untuk mempertahankan investasi klien mereka sambil mematuhi peraturan negara.

9. Akuntan Biaya (Cost accountant)

Akuntan Biaya bertanggung jawab untuk memeriksa setiap pengeluaran yang terkait dengan rantai pasokan perusahaan untuk melakukan analisis

profitabilitas dan persiapan anggaran. Akuntan biaya menganalisis setiap biaya yang terkait dengan tenaga kerja, bahan, pengiriman, produksi, administrasi dan banyak lagi. Informasi ini kemudian disusun dan dikomunikasikan kepada para pemimpin bisnis untuk membantu mengidentifikasi cara meningkatkan efisiensi keuangan.

10. Akuntan proyek (Project accountant)

Jenis-jenis profesi akuntansi ini bekerja berdasarkan proyek per proyek. Akuntan proyek bertugas mengawasi semua aspek proyek yang mungkin memengaruhi biaya keseluruhan, termasuk menyiapkan dan mengumpulkan faktur, menyetujui biaya, memverifikasi jam kerja karyawan, merencanakan dan memelihara anggaran, dan memastikan tim memenuhi tenggat waktu proyek. Ada banyak jenis proyek yang dapat dikerjakan oleh akuntan proyek, mulai dari peluncuran produk baru hingga pembangunan fasilitas baru. Akuntan proyek biasanya bekerja dengan manajer proyek dan kolega profesional lainnya. Ini membuat akuntan proyek harus memiliki kemampuan komunikasi dan interpersonal yang kuat.

Manfaat Akuntan Untuk Perusahaan

Terkhusus untuk perusahaan, seorang akuntan tidak hanya mempunyai tugas seperti yang disebutkan sebelumnya. Seorang akuntan perusahaan yang baik memberikan sejumlah manfaat yang antara lain:

1. Menghemat Waktu

Bagi pemilik perusahaan waktu merupakan hal yang sangat berharga. Sesempit apapun waktu yang dimiliki pasti diperlukan untuk melakukan hal-hal yang dapat mengembangkan bisnisnya. Namun, ada satu aspek dalam bisnis yang akan menyita lebih banyak waktu, yakni pengelolaan keuangan. Tanggung jawab dalam aspek ini pengelolaan keuangan lebih banyak melakukan hal teknis seperti

pembukuan, pencatatan penerimaan, pengembalian pajak, penetapan target keuangan dan lain sebagainya. Tugas-tugas ini bisa memakan banyak waktu. Oleh karena itu, bila suatu usaha memiliki akuntan dan mendelegasikan tugas-tugas tersebut, mampu memberikan waktu lebih kepada pemilik usaha untuk fokus pada pengembangan bisnis di sektor lainnya.

2. Mampu Mengatasi Permasalahan Akuntansi Hingga Paling Rumit

Beberapa tugas akuntan memang cukup sederhana, namun tanggung jawab kompleks yang diembannya membuat masih banyak masalah akuntansi rumit lain yang harus diselesaikan. Mereka harus memastikan semua tugas dikerjakan dengan benar. Karena kesalahan yang dilakukan dalam pencatatan dan perhitungan akuntansi memberi pengaruh yang cukup buruk. Kesalahan dapat membebani perusahaan secara finansial baik dari segi kerugian, denda ataupun pinalti bahkan kebangkrutan perusahaan. Oleh karena itu, tidak sembarang orang dapat memegang posisi ini tanpa pendidikan atau pengalaman di bidang tersebut. Dengan menyewa seorang akuntan, permasalahan akuntansi perusahaan yang paling rumit pun biasanya bisa diatasi dengan baik.

3. Menghemat Anggaran

Tugas seorang akuntan adalah memastikan keuangan suatu perusahaan tetap terjaga. Yaitu dengan memperhatikan dan mengawasi arus keluar masuk keuangan perusahaan. Dari kegiatan-kegiatan tersebut, mereka memberikan manfaat pada perusahaan untuk mengontrol keuangan agar tidak dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak penting. Mereka akan mengalokasikan keuangan secara tepat dan efisien.

4. Mampu Memberikan Nasihat dan Saran Bisnis

Akuntan yang memiliki pengalaman menangani keuangan berbagai jenis perusahaan umumnya dapat memberikan saran untuk pengembangan bisnis dari sisi keuangan. Lebih dari sekadar pengolahan angka, dengan pengalamannya, mereka dapat memberikan umpan balik yang objektif dan saran yang berharga terhadap ide-ide pengembangan bisnis.

5. Ahli dalam Perpajakan

Mengurus pajak bukan sekadar melengkapi kotak dengan data-data. Akuntan yang memiliki pengetahuan dan mahir akan pajak dapat membantu perusahaan melakukan penghitungan pajak seefisien mungkin namun tidak melanggar peraturan pajak yang berlaku.

Pedoman Profesi Akuntan

Menjadi seorang akuntan harus mematuhi kode etik profesi akuntansi dan bertindak sesuai standar akuntansi Indonesia. Indonesia telah memiliki bermacam-macam standar akuntansi yang digunakan di berbagai entitas usaha dan organisasi. Standar akuntansi di Indonesia mengacu pada teori yang ada, diantaranya adalah IFRS (International Financing Reporting Standards) yang digunakan pada skala global. Penggunaan IFRS sendiri ditentukan karena Indonesia merupakan anggota IFAC (International Federation of Accountants) yang menjadikan IFRS sebagai standar akuntansi di Indonesia. Standar akuntansi merupakan salah satu hal penting yang harus dipelajari oleh setiap profesi ini.

Selain mempelajari hal-hal terkait akuntansi, para akuntan juga dituntut untuk memahami aturan baku berupa kode etik profesi dan standar dari kegiatan pekerjaan. Kode etik profesi merupakan kaidah-kaidah yang menjadi landasan bagi eksistensi profesi dan sebagai dasar terbentuknya kepercayaan masyarakat. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merupakan aturan yang mengatur perilaku etika para akuntan dalam

memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Kode etik Indonesia memuat beberapa prinsip etika sebagai berikut ini:

1. Tanggung jawab profesi, yaitu selalu menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan.
2. Kepentingan publik, yaitu wajib bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalismenya.
3. Integritas, yaitu di dalam usahanya untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.
4. Objektivitas, berarti harus menjaga objektivitas, bersikap netral, dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesional.
5. Kompetensi dan kehati-hatian.
6. Kerahasiaan, berarti menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional akuntan.
7. Standar teknis, yaitu melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan.

Aturan Etika Profesi Akuntansi

Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung-jawab profesionalnya.

Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung-jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan

tersebut terdapat empat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi:

1. Kredibilitas.

Masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi.

2. Profesionalisme.

Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasi oleh pemakai jasa Akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi.

3. Kualitas Jasa.

Terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja tertinggi.

4. Kepercayaan.

Pemakai jasa akuntan harus dapat merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan.

Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia terdiri dari tiga bagian: (1) Prinsip Etika, (2) Aturan Etika, dan (3) Interpretasi Aturan Etika. Prinsip Etika memberikan kerangka dasar bagi Aturan Etika, yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip Etika disahkan oleh Kongres dan berlaku bagi seluruh anggota, sedangkan Aturan Etika disahkan oleh Rapat Anggota Himpunan dan hanya mengikat anggota Himpunan yang bersangkutan. Interpretasi Aturan Etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya.

Pernyataan Etika Profesi yang berlaku saat ini dapat dipakai sebagai Interpretasi dan atau Aturan Etika sampai dikeluarkannya aturan dan interpretasi baru untuk menggantikannya. Kepatuhan terhadap Kode Etik, seperti juga dengan semua standar dalam masyarakat terbuka,

sangat diperlukan terutama sekali pada pemahaman dan tindakan sukarela anggota. Di samping itu, kepatuhan anggota juga ditentukan dengan adanya pemaksaan oleh sesama anggota dan diiringi opini publik, dan pada akhirnya dengan adanya mekanisme *punishment* atau sanksi atas pelanggaran Kode Etik oleh organisasi apabila diperlukan terhadap anggota yang tidak menaatinya atau melakukan pelanggaran terhadap kode etik.

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)

Profesi akuntan publik (auditor independen) memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam mengemban kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh masyarakat (publik). Terdapat 3 (tiga) tanggung jawab akuntan publik dalam melaksanakan pekerjaannya yaitu:

1. Tanggung jawab moral (*moral responsibility*).

Akuntan publik harus memiliki tanggung jawab moral untuk:

- a. Memberi informasi secara lengkap dan jujur mengenai perusahaan yang diaudit kepada pihak yang berwenang atas informasi tersebut, walaupun tidak ada sanksi terhadap tindakannya.
- b. Mengambil keputusan yang bijaksana dan obyektif (*objective*) dengan kemahiran profesional (*due professional care*).

2. Tanggung jawab profesional (*professional responsibility*).

Akuntan publik harus memiliki tanggung jawab profesional terhadap asosiasi profesi yang mewadahnya (*rule professional conduct*).

3. Tanggung jawab hukum (*legal responsibility*).

Akuntan publik harus memiliki tanggung jawab di luar batas standar profesinya yaitu tanggung jawab terkait dengan hukum yang berlaku. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar

Auditing Seksi 110, mengatur tentang “Tanggung Jawab dan Fungsi Auditor Independen”. Pada paragraf 2, standar tersebut antara lain dinyatakan bahwa auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Oleh karena sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan, auditor dapat memperoleh keyakinan memadai, namun bukan mutlak. Bahwa salah saji material terdeteksi. Auditor tidak bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan bahwa salah saji terdeteksi, baik yang disebabkan kekeliruan atau kecurangan, yang tidak material terhadap laporan keuangan.

Daftar Pustaka

- Arief Basuki (2004), “Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia”. <http://www.iaiglobal.or.id/organisasi/>
- Bertens, K. (2000) Pengantar Etika Bisnis. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Boynton, W.C., Johnson, R.N., Kell, W.G. (2003). Modern Auditing. 7th. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Sihwahjoeni dan M. Gudono. (2000). “Persepsi Akuntan terhadap Kode Etik Akuntan”. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. Vol.3(2) Juli: 168-184.

Profil Penulis



Syarifah Zuhra, S.S.T., M.E.

Penulis dikenal dengan nama panggilan Rara, Lahir di Bukittinggi, pada 11 November 1992. Lulusan dari Politeknik Negeri Padang tahun 2014 dengan Program Studi D4 Akuntansi dengan gelar Sarjana Sains Terapan. Menyelesaikan Magister Ekonomi Syariah di Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi tahun 2019 dengan gelar Magister Ekonomi. Saat ini adalah Dosen yang mengampu mata kuliah Pengantar Akuntansi, Akuntansi Biaya, dan Akuntansi Travel Haji dan Umroh di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Pernah menjabat sebagai *Staff Auditor* di *Kantor Akuntan Publik Sukrisno, Sarwoko dan Sandjaja (KAP SSS)* tahun 2013 - 2014. *PIC Facility Officer* di *NGO Australia-Indonesia Facility for Disaster Reduction (AIFDR) – UPT BNPB West Sumatera* tahun 2015 - 2016. Dan *Finance Officer* di *PT. World Innovative Telecommunication (OPPO Smartphone)* tahun 2016 - 2019. Kecintaan penulis dengan dunia tulisan pada tahun 2020 melahirkan karya pertama Buku Literasi Puisi. Masih di Tahun 2020 penulis dipercayai menjadi editor Jurnal di Lembaga *Writing Guidance Center (WGC)*.

Email Penulis: syarifahrara11@gmail.com

RUANG LINGKUP TEORI AKUNTANSI

Dr. Desak Nyoman Sri Werastuti, S.E., M.Si., Ak., CA.

Universitas Pendidikan Ganesha

Teori Akuntansi terdiri atas dua kata yaitu teori dan akuntansi. Teori merupakan suatu susunan yang saling berkaitan tentang hipotesis, konsep dan prinsip yang membentuk kerangka acuan untuk bidang yang dibahas (*Webster's Third New International Dictionary*). Teori didefinisikan sebagai kristalisasi dari fenomena empiris dan dalil normatif yang disusun serta digambarkan dalam bentuk dalil-dalil yang disimpulkan dari fenomena dan disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat pendek yang dapat berlaku secara umum.

Adapun akuntansi lahir dari lingkungan ekonomi kapitalis. Akuntansi adalah alat untuk mengukur pertanggungjawaban. Akuntansi dikatakan sebagai sistem informasi. Akuntansi merupakan *tool of management* alat untuk mengumpulkan harta dan memeliharanya agar proses akumulasi kekayaan berjalan lancar dan penguasaannya tetap di tangan kapitalis. Sementara itu Akuntansi dianalisis dari akronimnya sebagai berikut:

A	Angka	Akuntansi menyangkut angka
K	Keputusan	Angka-angka tersebut akan dijadikan dasar dalam proses pengambilan keputusan
U	Uang	Angka tersebut juga menyangkut uang
N	Nilai	Uang mengandung nilai moneter
T	Transaksi	Nilai moneter yang menggambarkan catatan dari transaksi perusahaan
A	Analisis	Angka tersebut dapat dianalisis untuk menggali lebih banyak informasi yang dikandungnya dan memprediksi masa yang akan datang.
N	Netral	Angka tersebut bersifat netral kepada semua pemakai laporan keuangan
S	Seni	Laporan keuangan ada unsur seninya karena berbagai alternatif yang bisa dipilih
I	Informasi	Informasi yang dihasilkan sangat diperlukan para pemakai dalam pengambilan keputusan.

Akuntansi juga diartikan sebagai bahasa atau alat komunikasi bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan (ekonomi) berupa posisi keuangan yang tertuang dalam jumlah kekayaan, utang dan modal suatu bisnis pada suatu waktu atau periode tertentu. *A Statement of Basic Accounting Theory* (ASOBAT) mendefinisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya. Kemudian *American Institute of Certified Public Accounting* (AICPA) mendefinisikan akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. *Accounting Principle Board*

(APB) statement No. 4 mendefinisikan akuntansi sebagai suatu kegiatan jasa dimana fungsinya untuk memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar memilih diantara beberapa alternatif.

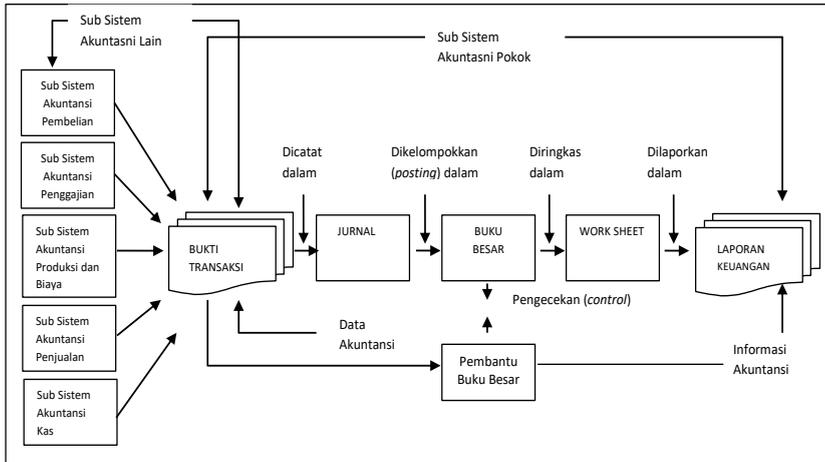
Sifat-Sifat Akuntansi

Sifat-sifat akuntansi terdiri atas:

1. Akuntansi sebagai ideologi yaitu menganggap akuntansi sebagai alat legitimasi keadaan dan struktur sosial, ekonomi dan politik kapitalis. Akuntansi konvensional merupakan ilmu yang didesain dan dikembangkan dalam masyarakat Barat yang dilandasi oleh ideologi kapitalis. Akuntansi diarahkan untuk kepentingan pemilik modal dimana sasarannya adalah agar kekayaan, resources yang dimiliki bisa terus bertambah, berkembang dengan return yang tinggi. Jadi sasarannya sejalan dengan ideologi kapitalisme yaitu ingin memupuk kekayaan dalam dirinya dan menjadikan pihak lain sebagai peripheral dan tunduk pada kepentingannya.
2. Akuntansi sebagai bahasa yaitu berbicara (berkomunikasi) tentang organisasi yang dilaporkannya. Sebagai bahasa akuntansi memiliki ciri-ciri diantaranya *lexical* (simbol) dimana kata-kata yang digunakannya hanya dimengerti oleh orang-orang yang mengetahui akuntansi, misalnya istilah laba rugi, neraca dana lain-lain. Ciri selanjutnya adalah *gramatical rules* (tata aturan) yaitu akuntansi memiliki aturan sehingga orang dapat memahami bahasa akuntansi, misalnya untuk penempatan aset harus berdasarkan urutan likuiditasnya.
3. Akuntansi sebagai catatan historis yaitu akuntansi telah dianggap sebagai wahana untuk memberikan gambaran sejarah organisasi dan transaksi yang dilakukan dengan lingkungannya pada masa lalu.

4. Akuntansi sebagai realitas ekonomi saat ini yaitu akuntansi dianggap dapat memberikan realitas ekonomi perusahaan pada saat ini. Laporan akuntansi dianggap menggambarkan situasi ekonomi perusahaan pada saat sekarang sehingga mestinya sistem akuntansi harus menggunakan harga saat ini atau *current value*.
5. Akuntansi sebagai sistem akuntansi yaitu akuntansi memiliki siklus yang disebut *accounting cycle* yang memproses bukti transaksi menjadi bentuk-bentuk informasi yang kita kenal dengan laporan keuangan yang dapat dipergunakan masyarakat untuk proses pengambilan keputusan.
6. Akuntansi sebagai sistem komoditas yaitu informasi akuntansi merupakan output /produk yang dihasilkan sistem informasi/akuntansi. Output ini dibutuhkan masyarakat karena dapat memberikan manfaat yang besar bagi pemakainya yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi.
7. Akuntansi sebagai sistem pertanggungjawaban yaitu akuntansi dijadikan sebagai media untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan suatu perusahaan atau lembaga kepada majikannya (principal). Tujuan akuntansi keuangan diantaranya adalah sisi pertanggungjawaban selain sisi pengambilan keputusan.
8. Akuntansi sebagai teknologi yaitu akuntansi sebagai bagian dari praktik karena teknologi secara langsung dapat merubah sosial. Teknologi dianggap dapat menjembatani antar teori dan praktek. Akuntansi dianggap sebagai teknologi perangkat lunak karena merupakan disiplin rekayasa informasi dan pengendalian keuangan.

Siklus Akuntansi



Gambar 3.1 Siklus Akuntansi

Teori Akuntansi

Teori adalah suatu susunan yang saling berkaitan tentang hipotesis, konsep dan prinsip yang membentuk kesimpulan acuan untuk bidang akuntansi. Pengertian teori akuntansi adalah kristalisasi fenomena yang dituangkan dalam bentuk kalimat-kalimat (*preposition*) yang disimpulkan dari fenomena interaksi bisnis entities dan pemakai laporan keuangan. Teori akuntansi juga didefinisikan sebagai susunan konsep, definisi, dalil yang menyajikan secara sistematis gambaran fenomena akuntansi yang menjelaskan hubungan antara variabel dengan variabel lainnya dalam struktur akuntansi dengan maksud dapat menjelaskan dan meramalkan fenomena yang mungkin akan muncul. Hendricksen mengatakan bahwa teori akuntansi merupakan satu susunan prinsip umum yang memberikan kerangka acuan yang umum sehingga praktek akuntansi dapat dinilai, disebutkan juga bahwa teori akuntansi yang dirumuskan tidak akan mampu mengikuti perkembangan ekonomi, sosial, teknologi dan ilmu pengetahuan yang demikian cepat. Dalam teori akuntansi ada elemen teori akuntansi yang

menunjukkan tujuan Laporan Keuangan, postulat, konsep akuntansi, standar akuntansi.

Elemen dan Struktur Teori Akuntansi

Pendekatan dan metodologi apa pun yang digunakan dalam penyusunan teori akuntansi, rerangka acuan yang dihasilkan didasarkan pada serangkaian elemen dan hubungan yang mengatur pengembangan teknik akuntansi. Struktur teori akuntansi terdiri dari beberapa elemen-elemen berikut ini:

1. Pernyataan Tujuan Laporan Keuangan
2. Pernyataan postulat dan konsep teoritis akuntansi yang terkait dengan asumsi-asumsi lingkungan dan sifat unit akuntansi. Postulat dan konsep teoritis diturunkan dari pernyataan tujuan.
3. Pernyataan tentang prinsip-prinsip dasar yang didasarkan pada postulat dan konsep teoritis .
4. Batang tubuh teknik-teknik akuntansi yang diturunkan dari prinsip-prinsip akuntansi.

Tujuan Laporan Keuangan (FASB)

Tujuan Pelaporan Keuangan menurut konsepsi FASB yang disusun atas dasar kondisi lingkungan ekonomi sosial di Amerika diantaranya:

1. Memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya dan bermanfaat bagi investor dan kreditur untuk dasar pengambilan keputusan investasi dan pemberian keputusan.
2. Memberikan informasi posisi keuangan perusahaan dengan menunjukkan sumber-sumber ekonomi (kekayaan) perusahaan serta asal kekayaan tersebut (siapa pihak yang mempunyai hak atas kekayaan tersebut).
3. Memberikan informasi keuangan yang dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (*earning power*).

4. Memberikan informasi yang dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang-hutangnya.
5. Memberikan informasi keuangan yang dapat menunjukkan sumber-sumber pembiayaan perusahaan.
6. Memberikan informasi yang dapat membantu para pemakai dalam meramalkan aliran kas masuk ke perusahaan.

APB Statement No.4

Tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai prinsip akuntansi berterima umum, posisi keuangan, hasil operasi, dan perubahan lain dalam posisi keuangan. Tujuan umum laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang sumber daya ekonomis dan kewajiban suatu usaha bisnis
2. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang perubahan sumber daya bersih sebagai hasil dari aktivitas-aktivitas perusahaan yang menghasilkan profit
3. Menyediakan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk mengestimasi earning potensial perusahaan
4. Menyediakan informasi lain yang dihasilkan tentang perubahan sumber daya ekonomi dan kewajiban.
5. Mengungkapkan informasi lain yang relevan dengan kebutuhan pemakai.

Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) 1984

Tujuan Laporan Keuangan:

1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aset dan kewajiban serta modal suatu perusahaan.
2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam aset neto (aset dikurangi kewajiban) suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba.
3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan di dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
4. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam aset dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi
5. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan.

Trueblood Report

Tujuan Laporan Keuangan sebagai berikut.

1. Menyediakan informasi sebagai dasar keputusan ekonomi.
2. Melayani pemakai yang memiliki keterbatasan otoritas, kemampuan, atau sumber daya untuk memperoleh informasi dan pemakai yang bergantung pada laporan keuangan sebagai sumber informasi utama tentang aktivitas perusahaan.
3. Menyediakan informasi yang berguna bagi investor dan kreditur untuk memprediksi, membandingkan, dan mengevaluasi jumlah, waktu, dan ketidakpastian yang terikat dengan aliran kas potensial.

4. Menyediakan informasi pada pemakai untuk memprediksi, membandingkan, dan mengevaluasi kemampuan perusahaan memperoleh earnings.
5. Menyediakan informasi yang berguna dalam menilai kemampuan manajemen untuk menggunakan sumber daya organisasi secara efektif guna mencapai tujuan utama perusahaan.

Sifat Postulat Akuntansi

Postulat akuntansi adalah pernyataan yang tidak memerlukan pembuktian atau aksioma, berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan laporan keuangan dan menggambarkan lingkungan akuntansi, politik, sosiologi, dan hukum tempat akuntansi beroperasi.

Postulat Akuntansi

1. Postulat Entitas

Postulat entitas menyatakan bahwa setiap perusahaan merupakan unit akuntansi yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya dan perusahaan lain. Implikasinya :

- a. Dibedakan antara transaksi bisnis dan individu
- b. Mengakui tanggung jawab pelayanan manajemen pada pemegang saham.
- c. Penentuan segmen perusahaan (seperti) divisi atau beberapa perusahaan seperti konsolidasi perusahaan yang saling terkait)
- d. Akuntansi sumber daya manusia, sosio ekonomi, kos modal akan semakin mudah masuk dalam laporan keuangan.

2. Postulat Kelangsungan Usaha

Postulat Kelangsungan Usaha atau postulat kontinuitas, menyatakan bahwa entitas akuntansi akan terus beroperasi untuk melaksanakan proyek, komitmen, dan aktivitas yang sedang berjalan. Implikasinya:

- a. Jika entitas memiliki kehidupan yang terbatas, maka laporan yang sesuai akan akan menspesifikasi data terminal dan sifat likuidasi.
- b. Menjustifikasi penilaian asset dengan dasar non likuidasi dan menyediakan dasar untuk akuntansi depresiasi
- c. Harapan tentang manfaat di masa mendatang mendorong manajer untuk melihat ke depan dan memotivasi investor untuk menanamkan modalnya ke perusahaan.

3. Postulat Unit Pengukur

Postulat unit pengukur menyatakan bahwa akuntansi adalah pengukuran dan proses mengkomunikasikan aktivitas perusahaan dalam satuan moneter. Implikasinya

- a. Akuntansi terbatas untuk memprediksi informasi yang dinyatakan dalam satuan moneter, tidak mencatat dan mengkomunikasikan informasi lain yang relevan namun bersifat non moneter
- b. Postulat unit mengukur menganggap bahwa daya beli uang adalah stabil sepanjang waktu atau perubahannya tidak signifikan.

4. Postulat Periode Akuntansi

Laporan keuangan yang menggambarkan perubahan dalam kesejateraan perusahaan seharusnya diungkapkan secara periodik. Implikasinya:

- a. Panjangnya periode waktu dapat bervariasi, tetapi hukum pajak penghasilan yang mensyaratkan penentuan income dengan dasar tahunan, dan praktik bisnis tradisional menggunakan periode normal satu tahun.
- b. Penggunaan akrual dan tangguhan dalam pembuatan posisi keuangan perusahaan.

Konsep-Konsep Teoritis Akuntansi

Konsep teori akuntansi adalah pernyataan yang tidak memerlukan pembuktian atau aksioma, juga berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan laporan keuangan, yang menggambarkan sifat entitas akuntansi yang beroperasi dalam ekonomi bebas yang dikarakteritikan oleh kepemilikan pribadi atas kekayaan diantaranya.

1. Teori Proprietary/Kepemilikan.

Menurut teori proprietary, entitas sebagai “agen perwakilan atau susunan melalui wirausahawan individual atas pengoperasian pemegang saham.” Tujuan utama teori proprieteray adalah untuk menentukan dan menganalisa kekayaan bersih pemilik, dengan persamaan akuntansi:

$$\text{Asset} - \text{Utang} = \text{Ekuitas Pemilik}$$

Implikasinya:

- a. Asset dinilai dan neraca disusun untuk mengukur perubahan dalam kepentingan atau kesejahteraan pemilik.
- b. Revenue dan expense dianggap meningkat atau menurun secara berturut-turut dalam kepemilikan yang bukan berasal dari investasi pemilik atau penatikan modal jadi pemilik.
- c. Bunga, pajak income sebagai expense, laba per lembar saham, dividen perlembar saham.
- d. Hanya pemegang saham biasa yang merupakan bagian dari kelompok Proprietary dan pemegang saham preferred tidak termasuk didalamnya (dividen preferen dikurangkan ketika menghitung earning pemilik).
- e. Saham biasa dan saham preferen termasuk dalam ekuitas pemilik (deviden tidak dikurangkan ketika menghitung earning pemilik)

2. Teori Entitas

Teori entitas memandang entitas sebagai sesuatu yang terpisah dan berbeda dari pihak yang menyediakan modal pada entitas. Unit bisnis bukan pemilik, merupakan pusat kepentingan akuntansi. Unit bisnis memiliki sumber daya perusahaan dan bertanggung jawab terhadap pemilik maupun kreditor. Menurut teori ini, persamaan akuntansinya adalah :

$$\text{Asset} = \text{Ekuitas}$$

$$\text{Asset} = \text{Utang} + \text{Ekuitas Pemegang Saham}$$

Asset adalah pertumbuhan hak perusahaan

Ekuitas adalah sumber asset dan terdiri dari utang dan ekuitas pemegang saham.

Implikasinya:

- a. Baik kreditor dan pemegang saham adalah pemilik ekuitas, meskipun mereka memiliki hak yang berbeda terkait dengan income, control resiko, dan likuidasi.
- b. Akuntabilitas kepada pemilik ekuitas dicapai dengan mengukur kinerja operasi dan keuangan perusahaan.
- c. Income merupakan peningkatan dalam ekuitas pemegang saham setelah klaim pemilik ekuitas lainnya (sebagai contoh bunga jangka panjang, dan pajak penghasilan telah terpenuhi).
- d. Teori entitas menyetujui pengadopsian penilaian persediaan LIFO ketimbang FIFO, karena penilaian LIFO dapat mencapai penentuan income yang lebih baik.
- e. Definisi umum revenue sebagai produk perusahaan dan expenses sebagai barang dan jasa yang dikonsumsi untuk mendapatkan revenue.

3. Teori Dana

Dalam teori dana, dasar akuntansi bukan teori proprietary maupun teori entitas, tetapi kelompok asset, kewajiban dan restriksi terkait atau disebut dana, yang mengatur penggunaan asset. Jadi, teori dana memandang unit bisnis terdiri atas sumber daya. Persamaan akuntansinya adalah:

$$\text{Asset} = \text{Restriksi Asset}$$

Unit akuntansi didefinisi dalam pengertian asset dan penggunaan asset yang telah dilakukan. Kewajiban menunjukkan serangkaian restriksi hukum dan ekonomi pada penggunaan asset. Sehingga teori dana berorientasi asset, terutama pada administrasi dan penggunaan asset secara memadai. Laporan sumber dan penggunaan dana bukan neraca atau laporan keuangan merupakan tujuan pelaporan keuangan. Teori dana terutama berguna untuk pemerintah dan organisasi nirlaba, rumah sakit, universitas, Unit kota, dan pemerintah. Selain itu juga relevan untuk organisasi berorientasi laba, yang menggunakan dana untuk aktivitas yang bermacam-macam seperti dana pelunasan (*sinking funds*).

Prinsip-Prinsip Akuntansi

Prinsip akuntansi adalah aturan keputusan umum, yang diturunkan baik dari tujuan dan konsep teoritis akuntansi, yang mengatur pengembangan teknik-teknik akuntansi. Untuk lebih memahami, berikut ini dikemukakan perangkat konsep-konsep dasar menurut beberapa sumber: Prinsip Akuntansi menurut Prinsip Akuntansi 1984, Kesatuan Akuntansi, Kesenambungan, Periode Akuntansi Pengukuran Dalam Nilai Uang, dan Harga Pertukaran.

Prinsip Akuntansi menurut APB Statement No.4 yaitu Kesatuan usaha sebagai focus akuntansi (*accounting entity*), Kontinuitas Usaha (*Going Concern*), Pengukuran aset dan Passiva unit Usaha (*measurement of economic resources and obligations*), Laporan berdasarkan periode

waktu (*Time Periode*), dan Pengukuran dalam satuan moneter (*measurement in term of money*), Asas himpun/akrual (*accrual*), Harga Pertukaran (jual beli) (*exchange price*), Angka/jumlah rupiah pendekatan (*Approximation*), Kebijaksanaan (*judgement*), Informasi Keuangan Umum (*General Purpose Finansial Information*), Laporan Keuangan Saling Berkaitan (*Fundamentally Related Financial Statements*), Mementingkan Substansi Daripada Bentuk luar/Yuridis (*Substance Over Form*), dan Materialitas (*Materiality*).

Konsep Dasar Menurut Paul Grady yaitu Pengakuan hak milik pribadi (*A Society and Government structure honoting private property right*), Kesatuan Usaha yang berdiri sendiri (*spesifik businee entities*), Kontinuitas Usaha (*Going Concern*), dan Satuan Uang.

Daftar Pustaka

- Belkaoui, Ahmed. 1993. *Accounting Theory*, 3rd ed. The Dryden Press.
- Hendriksen, Eldon S., dan Van Breda, Michael F., 2000, *Teori Akunting*, Edisi Kelima, Buku Satu, Alih Bahasa, Herman Wibowo, Penerbit: Interaksara.

Profil Penulis



Dr. Desak Nyoman Sri Werastuti, S.E., M.Si., Ak., CA.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu akuntansi dimulai pada tahun 1994 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk memilih jurusan IPS yang didalamnya dipelajari mengenai Akuntansi dan berhasil lulus pada tahun 1997. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Akuntansi pada tahun 2002. Penulis menyelesaikan studi S2 di prodi Akuntansi Universitas Udayana dan pada tahun 2015 melanjutkan studi di prodi Ilmu Akuntansi, Universitas Brawijaya.

Penulis memiliki kepakaran dibidang Akuntansi. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: sri.werastuti@undiksha.ac.id

STRUKTUR TEORI AKUNTANSI

Tatik Amani, S.E., M.Akun

Universitas Panca Marga

Pengertian

Struktur teori akuntansi merupakan keterkaitan antara beberapa elemen yang dijadikan pedoman untuk penyusunan standar dan pengembangan teori akuntansi (Harahap, 2008:65). Berikut gambaran yang menunjukkan struktur teori akuntansi yang meliputi beberapa elemen yaitu rumusan tentang:

1. Tujuan laporan keuangan yang berhubungan dengan para penggunanya.
2. Postulat akuntansi yang perumusannya berasal dari tujuan akan adanya laporan keuangan
3. Konsep teoritis akuntansi
4. Prinsip dasar akuntansi yang memberikan penjelasan tentang sifat serta kualitas dasar akuntansi keuangan.
5. Standar Akuntansi yang dipakai sebagai pedoman atau dasar penyusunan laporan keuangan

Berikut gambaran hierarkhinya:



Gambar 4.1 Elemen dari struktur teori akuntansi.

Tujuan Laporan Keuangan

Pembentukan struktur teori akuntansi diawali karena adanya tujuan pembuatan laporan keuangan. Ada berbagai macam pendapat dari tujuan dibuatnya laporan keuangan, baik berupa obyek maupun penekanannya, tetapi tujuan laporan keuangan secara umum menurut PSAK No 1 (2015:3) ialah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi..

Dari uraian tersebut tampak dengan jelas bahwasannya pembuatan laporan keuangan sangat penting karena tujuannya adalah sebagai alat atau bentuk komunikasi dalam bisnis yang tersusun dan tersaji untuk para pemakainya dalam pengambilan keputusan bisnis.

Postulat Akuntansi

Kata *postulatum* serta *postulare* adalah Bahasa Latin yang merupakan asal dari kata postulat yang artinya meminta serta menuntut. Postulat merupakan asumsi yang kebenarannya diakui dan tidak perlu pembuktian

berdasar kesesuaian dengan tujuan laporan keuangan yang menggambarkan lingkungan ekonomi, politik, sosiologi dan hukum (Belkaoui, 2000:171) Akuntansi adalah suatu sistim untuk mencatat keuangan secara seragam sesuai standar yang ditetapkan yang bertujuan untuk mempermudah pelaku serta pemakainya di manapun berada.

Postulat akuntansi merupakan berbagai pernyataan atau asumsi yang dibuat dan menjadi suatu kebenaran, dimana kebenaran itu harus dipakai sebagai dasar dan harus dipatuhi dalam penyusunan laporan keuangan. Postulat akuntansi ialah asumsi di bidang akuntansi dan berdasarkan praktek dalam sejarah. Postulat ini membentuk dasar yang berasal dari standar akuntansi yang mengatur perlakuan dan pencatatan akuntansi. Menurut Financial Accounting Standards Board (FASB) ada beberapa asumsi dasar dalam postulat akuntansi, yaitu:

1. Postulat Entitas (*entity*)

Menurut konsep ini akuntansi dalam melakukan pencatatan operasional atau hasil kegiatan suatu entitas baik lembaga maupun perusahaan dilakukan secara terpisah dan dibedakan dari pemilik ataupun entitas lain. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dibuat sesuai kebutuhan penggunaannya, sehingga tiap perusahaan merupakan akuntansi terpisah baik dari pemilik maupun entitas yang lain, sehingga objek yang dimasukkan ke laporan keuangan adalah transaksi sebuah perusahaan, lembaga atau *entity* yang terpisah dengan pribadi pemiliknya.

2. Postulat Kelangsungan Usaha (*Going Concern*)

Konsep dalam postulat ini beranggapan bahwa pelaksanaan operasi perusahaan terus dilaksanakan. Perusahaan dianggap terus exis dan terus beroperasi dalam jangka waktu panjang dan tidak terbatas, tidak akan ditutup atau likuidasi.

Postulat *going concern* membenarkan atas penilaian aset dengan *historical cost* juga *book value* bukan *current value*. Postulat ini dapat juga digunakan untuk memotivasi manajer untuk bersikap memandang jauh ke arah depan (*forward looking*), sehingga dengan pemahaman sikap tersebut diharapkan investorpun bersedia berinvestasi ke perusahaan jangka panjang agar investor mendapat *value added* dari hasil usaha perusahaan.

3. Postulat Unit Pengukuran (*unit of Measure*)

Penyebutan lainnya adalah *monetary unit postulat*. Konsep postulat ini menganggap setiap transaksi dalam operasional atau kegiatan wajib diukur menggunakan alat tukar yang sama berupa alat ukur moneter.

Ada dua keterbatasan akuntansi yang ditimbulkan oleh postulat unit moneter, yaitu:

- a. Pemberian informasi terbatas pada penjabaran dalam ukuran uang, tidak memberikan informasi nonmoneter, contoh jumlah, meter, kilogram dan lain-lain hingga muncul anggapan dalam postulat ini akuntansi hanya menyajikan informasi kuantitatif dan orientasi masa lalu. Informasi kualitatif dianggap nonakuntansi. Seiring perkembangan saat ini upaya-upaya para ahli terus dilakukan agar akuntansi keuangan mampu memberikan informasi aspek kualitatif dengan menggunakan instrumen laporannya.
- b. Unit moneter bersifat fluktuatif sebab bergantung kemampuan daya belinya (*purchasing power*). Adanya inflasi merupakan salah satu penyebab ketidakstabilan daya beli alat tukar (uang) sehingga informasi keuangan kurang relevansi dan muncullah akuntansi inflasi.

4. Postulat Periode Akuntansi (*Accounting Period*)

Salah satu postulat akuntansi adalah keberlangsungan usaha (*going concern*) yaitu perusahaan dalam waktu tidak terbatas atau jangka

panjang tetap ada, namun laporan secara periodik baik hasil usaha atau kinerja perusahaan maupun informasi posisi keuangan harus dibuat dan dilaporkan secara periodik. Panjangnya waktu periodik laporan keuangan dapat dibuat secara bervariasi. Laporan dapat disajikan secara bulanan, triwulan, semester ataupun tiap tahun, tergantung kebutuhan para pemakai.

Pelaporan secara periodik ini bermanfaat memberikan informasi kepada manajemen untuk pengambilan keputusan yang penting baik untuk keputusan jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu postulat periodik merupakan tanggapan atas kendala dari lingkungan pemakai yang menyatakan bahwa hasil kinerja dan posisi keuangan merupakan gambaran perubahan dari kesejahteraan entitas sudah seharusnya untuk diungkapkan atau dilaporkan secara periodik.

Penerapan konsep pada postulat periodik ini memakai konsep *accrual* dan *deferral* dengan menggunakan *cut of time*. *Accrual accounting* dan *cash accounting* dibedakan dalam konsep ini. Pencatatan *accrual* dan *deferral* dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan, contohnya istilah : biaya dibayar di muka, pendapatan belum diterima juga penyusutan. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran posisi keuangan serta hasil kinerja yang betul pada periode bersangkutan.

Konsep Teoritis Akuntansi

Konsep teori akuntansi adalah aksioma yang karena kesesuaiannya dapat diterima oleh umum sebagai penopang untuk mewujudkan tujuan dari laporan keuangan dengan gambaran- gambaran sifat akuntansi yang berperan dalam perekonomian bebas dengan ditandai adanya pengakuan kepemilikan pribadi. Konsep teori pada perumusan prinsip-prinsip dasar akuntansi adalah:

1. Teori Kepemilikan (*Proprietary Theory*)

Dalam teori kepemilikan, entitas hanya sebagai wakil pemilik, entitas hanyalah agen, Yang menjadi perhatian dalam pencatatan serta penyajian laporan keuangannya bukan entitas melainkan pemilik. Penentuan beserta analisis kekayaan bersih merupakan hak dari pemilik. Persamaan akuntansi dalam konsep teori ini adalah:

$$\text{Aktiva} - \text{Kewajiban} = \text{Ekuitas Pemilik}$$

2. Teori Entitas (*Entity Theory*)

Dalam konsep ini entitas adalah suatu badan yang harus dibedakan dan terpisah dari pemilik. Penyajian laporan keuangan yang berasal dari pencatatan akuntansi dipusatkan perhatiannya pada entitas (perusahaan), bukan pada pemilik. Persamaan akuntansi dalam konsep teori adalah:

$$\text{Aktiva} = \text{Ekuitas}$$

$$\text{Aktiva} = \text{Kewajiban} + \text{Ekuitas Pemegang Saham}$$

3. Teori Dana (*Fund Theory*)

Pusat perhatian catatan dan pembuatan laporan keuangan pada konsep teori dana adalah kelompok aktiva bukan pada pemilik ataupun entitas. Kelompok aktiva yang menjadi pusat perhatian pemakaiannya sudah dibatasi dengan membayar atau menyelesaikan sebesar kewajiban yang tertentu. Konsep pada teori ini beranggapan bahwa suatu entitas adalah unit dana. Persamaan teori dalam akuntansi dana sebagai berikut:

$$\text{Aktiva} = \text{Pembatasan Aktiva}$$

4. Teori Badan Usaha (*The Enterprise Theory*)

Pusat perhatian pada teori badan usaha ialah semua pihak yang mempunyai hubungan atau terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan. Dalam teori ini, informasi akuntansi seharusnya tidak hanya mementingkan pemilik perusahaan, tetapi pemakai lainnya seperti manajemen, pemerintah, masyarakat, kreditor, pegawai harus mendapat perhatian juga.

5. Teori Ekuitas Residual (*Residual Equity Theory*)

Pemegang saham pada pandangan teori ini adalah mereka memiliki ekuitas dalam perusahaan seperti halnya dengan pemegang saham ekuitas yang lain tetapi tidak dianggap pemilik perusahaan. Dalam teori ini hasil perubahan atas penilaian aktiva, laba ditahan, laba bersih serta perubahan hak pada pemegang ekuitas yang lainnya tercermin pada *residual equity* pada pemegang saham biasa. Konsep pada teori ini adalah merupakan pandangan antara teori entitas dan proprietary dengan persamaan akuntansi sebagai berikut:

$$\text{Aktiva} - \text{Ekuitas Khusus} = \text{Ekuitas Residual}$$

6. Teori Pengendali (*Commander Theory*)

Pengendali sama dengan manajemen, dimana dalam melaksanakan tugasnya manajemen membutuhkan informasi untuk melaksanakan fungsi merencanakan dan mengendalikan perusahaan sesuai keinginan pemilik. Pusat perhatian teori pengendali adalah mereka yang berwenang melaksanakan kontrol

terhadap pengembangan suatu lembaga. Teori ini menekankan pada pertanggungjawaban dalam pengelolaan kekayaan atas apa yang diamanahkan kepadanya.

7. *Investor Theory*

Konsep pada teori ini mirip dengan konsep *residual equity theory*, perbedaannya jika *residual equity theory* pusat perhatiannya hanya terletak di investor saham biasa, sedangkan pada *investor theory* pusat perhatiannya pada kreditur, investor saham biasa dan investor saham preferen. Perhatian pada teori ini adalah para investor atau kreditur (*specific equities*) yang merupakan pemilik dan pemegang saham (*residual equities*). Penyajian laporan arus kas sangat penting peranannya dalam teori ini karena untuk pemenuhan kebutuhan informasi para kreditur serta investor untuk proses pengambilan keputusan. Persamaan akuntansi pada teori ini :

$$\text{Asset} = \text{Specific Equitas} + \text{Residual Equities}$$

Prinsip Dasar Akuntansi

Prinsip akuntansi merupakan pedoman atau ketentuan yang telah diputuskan dan disepakati umum sebagai dasar untuk penetapan teknik akuntansi yang berlandaskan tujuan serta konsep teoritis akuntansi. Ada dua asumsi dasar yang diberikan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia yaitu :

1. Dasar akrual

artinya pengakuan seluruh kejadian atau transaksi untuk penyusunan laporan keuangan didasarkan pada setiap peristiwa bukan berdasar transaksi keluar masuknya uang.

2. Kelangsungan usaha

artinya dalam penyusunan laporan keuangan berdasar atas asumsi usaha yang dilakukan entitas usaha akan terus berlanjut.

Prinsip dasar akuntansi yang berlaku di Indoneisa adalah:

1. Prinsip entitas ekonomi

Prinsip ini diartikan sebagai sebuah konsep kesatuan dalam usaha, artinya perusahaan dianggap oleh akuntansi sebagai sebuah kesatuan ekonomi, terpisah dari pemilik dan entitas lain, artinya berdiri sendiri. Pencatatan transaksi perusahaan oleh akuntansi dibedakan dengan pemilik baik catatan kekayaan maupun kewajibannya.

2. Prinsip periode akuntansi

Pada prinsip ini penilaian maupun pelaporan keuangan dibatasi periode tertentu.

3. Prinsip satuan moneter

Pencatatan transaksi prinsip satuan moneter terbatas hanya atas segala sesuatu yang terukur dan penilaiannya memakai satuan uang.

4. Prinsip kesinambungan usaha

Anggapan pada prinsip ini adalah perusahaan atau entitas bisnis akan melakukan operasional perusahaan terus menerus tidak ada penghentian atau pembubaran kecuali ada peristiwa khusus yang dapat menyanggahnya.

5. Prinsip biaya historis

Prinsip ini mengharuskan seluruh pencatatan barang berdasar harga perolehannya yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut.

6. Prinsip pengungkapan penuh

Informasi yang informatif dalam laporan keuangan pada prinsip ini harus terungkap secara penuh. Jika ada informasi dalam laporan keuangan tidak dapat disajikan maka harus diberi penjelasan atau

keterangan dalam bentuk catatan kaki atau disajikan pada lampiran.

7. Prinsip pengakuan pendapatan

Pendapatan dalam prinsip ini akan diakui setelah ada kepastian jumlah yang dapat diukur secara tepat berdasar harta yang perolehannya dari kegiatan usaha.

8. Prinsip mempertemukan

Pada prinsip ini penentuan besarnya laba bersih pada tiap periode adalah dengan mempertemukan biaya usaha dengan pendapatan.

9. Prinsip Konsistensi

Adalah prinsip yang tetap dan dipakai secara konsisten dalam pelaporan keuangan entitas agar laporan dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya sehingga dapat memberikan manfaat lebih kepada pemakainya.

10. Prinsip materialitas

.Adanya kenyataan yang tidak sesuai dengan tujuan prinsip akuntansi yang bertujuan menyeragamkan semua aturan sehingga menyebabkan terjadinya informasi bersifat material atau immaterial.

Sedangkan prinsip dasar akuntansi menurut Accounting Principles Board Statement 4 adalah :

1. *Cost principles*

Istilah lain dari *The cost principles* adalah *historical cost* merupakan dasar yang tepat dipakai untuk menilai dan mencatat perolehan suatu barang, artinya seluruh perkiraan dinilai pada tanggal perolehan berdasar harga pertukaran.

2. *Revenue principles*

Pada prinsip ini pendapatan laba bersih usaha berasal dari adanya transaksi pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian. Menurut FASB dua kriteria

untuk dipertimbangkan pada waktu penentuan pengakuan pendapatan adalah :

- a. Saat pendapatan dapat direalisasi
- b. Saat pendapatan telah dihasilkan

3. *Matching principles*

Konsep akuntansi dalam *matching principles* adalah konsep yang mendukung pelaporan pendapatan serta beban terkait pada periode yang bersamaan.

4. *Objectivity principles*

Prinsip *Objectivity principles* terkait dengan penilaian atas harga perolehan suatu barang. Para pengguna laporan keuangan cenderung memilih penilaian berdasarkan historisnya. Hal ini dinilai oleh pemakai laporan lebih dapat dipercaya atau lebih objektif.

5. *Consistency principles*

Menurut prinsip *consistency principles* pencatatan transaksi sejenis harus dicatat dengan metode yang sama juga pada periode berikutnya dengan tujuan agar laporan keuangan dapat mempunyai daya banding. Jika terpaksa metode harus dirubah maka sifat pengaruh dan alasan perubahannya harus diungkapkan di laporan keuangan saat periode terjadinya perubahan.

6. *Disclosure principles*

Prinsip *Disclosure principles* adalah sebuah prinsip yang menekankan penyajian seluruh informasi relevan pada laporan keuangan seharusnya dilakukan.

7. *The conservatism principles*

Merupakan prinsip kehati-hatian terhadap ketidakpastian. Prinsip ini secara historis menjadi pedoman para praktisi akuntansi karena konservatisme memberikan pedoman yang rasional.

8. *Materiality principles*

Dalam prinsip ini material berhubungan dengan pengaruh suatu item pada laporan keuangan. Akuntan dalam prinsip ini memungkinkan untuk memakai pertimbangan profesionalnya apakah item suatu barang material atau tidak.

9. *Uniformity dan comparability principles*

Pada prinsip ini informasi akan lebih bermanfaat jika bisa dibandingkan dengan informasi yang serupa dengan perusahaan lain, baik pada periode yang sama atau berbeda. Komparabilitas memungkinkan para pemakai melakukan identifikasi baik persamaan maupun perbedaan yang nyata pada peristiwa ekonomi.

Standar Akuntansi

Manajemen dalam menyusun laporan keuangan harus berpedoman pada aturan yang terdapat di pernyataan standar akuntansi keuangan agar laporan bersifat transparansi dan tidak menyesatkan. Menurut FASB standar akuntansi “metode yang seragam untuk menyajikan informasi, sehingga laporan keuangan dari berbagai perusahaan yang berbeda dapat dibandingkan dengan lebih mudah kumpulan konsep, standar, prosedur, metode, konvensi, kebiasaan dan praktik yang dipilih dan dianggap berterima umum.”

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa standar akuntansi merupakan pedoman umum untuk menyusun laporan keuangan berupa aturan-aturan umum dan bersifat praktis sehingga standar akuntansi penting sifatnya, ialah :

1. Memberikan informasi akuntansi kepada para pemangku kepentingan atas posisi keuangan, laporan kinerja dan hal lainnya yang berhubungan dengan perusahaan.
2. Sebagai aturan dan pedoman bagi auditor atau akuntan publik dalam menjalankan kegiatan audit

- serta menguji validitas terhadap laporan keuangan.
3. Memberikan data dasar kepada pemerintah tentang berbagai variabel penting untuk dasar pengenaan pajak, pembuatan peraturan atau regulasi, perencanaan serta peningkatan efisiensi ekonomi dan tujuan makro lainnya.
 4. Penghasil prinsip dan teori dari para ahli pada bidang disiplin akuntansi

Daftar Pustaka

- Belkaouli, A. 2000 *Teori Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fanani Achmad, 2009 "Kamus Istilah Populer", Jogja, Ar Ruzz Media, cetakan 1
- Harahap, Sofyan Syafri. 2008 *Teori Akuntansi*. Jakarta : Rajawali Pers
- Hery, 2009. *Teori Akuntansi*, Jakarta: Prenada Media Group
- Ikhsan, Arfan, 2017 *Teori Akuntansi*. Medan : MADENATERA
- <https://accounting.binus.ac.id/2017/06/14/prinsip-dasar-akuntansi-menurut-apb-statement-4/> diakses tanggal 14 Desember 2021
- <https://www.jurnal.id/id/blog/2017-10-prinsip-akuntansi-yang-perlu-anda-ketahui/> diakses tanggal tgl 14 des 2021
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tahun 2015
- Samryn, 2014 *Pengantar Akuntansi*, Jakarta: Rajawali Pers

Profil Penulis



Tatik Amani, S.E., M.Akun

Terlahir di Ponorogo Propinsi Jawa Timur tepatnya tanggal 19 November 1968. Kecintaannya pada akuntansi tidak diragukan lagi, dibuktikan dengan pendidikan dan karirnya. Pendidikan akuntansi penulis tempuh mulai di SMK Negeri Ponorogo, S1 di Universitas Panca Marga dan S2 di Universitas Jember pada prodi akuntansi. Saat ini penulis sebagai dosen tetap di Universitas Panca Marga prodi akuntansi.

Penulis aktif melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, selain mengajar penulis juga aktif sebagai peneliti di bidang akuntansi. Beberapa artikel penelitiannya telah diterbitkan di Jurnal Nasional maupun Internasional. Beberapa artikel ilmiah hasil penelitiannya juga telah penulis presentasikan dalam seminar nasional maupun internasional. Diantara penelitian yang penulis lakukan mendapatkan hibah dan didanai Kemenristek Dikti yaitu pada tahun 2019 dan tahun 2020. Pengabdian masyarakat terus dilakukan baik bersama dosen maupun mahasiswa. Keterlibatan penulis pada program Kuliah Kerja Nyata mahasiswa yang langsung terjun di tengah masyarakat baik sebagai panitia maupun pendamping lapangan merupakan wujud salah satu tri dharmanya. Penulisan buku ini merupakan kelanjutan keinginan penulis untuk memberikan kontribusi positif dalam pengembangan Ilmu Akuntansi.

Email Penulis : tatikamani@upm.ac.id

TEORI AKUNTANSI DAN PERUMUSANNYA

Putu Ayu Anggya Agustina, S.E., M.Si., Ak

Universitas Terbuka

Teori dan Praktik Akuntansi

Berbagai hal telah dilakukan para ahli untuk mendefinisikan akuntansi, sehingga menghasilkan pengertian yang sederhana tentang akuntansi adalah apa yang dapat diperoleh setelah menjadi akuntan. American Institute of Certified Public Accountant (1953) menyebutkan bahwa akuntansi merupakan seni mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas transaksi atau peristiwa yang dilakukan sedemikian rupa dalam bentuk uang atau paling tidak memiliki sifat keuangan dan dapat menginterpretasikan hasilnya.

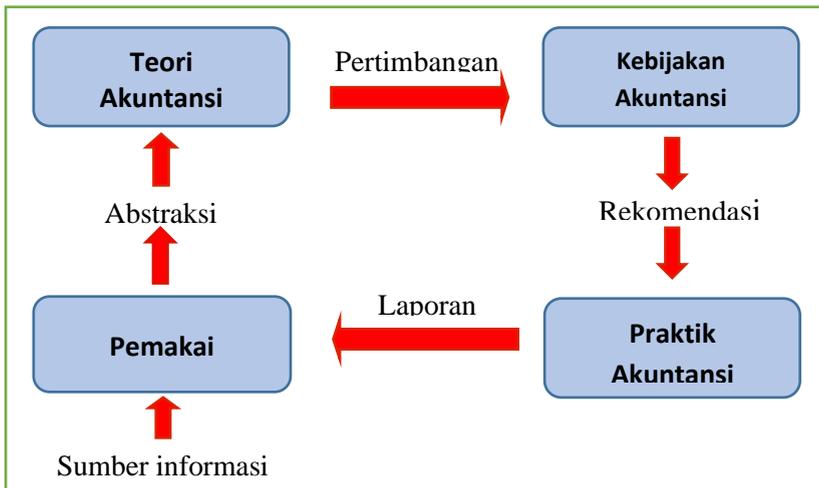
Pendekatan lain untuk mendefinisikan akuntansi adalah pendekatan yang melihat bahwa akuntansi adalah proses komunikasi. American Accounting Association (1966) mendefinisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur dan mengkomunikasikan informasi untuk membantu pemakai dalam membuat keputusan atau pertimbangan yang benar.

Kemudian pada tahun 1970, diajukan definisi yang melihat akuntansi sebagai kegiatan jasa. Accounting Principles Board dalam *Statement No.4* (1970) menyatakan bahwa akuntansi adalah kegiatan jasa. Fungsinya adalah untuk memberikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang

entitas ekonomi, yang diharapkan bermanfaat bagi pengambilan keputusan ekonomi.

Dari tiga definisi tersebut dapat menunjukkan bahwa pada dasarnya akuntansi dirancang untuk memenuhi kebutuhan praktisnya. Perumusan teori akuntansi timbul karena adanya kebutuhan untuk memberikan logika penalaran tentang apa yang dilakukan oleh akuntan atau apa yang akan dilakukan oleh akuntan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teori memainkan peranan penting dalam perumusan teori akuntansi. Hendriksen (1982) menawarkan definisi teori yaitu seperangkat prinsip-prinsip yang saling terkait (*coherent*), yang bersifat hipotesis, konseptual dan pragmatis, yang membentuk rerangka referensi umum untuk dibidang pengetahuan tertentu (*a field of inquiry*).

Atas dasar pengertian tersebut, Hendriksen mendefinisikan teori akuntansi yaitu: penalaran logis dalam bentuk seperangkat prinsip-prinsip yang luas (*a set of broad principles*) yang memberikan rerangka referensi umum untuk mengevaluasi praktik akuntansi dan memberikan pedoman dalam mengembangkan praktik dan prosedur akuntansi yang baru. Hubungan antara teori akuntansi dan praktik akuntansi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3.1 Hubungan Teori Dan Praktik Akuntansi

Dari tampilan tersebut dapat dilihat bahwa peranan teori dalam akuntansi sangat berbeda dengan peranan teori yang digunakan dalam ilmu pasti (*natural science*), dimana dalam ilmu pasti teori dikembangkan dari hasil observasi empiris. Akuntansi cenderung dikembangkan atas dasar pertimbangan nilai (*value judgment*), yang dipengaruhi faktor lingkungan tempat akuntansi dipraktikkan. Teori tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk kebijakan sebagai landasan dalam praktik akuntansi. Dalam akuntansi, praktik dapat saja diubah untuk mengakomodasikan teori.

Konsep akuntansi tidak didasarkan pada kebenaran yang sifatnya universal. Konsep akuntansi mengakar pada sistem nilai masyarakat dimana akuntansi dipraktikkan. Preskripsi akuntansi dikembangkan untuk memecahkan masalah-masalah khusus, teori yang mendasarinya juga dikembangkan berdasarkan model-model yang khusus. Secara umum fungsi utama dari teori akuntansi adalah untuk memberikan kerangka pengembangan ide-ide baru dan membantu proses pemilihan akuntansi (Mathew and Perera, 1993). Lebih lanjut bahwa teori memiliki karakteristik sebagai berikut: a) memiliki *body of knowledge*; b) konsisten secara internal; c) menjelaskan dan/atau memprediksi fenomena; d) menyajikan hal-hal yang ideal; e) referen yang ideal untuk mengarahkan praktik; dan e) membahas masalah dan memberikan solusi.

Klasifikasi Perumusan Teori Akuntansi

Teori akuntansi dapat dirumuskan berdasarkan sudut pandang yang berbeda. Secara garis besar teori akuntansi dapat diklasifikasikan berdasarkan metode penalaran yang digunakan, sistem bahasa yang digunakan dan tujuan perumusan.

Klasifikasi Teori Akuntansi Menurut Metode Penalaran

Atas dasar metode penalaran yang digunakan, teori akuntansi dapat dirumuskan dari berbagai pendekatan yang berbeda, yaitu

1. Pendekatan Deduktif

Perumusan teori akuntansi yang didasarkan pada pendekatan deduktif, dimulai dari proposisi akuntansi dasar sampai dihasilkan prinsip akuntansi yang rasional sebagai pedoman dan dasar untuk mengembangkan teknik-teknik akuntansi. Secara umum, langkah yang digunakan dalam merumuskan teori akuntansi adalah sebagai berikut: (a) menentukan tujuan pelaporan keuangan; (b) memilih postulate akuntansi yang sesuai dengan kondisi ekonomi, politik dan sosiologi, (c) menentukan prinsip akuntansi; serta (e) mengembangkan teknik akuntansi (Belkaoui, 1993).

Penentuan tujuan pelaporan keuangan merupakan hal yang paling penting karena tujuan yang berbeda mungkin memerlukan struktur yang berbeda dan akan menghasilkan prinsip yang berbeda pula. Apabila tujuan telah ditetapkan, beberapa definisi dan asumsi dapat dibuat. Peneliti kemudian mengembangkan logika yang terstruktur untuk mencapai tujuan tersebut, berdasarkan definisi dan asumsi yang dibuat.

Keuntungan pendekatan deduktif adalah kemampuan untuk merumuskan struktur teori yang konsisten, terkoordinasi, lengkap dan setiap tahapan berjalan secara logis. Dengan cara demikian, konsistensi internal (*internal consistency*) antar preposisi dapat tercapai. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa setiap prinsip dapat diuji logika kebenarannya dan dapat digunakan untuk menentukan apakah digunakan sebagai standar dalam mengevaluasi berbagai praktik akuntansi (Hermanson dan Salmonson, 1969).

Kelemahan pendekatan deduktif didasarkan pada postulat dan tujuan tertentu yang kemungkinan salah. Apabila hal ini terjadi, otomatis prinsip yang dihasilkan juga salah. Di samping itu, pendekatan deduktif juga terbukti sering menghasilkan prinsip yang terlalu teoritis sehingga tidak dapat diterapkan

dalam praktik. Implikasinya, pendekatan ini kurang teruji dalam praktik.

2. Pendekatan Induktif

Pendekatan induktif didasarkan pada konklusi yang digeneralisasikan berdasarkan hasil observasi dan pengukuran yang terinci. Littleton (1953) bahwa prinsip akuntansi dapat dihasilkan secara induktif dengan melakukan pengujian empiris terhadap kegiatan akuntansi. Hal ini didukung (Moonitz) mengatakan bahwa observasi terhadap data akuntansi kelihatan lebih tepat dengan pendekatan induktif. Pendapat ini juga didukung oleh Schrder (1962:645) yang menyatakan bahwa perumusan teori akuntansi dapat dilakukan secara induktif dengan cara mengobservasi data keuangan yang dihasilkan dari transaksi bisnis.

Kesimpulan untuk proses tersebut adalah proses induktif melibatkan kegiatan observasi mengenai data keuangan yang berkaitan dengan berbagai unit usaha. Dari hasil observasi tersebut, kemudian dilakukan generalisasi dan dirumuskan prinsip-prinsip akuntansi sesuai hubungan yang ada. Langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: (a) mencatat semua observasi; (b) menganalisis dan mengklasifikasikan hasil observasi, sehingga dapat dirumuskan berbagai kesamaan dan ketidaksamaan; (c) hasil observasi kemudian digeneralisasi; serta (d) pengujian terhadap generalisasi (Belkaoui, 1993).

Keuntungan utama pendekatan induktif adalah bahwa pendekatan ini didasarkan pada kebebasan dimana perumusan teori akuntansi tidak dibatasi oleh struktur atau model yang telah diyakini atau disiapkan sebelumnya. Jadi pihak yang mengobservasi memiliki kebebasan untuk mengamati variabel tertentu selama hal tersebut relevan dengan tujuan yang akan dicapai.

Kelemahannya yaitu: (1) observer dipengaruhi oleh ide-ide yang tidak disadari tentang jenis hubungan yang diamati (unsur bias); dan (2) generalisasi data

yang digunakan dalam observasi cenderung berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Konsekuensinya, kesimpulan yang dibuat dari hasil generalisasi kemungkinan besar salah hanya karena data yang pening justru tidak diobservasi.

3. Pendekatan Etika

Pendekatan etika didasarkan pada konsep kebenaran (*truth*), keadilan (*justice*) dan kewajaran/kejujuran (*fairness*). Pertimbangan etika menjadi makin penting pada saat sekarang. Scott (1943) mengatakan bahwa prinsip akuntansi adalah pernyataan umum yang menghubungkan aturan (pedoman) dan prosedur akuntansi dengan konsep sosial tersebut.

4. Pendekatan Sosiologi

Pendekatan ini menekankan pada pengaruh sosial yang timbul dari teknik-teknik akuntansi terhadap kesejahteraan sosial dan lingkungan tempat akuntansi akan dioperasikan. Oleh karena itu, nilai-nilai sosial dianggap sebagai kriteria utama dalam merumuskan akuntansi.

5. Pendekatan Ekonomi

Pendekatan ekonomi memusatkan perhatiannya pada pengendalian terhadap perilaku indikator makro ekonomi sebagai akibat adopsi berbagai teknik akuntansi. Jadi, teknik akuntansi yang dikembangkan harus dapat mempengaruhi kesejahteraan ekonomi.

6. Pendekatan Eklektik

Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan akuntansi dengan cara menggabungkan berbagai pendekatan yang digunakan selama ini.

Klasifikasi Berdasarkan Sistem Bahasa

Teori dapat diekspresikan dalam wujud kata atau tanda (*sign*). Dalam filsafat pengetahuan, studi tentang tanda dikenal dengan istilah semiologi. Semiologi dibagi menjadi tiga bagian, sintaktik (*syntactics*), semantik (*semantics*), dan pragmatik (*pragmatics or behavioral*).

1. Teori Sintaktik

Teori sintaktik berusaha untuk menjelaskan praktik akuntansi dan memprediksi bagaimana akuntan akan bereaksi pada situasi tertentu atau bagaimana akuntan melaporkan peristiwa tertentu. Dengan demikian teori ini berkaitan dengan struktur proses pengumpulan data dan pelaporan keuangan. Interpretasi teori akuntansi atas dasar sintaktis, yaitu input *semantic* terhadap sistem tersebut adalah transaksi dan pertukaran yang dicatat dalam jurnal dan buku besar perusahaan. Transaksi tersebut kemudian dimanipulasi (dibagi dan dijumlah) atas dasar alasan dan asumsi-asumsi akuntansi biaya historis.

2. Teori Semantik

Teori semantik berkaitan dengan penjelasan mengenai fenomena (objek atau peristiwa) dan istilah atau symbol yang mewakilinya. Jadi teori ini memberikan penjelasan mengenai operasional dari praktik akuntansi. Struktur akuntansi, meskipun dapat dirumuskan secara logis, tidak akan berarti sama sekali apabila simbol atau istilah yang menggambarkan peristiwa atau pengukuran tidak berkaitan secara empiris dengan fenomena dunia maya. Oleh karena itulah, teori yang berkaitan dengan interpretasi (semantik) diperlukan untuk memberikan arti bagi proposisi akuntansi.

3. Teori Pragmatik

Teori ini berusaha menjelaskan pengaruh informasi akuntansi terhadap perilaku pengambilan keputusan. Jadi teori pragmatik dimaksudkan untuk mengukur dan mengevaluasi pengaruh ekonomi, psikologi dan sosiologi pemakai terhadap alternatif prosedur akuntansi dan media pelaporannya.

Klasifikasi Berdasarkan Tujuan

Atas dasar tujuannya, teori akuntansi dapat dibedakan menjadi dua jenis. Dua jenis tersebut yaitu:

1. Teori Normatif (Preskriptif)

Teori akuntansi normatif disebut juga teori preskriptif, yang mencoba menjawab pertanyaan “apa yang semestinya”. Disini akuntansi dianggap sebagai norma peraturan yang harus diikuti tidak peduli apakah berlaku atau dipraktikkan sekarang atau tidak. Teori normatif berusaha untuk membenarkan tentang apa yang seharusnya dipraktikkan, misalnya pernyataan yang menyebutkan bahwa laporan keuangan seharusnya didasarkan pada metode pengukuran aktiva tertentu. Menurut Nelson (1973) dalam literature akuntansi teori normatif sering dinamakan teori apriori (artinya dari sebab ke akibat atau bersifat deduktif). Alasannya teori normatif bukan dihasilkandari penelitian empiris, tetapi dihasilkan dari kegiatan *semi-research*. Teori normatif hanya menyebutkan hipotesis tentang bagaimana akuntansi seharusnya dipraktikkan tanpa menguji hipotesis tersebut. Pada awal perkembangannya, teori akuntansi normatif belum menggunakan pendekatan investigasi, dan cenderung disusun untuk menghasilkan postulat akuntansi.

Perumusan akuntansi normatif mencapai masa keemasan pada tahun 1950 dan 1960an. Selama periode ini perumus akuntansi lebih tertarik pada rekomendasi kebijakan dan apa yang seharusnya dilakukan, bukan apa yang sekarang dipraktikkan. Pada periode tersebut, teori normatif lebih berkonsentrasi pada:

- a. Penciptaan laba sesungguhnya (*true income*)
- b. Pengambilan keputusan (*decision usefulness*)

Pendekatan ini menganggap bahwa tujuan dasar dari akuntansi adalah untuk membantu proses pengambilan keputusan dengan cara menyediakan data akuntansi yang relevan atau bermanfaat.

Pada kebanyakan kasus, teori ini didasarkan pada konsep ekonomi klasik tentang laba dan kemakmuran (*wealth*) atau konsep ekonomi pengambilan

keputusan rasional. Biasanya konsep tersebut didasarkan juga pada penyesuaian rekening karena pengaruh inflasi atau nilai pasar dari aktiva. Teori ini pada dasarnya merupakan teori pengukuran akuntansi. Teori tersebut bersifat normatif karena didasarkan pada anggapan:

- a. Akuntansi seharusnya merupakan sistem pengukuran
- b. Laba dan nilai dapat diukur secara tepat
- c. Akuntansi keuangan bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi
- d. Pasar tidak efisien (dalam pengertian ekonomi)
- e. Ada beberapa pengukur laba yang unik.

2. Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif berkembang seiring kebutuhan untuk menjelaskan dan memprediksi realitas praktik akuntansi yang ada di dalam masyarakat. Teori akuntansi positif berusaha untuk menjelaskan fenomena akuntansi yang diamati berdasarkan pada alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa. Dengan kata lain, *Positive Accounting Theory* (PAT) dimaksudkan untuk menjelaskan dan memprediksi konsekuensi yang terjadi jika manajer menentukan pilihan tertentu. Penjelasan dan prediksi dalam PAT didasarkan pada proses kontrak (*contracting process*) atau hubungan keagenan (*agency relationship*) antara manajer dengan kelompok lain seperti investor, kreditor, auditor, pihak pengelola pasar modal dan institusi pemerintah (Watts dan Zimmerman, 1990).

PAT lebih bersifat deskriptif bukan preskriptif. Tidak seperti teori normatif yang didasarkan pada premis bahwa manajer akan memaksimalkan laba atau kemakmuran untuk kepentingan perusahaan, teori positif didasarkan pada premis bahwa individu selalu bertindak atas dasar motivasi pribadi (*self seeking motives*) dan berusaha memaksimalkan keuntungan

pribadi. Watts dan Zimmerman berpendapat bahwa premis maksimisasi laba dalam konteks teori normatif tidak terbukti dan jauh dari bukti empiris.

Kritik utama terhadap teori normatif adalah teori tersebut didasarkan pada pertimbangan nilai (*value judgment*). Watts dan Zimmerman (1990) berpendapat bahwa perumusan teori harus betul bebas dalam mempertimbangan nilai dan menekankan pada kebutuhan akan penekatan baru. Tujuan dari teori akuntansi positif adalah untuk menjelaskan (*to explain*) dan memprediksikan (*to predict*) praktik akuntansi. Penjelasan ini berarti memberikan alasan-alasan terhadap praktik yang diamati. Misalnya, teori akuntansi positif berusaha menjelaskan mengapa perusahaan tetap menggunakan akuntansi biaya historis dan mengapa perusahaan tertentu mengubah taktik akuntansi akuntan. Prediksi terhadap praktik akuntansi berarti teori berusaha memprediksi fenomena yang belum diamati. Hal ini juga menjelaskan bahwa teori, sebagaimana yang dapat digambarkan menghasilkan preskripsi untuk praktik akuntansi tetapi berkaitan dengan penjelasan terhadap praktik akuntansi.

Pendekatan positif atau empiris berkaitan dengan usaha menguji atau menghubungkan kembali hipotesis atau teori dengan pengalaman atau fakta-fakta dunia nyata. Penelitian akuntansi positif difokuskan pada pengujian empiris terhadap asumsi-asumsi yang dibuat oleh teori akuntansi normatif. Misalnya dengan menggunakan kuesioner dan teknik survei lainnya, peneliti akan menguji sikap manajer terhadap manfaat metode atau teknik akuntansi tertentu. Pendekatan khusus dapat dilakukan dengan cara mensurvei pendapat analisis keuangan, manajer bank atau akuntan terhadap tugas atau kasus tertentu yang dibuat peneliti (misalnya prediksi kebangkrutan, keputusan membeli atau menjual saham, dan lain-lain).

Pendekatan lain yang dapat digunakan adalah dengan menguji arti penting output akuntansi di pasar.

Dengan demikian teori akuntansi positif memiliki focus ekonomi dan berusaha menjawab pernyataan seperti:

- a. Apakah biaya yang dikeluarkan untuk memilih metode akuntansi sesuai dengan manfaat yang diperoleh?
- b. Apakah biaya regulasi dan proses penentuan standar akuntansi sesuai dengan manfaatnya?
- c. Apakah laporan keuangan berpengaruh terhadap saham?

Untuk menjawab pernyataan tersebut teori akuntansi positif menggunakan asumsi sebagai berikut:

- a. Manajer, investor, kreditor, dan individu lain bersifat rasional dan berusaha memaksimalkan kepuasan.
- b. Manajer memiliki kebebasan untuk memilih metode akuntansi yang memaksimalkan kepuasan atau mengubah kebijakan produksi, investasi dan pendanaan perusahaan untuk memaksimalkan kepuasan.
- c. Manajer mengambil tindakan yang memaksimalkan nilai perusahaan.

Atas dasar pernyataan dan asumsi tersebut teori akuntansi positif berusaha menguji tiga hipotesis sebagai berikut:

- a. Hipotesis Rencana Bonus (*Bonus Plan Hypothesis*)

Manajer perusahaan dengan bonus tertentu cenderung lebih menyukai metode yang meningkatkan laba periode berjalan. Pilihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai sekarang bonus yang akan diterima seandainya komite kompensasi dari dewan direktur tidak menyesuaikan dengan metode yang dipilih (Watts dan Zimmerman, 1990).

- b. Hipotesis utang atau ekuitas (*Debt/Equity Hypothesis*)
-

Hipotesis ini mengartikan bahwa tinggi rasio utang atau ekuitas perusahaan makin besar kemungkinan bagi manajer untuk memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba. Makin tinggi rasio utang atau ekuitas makin dekat perusahaan dengan batas perjanjian atau peraturan kredit (Kalay, 1982). Makin tinggi batasan kredit makin besar kemungkinan penyimpangan perjanjian kredit dan pengeluaran biaya. Manajer akan memiliki metode akuntansi yang dapat menaikkan laba sehingga dapat mengendurkan batasan kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis (Watts dan Zimmerman, 1990). Adapun penelitian oleh Agustina (2017) yang menggunakan pendekatan ini sebagai teori untuk meneliti nilai perusahaan yang menggunakan kebijakan utang sebagai variabel bebas.

c. Hipotesis Biaya Politik (*Political Cost Hypothesis*)

Perusahaan besar cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat mengurangi laba periodik dibanding perusahaan kecil. Ukuran perusahaan merupakan ukuran variabel proksi dan aspek politik. Yang mendasari hipotesis ini adalah asumsi bahwa sangat mahalnya nilai informasi bagi individu untuk menentukan apakah laba akuntansi betul-betul menunjukkan monopoli laba. Di samping itu, sangatlah mahal bagi individu untuk melaksanakan kontrak dengan pihak lain dalam proses politik dalam rangka menegakkan aturan hukum dan regulasi, yang dapat meningkatkan kesejahteraan individu tersebut. Proses politik tidak beda jauh dengan proses pasar. Atas dasar biaya informasi dan *cost monitoring* tersebut, manajer memiliki insentif untuk memiliki laba akuntansi tertentu dalam proses politik tersebut (Watts dan Zimmerman, 1990). Tiga hipotesis di atas menunjukkan bahwa Teori Akuntansi Positif mengakui adanya tiga hubungan keagenan:

- a. Manajemen dengan pemilik
- b. Manajemen dengan kreditor
- c. Manajemen dengan pemerintah

Pada saat sekarang teori positif menekankan pada penjelasan alasan-alasan terhadap praktik berjalan dan prediksi terhadap peranan akuntansi dan informasi terkait dalam kepuasan-kepuasan ekonomi individu, perusahaan, dan pihak yang lain yang berperan dalam kegiatan pasar modal dan ekonomi. Meskipun demikian, asumsi yang melandasi proyek penelitian positif tersebut banyak dikritik karena pendukung teori positif menggunakan penolakan alternative alias pemikiran yang lain. Artinya, teori positif tidak bebas dari pertimbangan nilai atau implikasi preskriptif. Hal ini disebabkan pertimbangan nilai yang bersifat implisit seringkali melandasi atau mempengaruhi bentuk dan isi penelitian yang dilakukan. Peneliti tidak dapat menghindari unsur bias dalam semua penelitian yang dilakukan. Dengan demikian unsur bias, jelas menunjukkan perwujudan orientasi dari peneliti tersebut.

Daftar Pustaka

- Agustina, Putu Ayu Anggya. (2016). Pengaruh Kebijakan Utang pada Nilai Perusahaan dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, 12 (3), h:173-185.
- Hermanson, E. dan Salmonson. (1989). *Accounting Principles (4th edition)*. Homewood, Boston: Richard D. Irwin Inc.
- Kalay, Avner. (1982). Shareholder-Bondholder Conflict and Dividend Constraint. *Journal of Financial Economics*, 10, 211-233.
- Watts, R. L., dan Zimmerman, J.L. (1990). Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective. *American Accounting Association*, 131-156.

Profil Penulis



Putu Ayu Anggya Agustina, S.E., M.Si., Ak

Ketertarikan penulis terhadap Akuntansi Manajemen dimulai pada tahun 2013. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk kuliah ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana selama tiga setengah tahun dan melanjutkan studi S2 di kampus yang sama dengan memilih Jurusan Akuntansi dan berhasil lulus pada tahun 2019. Penulis kemudian melanjutkan karir pada Kantor Akuntan Publik (KAP) I Gede Oka (2019-sekarang) dan sebagai dosen Universitas Terbuka dan Universitas Mahasaraswati Denpasar (2020 - sekarang) yang merupakan salah satu universitas swasta di Bali. Sebelum meniti karir di KAP I Gede Oka, penulis pernah bekerja di KAP Drs. Sri Marmo Djogosarkoro. Sedangkan karir utama menjadi dosen sebelum di Universitas Mahasaraswati Denpasar juga pernah bekerja sebagai dosen di Kampus Alfa Prima pada tahun 2020.

Penulis memiliki kepakaran dibidang Akuntansi. Sebagai hal untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis juga aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: anggyaagustina@gmail.com

KERANGKA KONSEPTUAL

Dr. Wahidahwati, S.E., M.Si., Ak., C.A

Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

Pengertian

Penyusunan teori akuntansi merupakan proses berurutan yang dimulai dari penentuan tujuan pelaporan dan diakhiri dengan penyusunan teknik akuntansi. Sedangkan definisi dari Kerangka konseptual adalah suatu konstitusi, suatu sistem koheren dari hubungan anantara tujuan dan fundamental yang dapat mendorong standar yang konsisten dan yang menjelaskan sifat, fungsi dan keterbatasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan.

Dari definisi tersebut maka kerangka konseptual dapat dipandang sebagai teori akuntansi yang terstruktur (belkaoui, 1993), karena struktur kerangka konseptual sama dengan struktur teori akuntansi yang didasarkan pada proses penalaran logis yang dapat digambarkan dalam bentuk hierarki yang memiliki beberapa tingkatan. Kerangka konseptual dimaksudkan untuk konstitusi dalam proses penyusunan standar. Tujuannya adalah memberikan petunjuk dalam menyelesaikan perselisihan yang meningkat selama proses penyusunan standar dengan mempersempit pertanyaan, apakah standar telah sesuai dengan kerangka konseptual ataupun tidak. Sedangkan Fungsi kerangka konseptual ini untuk meningkatkan komparabilitas laporan keuangan dan untuk mengevaluasi praktik akuntansi. Salah satu manfaatnya adalah kerangka konseptual

memberikan pedoman yang dapat memberikan pedoman bagi penyusun standar. Isi kerangka konseptual umum dimulai dari tujuan pelaporan keuangan, karakteristik kualitatif informasi akuntansi, unsur-unsur laporan keuangan, pengukuran dan pengakuan laporan keuangan, dan penyajian. Penyajian kerangka konseptual meliputi pelaporan posisi keuangan, pelaporan arus kas dan likuiditas, dan pelaporan laba.

Kebutuhan Kerangka Konseptual

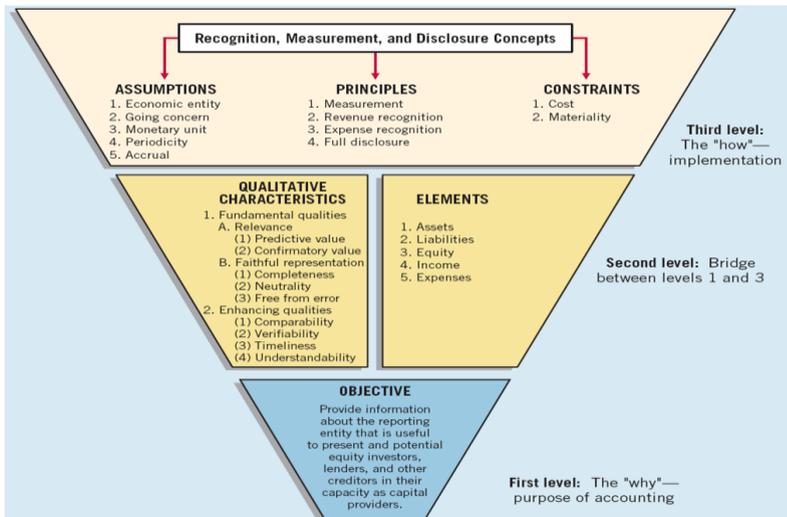
Ada 2 alasan mengapa kita memerlukan kerangka konseptual yaitu :

1. Kerangka konseptual akan meningkatkan pemahaman dan keyakinan pemakai laporan keuangan atas pelaporan keuangan dan akan menaikkan komparabilitas antar laporan keuangan perusahaan
2. Kerangka konseptual yang dikembangkan dengan baik akan membuat profesi mampu lebih cepat memecahkan masalah praktis yang baru dan sedang berkembang dengan mengacu pada kerangka teori dasar yang ada.

Kerangka Konseptual IFRS

Kerangka dasar merupakan suatu sistem koheren yang melekat dengan tujuan-tujuan serta sifat dasar akuntansi yang mengarah pada standar konsisten terdiri atas berbagai sifat, fungsi, dan batasan akuntansi dan laporan keuangan. Dengan kata lain bahwa Kerangka Konseptual untuk Pelaporan Keuangan (Conceptual Framework) menjelaskan tujuan, dan konsep untuk, pelaporan keuangan bertujuan umum. Proses akuntansi yang dimulai dari identifikasi kejadian dan transaksi hingga penyajian laporan keuangan perusahaan memerlukan sebuah kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Tujuan dari Kerangka Konseptual adalah untuk:

1. Membantu Dewan Standar Akuntansi Internasional (Dewan) untuk mengembangkan Standar IFRS (Standar) berdasarkan konsep yang konsisten;
2. Membantu penyusun untuk mengembangkan kebijakan akuntansi yang konsisten ketika tidak ada Standar ini berlaku untuk transaksi tertentu atau peristiwa lain, atau ketika: Standar memungkinkan pilihan kebijakan akuntansi; dan
3. Membantu semua pihak untuk memahami dan menafsirkan Standar Kerangka ini menetapkan suatu konsep yang menjadi dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan bagi para pengguna laporan. Kerangka kerja konseptual IFRS seperti digambarkan pada gambar di bawah ini :



Gambar 6.1 Kerangka Konseptual IFRS

Kerangka konseptual menurut *International Financial Reporting Standard* (IFRS) dibagi menjadi 3 level yaitu:

1. *First Level* = *Basic Objective* (Tujuan Laporan Keuangan)

Memberi informasi keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi investor sekarang dan investor potensial, *lenders*, dan kreditor lain dalam

pengambilan keputusan dalam kapasitasnya sebagai penyedia modal.

Keputusan tersebut melibatkan keputusan tentang:

- a. membeli, menjual atau memegang instrumen ekuitas dan utang;
 - b. memberikan atau menyelesaikan pinjaman dan bentuk kredit lainnya; atau
 - c. menggunakan hak suara pada, atau dengan cara lain yang dapat mempengaruhi dalam penggunaan sumber daya ekonomik entitas.
2. *Second Level* = Karakteristik Keuangan dan Unsur Laporan Keuangan

- a. Karakteristik kualitatif

International Accounting Standard Board (IASB) mengidentifikasi karakteristik kualitatif informasi akuntansi untuk membedakan informasi yang lebih baik (lebih berguna) dan Informasi inferior (kurang bermanfaat) untuk pengambilan keputusan ekonomi yang terdiri dari :

1) *Fundamental qualities*

a) *Relevance*

- *Predictive Value*: membantu meramalkan/memprediksi kinerja yang akan diperoleh di masa mendatang.
- *Confirmatory Value*: membantu mengkonfirmasi adanya kebenaran ekspektasi periode sebelumnya.

b) *Faithful Representation*

- *Completeness*: menyajikan semua informasi yang penting yang memenuhi kriteria penyajian laporan secara wajar.

- *Neutrality*: informasi laporan keuangan tidak dibuat untuk kepentingan salah satu pihak.
- *Free from error*: informasi laporan keuangan bebas dari kesalahan. Dengan kata lain bahwa tidak ada kesalahan atau kelalaian dalam mendeskripsikan fenomena, dan proses yang digunakan untuk menghasilkan informasi yang dilaporkan, karena telah dipilih dan diterapkan tanpa ada kesalahan dalam prosesnya

2) *Enhancing qualities*

- a. *Comparability*: Laporan keuangan yang dibuat harus dapat dibandingkan dengan laporan keuangan perusahaan lain yang sejenis atau dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya (*consistency*).
- b. *Verifiability*: laporan keuangan harus dapat diverifikasi oleh akuntan lain dengan metode yang sama dan dapat diuji.
- c. *Timeliness*: laporan keuangan disajikan tepat waktu yaitu sebelum pengambilan keputusan diambil.
- d. *Understandability*: laporan keuangan harus dapat dipahami oleh orang-orang yang memahami akuntansi dan bisnis atau oleh orang-orang yang ingin mempelajari dan menganalisis informasi keuangan yang disajikan.

3. *Third Level = Recognition, measurement, and disclosure concept.*

a. Asumsi Dasar

- (1) *Economic entity*: Perusahaan merupakan sebuah entitas yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya dan unit bisnis lainnya.
- (2) *Going concern*: Perusahaan dianggap sebagai entitas yang memiliki kelangsungan hidup berkelanjutan sehingga perencanaan untuk penyusunan laporan keuangan masa kini dan mendatang dilaksanakan terus-menerus.
- (3) *Monetary unit*: uang adalah *common denominator*.
- (4) *Periodicity*: Untuk tujuan laporan keuangan, entitas bisnis dibagi ke dalam periode-periode akuntansi.
- (5) *Accrual basis of accounting*: transaksi keuangan dicatat pada periode saat peristiwa terjadi.

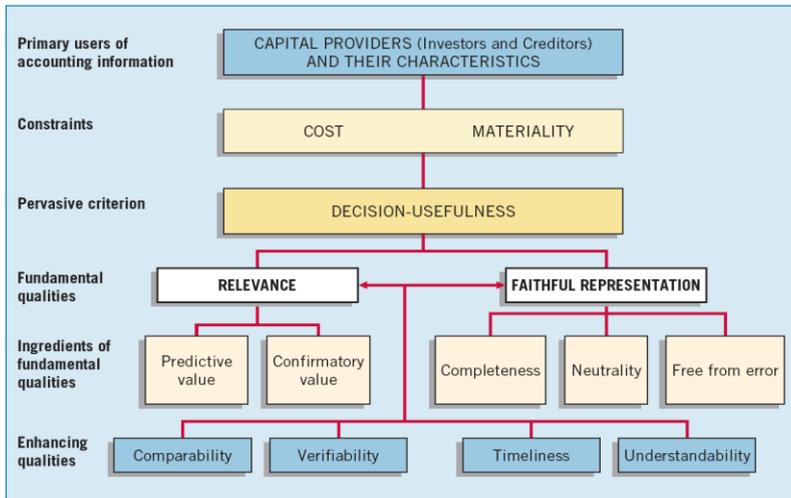
b. Prinsip Dasar Akuntansi

(1) Measurement

- *Cost*: penyajian secara wajar atas jumlah yang dibayarkan untuk barang yang diterima.
- *Fair value*: jumlah nilai aset yang dapat ditukar antara pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan bersedia dalam *arm's length transaction*.
- IASB mengambil langkah dengan memberi pilihan pada perusahaan untuk menggunakan nilai wajar sebagai dasar pengukuran aset

keuangan dan liabilitas keuangan.

- (2) *Revenue recognition*: Pendapatan diakui apabila kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke dalam perusahaan dan pengukuran dilakukan secara andal.
 - (3) *Expense recognition*: Pengeluaran (penggunaan aset/menimbulkan liabilitas- atau kombinasi keduanya) selama periode tertentu akibat penyerahan/produksi barang dan/atau memberi jasa.
 - (4) *Full disclosure*: Semua informasi penting yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan harus diungkapkan.
- c. Constraint
- (1) Biaya: biaya penyediaan informasi mempertimbangkan manfaat yang diperoleh.
 - (2) Materialitas: suatu item dianggap material jika dimasukkannya atau kelalaian memasukkannya akan mempengaruhi atau mengubah penilaian orang yang menggunakan.



Gambar 6.2 Karakteristik Kualitatif

Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK)

Pada tanggal 4 September 1988, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). Dan pada tanggal 27 Agustus 2014 dilakukan penyesuaian KDPPLK lalu diterbitkan dan disahkan. KDPPLK digantikan oleh Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK) pada tanggal 28 September 2016 oleh Dewan Standar (DSAK) IAI yang merupakan adopsi dari *the Conceptual Framework Financial Reporting* per 1 Januari 2016.

Kemudian dilakukan penyesuaian sehingga pada tanggal 26 Juni 2019 Draf Eksposur (DE) Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK) telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. DE KKPK ini memiliki tanggal efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan lebih dini diperkenankan untuk perusahaan yang menggunakan KKPK dalam mengembangkan kebijakan akuntansi ketika tidak ada PSAK yang berlaku untuk transaksi tertentu.

DE KKPK merupakan adopsi dari *the Conceptual Framework for Financial Reporting* per Maret 2018. DE

KKPK ini menggantikan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK) yang telah disahkan pada tanggal 28 September 2016 dan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) (Penyesuaian 2014) yang telah disahkan pada tanggal 27 Agustus 2014.

Kerangka Konseptual mendeskripsikan tujuan dan konsep untuk, pelaporan keuangan bertujuan umum.

Kerangka Konseptual akan direvisi dari waktu ke waktu berdasarkan pengalaman DSAK IAI dalam penggunaan Kerangka Konseptual tersebut. Revisi Kerangka Konseptual tidak akan secara otomatis mengarah pada perubahan atas Standar. Kerangka Konseptual menyediakan landasan bagi Standar yang:

1. Berkontribusi terhadap transparansi dengan meningkatkan komparabilitas internasional dan kualitas informasi keuangan, yang memungkinkan investor dan pelaku pasar lainnya untuk membuat keputusan ekonomik berdasarkan informasi.
2. Memperkuat akuntabilitas dengan mengurangi kesenjangan informasi antara penyedia modal dan orang-orang yang telah mempercayakan uangnya ke pihak tersebut. Standar berdasarkan Kerangka Konseptual memberikan informasi yang diperlukan dalam meminta pertanggungjawaban manajemen. Sebagai sumber informasi yang dapat diperbandingkan secara global, Standar tersebut juga sangat penting bagi para regulator di seluruh dunia.
3. Berkontribusi pada efisiensi ekonomik dengan membantu investor untuk mengidentifikasi peluang dan risiko di seluruh dunia, sehingga meningkatkan alokasi modal. Untuk bisnis, penggunaan bahasa akuntansi tunggal yang tepercaya yang berasal dari Standar berdasarkan Kerangka Konseptual menurunkan biaya modal dan mengurangi biaya pelaporan internasional.

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLK Syariah)

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLK Syariah) merupakan pengaturan akuntansi yang memberikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan atas transaksi syariah. Berbeda dengan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK) pada SAK umum yang mengacu kepada transaksi konvensional, KDPPLK Syariah memberikan konsep dasar paradigma, asas transaksi syariah, dan karakteristik transaksi syariah.

Tujuan Kerangka Dasar Syariah

Tujuan kerangka dasar ini adalah sebagai acuan bagi pihak:

1. Penyusun standar akuntansi syariah: digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas menyusun standar akuntansi syariah.
2. Penyusun laporan keuangan: digunakan sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan berbasis syariah.
3. Auditor: digunakan sebagai dasar pemberian opini dalam laporan audit dalam memberi pernyataan apakah laporan keuangan perusahaan telah mengacu atau berpedoman pada Prinsip Akuntansi Syariah yang Berterima Umum.
4. Pengguna laporan keuangan: dasar melakukan penafsiran/interpretasi terhadap laporan keuangan dengan berpedoman pada standar akuntansi keuangan syariah.

Paradigma Transaksi Syariah

Transaksi syariah mendasarkan pada paradigma bahwa alam semesta merupakan ciptaan Tuhan sebagai amanah (kepercayaan ilahi) dan merupakan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (*al-falah*). Syariah menunjukkan ketentuan hukum Islam yang mengatur segala aktivitas manusia yang mencakup

perintah yang harus dilaksanakan dan larangan yang harus dihindari, baik yang mengatur interaksi secara vertikal dengan Tuhan maupun secara horisontal yang menunjukkan hubungan antar sesama makhluk manusia. Substansinya:

1. Aktivitas umat manusia memiliki *akuntabilitas dan nilai illahiah* yang menempatkan perangkat syaria'ah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha.
2. Terbentuk *integritas* yang membentuk karakter tata kelola dan disiplin pasar yang baik.

Prinsip syariah yang berterima umum untuk aktivitas muamalah mengikat secara hukum bagi untuk pelaku yang melakukan transaksi syariah. Sedangkan akhlak adalah norma dan etika yang meliputi nilai-nilai norma dalam melakukan transaksi antar makhluk hidup agar terjalin hubungan yang saling menguntungkan, sinergis, dan harmonis.

Prinsip Transaksi Syariah

1. Persaudaraan (*ukhuwah*)

Prinsip persaudaraan didasarkan pada: prinsip saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling menolong (*ta'a wun*), saling menjamin (*takaful*), saling bersinergi, saling beraliansi (*tahaluf*).

2. Keadilan (*'adalah*)

Prinsip keadilan melarang adanya unsur-unsur:

- a. Riba/bunga di setiap bentuk dan jenisnya
- b. Kedzaliman baik pada diri sendiri, orang lain atau terhadap lingkungan
- c. Judi atau bersikap spekulatif (*maysir*) dan tidak ada hubungan dengan aspek produktivitas
- d. Unsur ketidakjelasan (*gharar*), manipulasi, dan eksploitasi informasi dan tidak ada kepastian untuk pelaksanaan akad

- e. Haram yaitu segala hal yang dilarang tegas dalam Alquran dan Assunnah, baik untuk barang/jasa maupun aktivitas operasional terkait
3. Kemaslahatan (*maslahah*)

Kemaslahatan (*maslahah*) merupakan aspek kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan meliputi dua unsur yaitu: halal (patuh terhadap ketentuan syari'ah) dan thayyib (membawa kebaikan dan bermanfaat).
4. Keseimbangan (*tawazun*)

Prinsip keseimbangan menunjukkan adanya keseimbangan antara aspek material dan spiritual, antara aspek privat dan publik, antara sektor keuangan dan sektor riil, antara bisnis dan sosial serta antara aspek pemanfaatan serta pelestarian. Transaksi syari'ah yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pemilik tetapi juga mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang berkepentingan, dengan demikian dapat merasakan adanya manfaat dari kegiatan ekonomi tersebut.
5. Universalisme (*syumuliyah*)

Prinsip universalisme (*syumuliyah*) artinya transaksi dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa adanya perilaku membedakan suku, agama, ras dan golongan sesuai dengan semangat kerahmatan semesta alam (*rahmatan lil alamin*).

Bentuk Laporan Keuangan Syariah

1. Posisi Keuangan Entitas Syari'ah, disajikan dengan bentuk laporan posisi keuangan
2. Informasi Kinerja Entitas Syari'ah, disajikan dengan bentuk laporan laba rugi
3. Informasi Perubahan Posisi Keuangan Entitas Syari'ah

4. Informasi Lain seperti Laporan Penjelasan tentang Pemenuhan Fungsi Sosial Entitas Syari'ah
5. Catatan dan Skedul Tambahan

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

1. Dapat dipahami (*understandable*) artinya adanya kemudahan informasi untuk dipahami pemakai laporan keuangan.
2. Relevan (*relevance*) artinya adanya kemampuan untuk mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan, membantu mengevaluasi peristiwa yang terjadi di masa lalu, masa kini atau masa depan.
3. Keandalan (*reliable*) artinya informasi bebas dari hal-hal yang menyebabkan menyesatkan, bebas dari adanya kesalahan material, dan informasi tersebut dapat diandalkan oleh pemakai laporan keuangan sebagai penyajian yang jujur (*representation faithfulness*).
4. Dapat dibandingkan (*comparable*) artinya memiliki kemampuan perbandingan berupa pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi yang serupa, antar periode entitas syari'ah yang sama, untuk entitas syari'ah yang berbeda, maupun dengan entitas lain.

Kendala Aspek Relevan dan Keandalan

1. Tepat waktu

Jika terjadi penundaan yang tidak seharusnya terjadi dalam pelaporan keuangan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya.

2. Keseimbangan antara biaya dan manfaat

Manfaat yang dihasilkan informasi keuangan seharusnya melebihi dari biaya yang dibutuhkan selama proses penyusunannya.

Unsur-Unsur Laporan Keuangan

1. Laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.
2. Laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial terdiri atas laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.
3. Laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus dari entitas syari'ah tersebut.

Posisi Keuangan Syariah

1. Aset adalah sumber daya yang dikuasai suatu entitas syari'ah sebagai akibat transaksi masa lalu dan berasal dari mana manfaat ekonomi di masa depan yang diharapkan diperoleh suatu entitas syari'ah.
2. Liabilitas merupakan hutang suatu entitas syari'ah masa kini yang timbul dari aktivitas di masa lalu, dan penyelesaiannya diharapkan akan mengakibatkan adanya arus keluar dari sumber daya entitas syari'ah yang memiliki manfaat ekonomi.
3. Dana Syirkah Temporer adalah dana yang diterima sebagai bentuk investasi jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya dan entitas syari'ah tersebut memiliki hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut melalui perjanjian pembagian hasil investasi atas dasar kesepakatan.
4. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas syari'ah setelah dikurangi semua liabilitas dan dana syirkah temporer. Ekuitas selanjutnya dapat disubklasifikasi menjadi sebuah setoran modal dari pemegang saham, saldo laba, penyesuaian saldo laba dan penyesuaian penyesuaian pemeliharaan modal.

Kinerja Syariah

1. Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan (*income*) meliputi pendapatan (*revenue*) maupun keuntungan (*gain*).
2. Beban (*expenses*) adalah penurunan manfaat ekonomi yang terjadi selama suatu periode akuntansi tertentu dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya suatu liabilitas perusahaan yang mengakibatkan adanya penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal (pemilik), termasuk di dalamnya beban yang terjadi untuk pelaksanaan aktivitas suatu entitas syariah maupun kerugian yang timbul.

Pengakuan dan Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Biaya Historis (*Historical Cost*)

1. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayarkan atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) yang diperoleh.
2. Liabilitas dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari liabilitas (*obligation*).

Biaya Kini (*Current Cost*)

1. Aset dinilai dalam jumlah kas (atau setara kas) yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset diperoleh saat ini (sekarang).
2. Liabilitas dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontokan (*undiscounted*) yang mungkin diperlukan untuk menyelesaikan liabilitas (*obligation*) tersebut saat ini (sekarang).

Nilai Realisasi (*Realizable/Settlement Value*)

1. Aset dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal (*orderly disposal*).
2. Liabilitas dinyatakan sebesar nilai penyelesaian yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal.

Daftar Pustaka

- Kieso, Donald E., Jerry J, Weygant & Terry D Warfield. 2017. *Intermediate Accounting IFRS Edition*, 3rd ed., United States of America : Wiley
- Suwardjono, 2008., *Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, BPFE: Jogjakarta.
- Sembiring, S. (2015). Peran Kerangka Konseptual Akuntansi Dalam Pelaporan Keuangan Perusahaan. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 15(1), 58–69. <https://doi.org/10.54367/jmb.v15i1.99>
- Martani, Dwi., Siregar, Sylvia Veronica., Wardhani, Ratna., Farahmita, Aria., Tanujaya, Edward. 2016. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK Edisi 2 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat
- Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – IAI, 2007
- <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/tentang-6-kerangka-dasar-sak-syariah>
- <http://dwimartani.com/akuntansi-keuangan-kontemporer/>
- [https://web.iaiglobal.or.id/assets/files/file_sak/exposur-e-draft/DE%20Kerangka%20Konseptual%20Pelaporan%20Keuangan%20\(KKPK\).pdf](https://web.iaiglobal.or.id/assets/files/file_sak/exposur-e-draft/DE%20Kerangka%20Konseptual%20Pelaporan%20Keuangan%20(KKPK).pdf)

Profil Penulis



Dr. Wahidahwati, S.E., M.Si., Ak., C.A

Penulis lahir di kota Surabaya dan menjadi dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. Penulis telah menyelesaikan pendidikan S1 di Jurusan Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia pada tahun 1995, S2 jurusan Akuntansi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, lulus pada tahun 2002, dan telah menyelesaikan S3 Program Studi Akuntansi di Universitas Brawijaya, Malang pada tahun 2010. Penulis juga telah lulus Ujian Sertifikasi Asesor BNSP tahun 2018 dan lulus ujian sertifikasi CSRS pada tahun 2018. Selain sebagai pengajar, penulis juga pernah menjadi komisioner pada Komisi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014-2016. Selain aktif melakukan penelitian dibidang akuntansi keuangan, penulis juga aktif menulis buku diantaranya Akuntansi keuangan Menengah Edisi 1 dan 2.

Email Penulis : wahidahwati@stiesia.ac.id

STANDAR AKUNTANSI UNTUK *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*

Dr. Tenriwaru., S.E., M.Si., Ak., CA.

Univesitas Muslim Indonesia

Pendahuluan

Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan,, akuntansi berfungsi untuk memberikan informasi untuk pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban. Selama ini, laporan keuangan hanya difokuskan kepada kepentingan investor dan kreditor sebagai pemakai utama laporan keuangan. Hal ini tertuang mulai dari Standar *Financial Accounting Concepts* (SFAC) No.1 dan berbagai literatur lainnya. Kalau diperhatikan, pemakai informasi tidak hanya pihak-pihak tersebut. Banyak pihak lain yang juga memerlukan informasi keuangan, yang selayaknya mendapatkan perhatian yang sama (Gray, 2008). Selama ini perusahaan hanya menyampaikan informasi mengenai hasil operasi keuangan perusahaan kepada pemakai, tetapi mengabaikan eksternalitas dari operasi yang dilakukannya, misalnya polusi udara, pencemaran air, pemutusan hubungan kerja, dan lainnya.(Aryani, 2018).

Akuntansi sosial secara umum bertujuan untuk mengukur dan mengungkapkan untung rugi dan biaya sosial yang ditimbulkan oleh kegiatan perusahaan tersebut di masyarakat. Biaya sosial ini umumnya dikaitan dengan ketenagakerjaan, konsumen dan produk

atau barang/jasa yang dihasilkan, kemasyarakatan, dan lingkungan hidup di sekitar perusahaan. Pengungkapan biaya sosial ini dilakukan dalam laporan keuangan atau laporan tahunan. Prinsip dasar *good corporate governance* mengharuskan perusahaan untuk memberikan laporan bukan hanya kepada pemegang saham, calon investor, kreditur, dan pemerintah semata tetapi juga kepada stakeholders lainnya termasuk karyawan dan masyarakat. Pengungkapan *corporate Social Responsibility*/tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan dapat dikelompokkan berdasarkan tema yang diungkap, tipe pengungkapan, tingkat pengungkapan, maupun lokasi dimana tanggung jawab sosial tersebut diungkapkan (Tenriwaru dan Nasaruddin, 2018).

Artikel ini membahas mengenai perlunya standar akuntansi untuk pertanggungjawaban sosial dan lingkungan, bentuk laporan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan, dan penerapannya di Indonesia. Laporan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan tidak hanya bermanfaat bagi stakeholders, tetapi juga bagi perusahaan. Karena semakin pentingnya laporan ini selayaknya mendapatkan perhatian dari regulator. Selama ini belum banyak pengaturan yang dilakukan oleh regulator. Pengaturan yang dilakukan hanya bersifat persuasif.

Pembahasan

Tanggung jawab perusahaan merupakan suatu hal yang penting untuk dibahas sebelum pembahasan mengenai laporan pertanggungjawaban. Akan tetapi, sebelum membahas tanggung jawab perusahaan perlu kiranya membahas perusahaan bisnis. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah revolusi industri perkembangan perusahaan semakin cepat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pabrik-pabrik yang menggunakan teknologi baru untuk meningkatkan produktivitasnya. Penggunaan sumber daya manusia dan alam juga semakin besar. Dalam usaha untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, perusahaan

mengambil berbagai tindakan, antara lain menggunakan teknologi modern dalam berproduksi, melakukan akuisisi, penggunaan sumber daya yang lebih murah, pengurangan biaya, dan usaha lainnya untuk meningkatkan produktivitas. Semuanya dilakukan untuk memberikan hasil yang lebih banyak kepada pemegang saham (Lako, 2008).

Tindakan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, di satu sisi akan meningkatkan produktivitas perusahaan, tetapi di sisi lain mungkin akan merugikan pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain karyawan, konsumen, dan masyarakat. Dalam usaha untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi sering kali mengakibatkan perusakan lingkungan, berupa pencemaran air, penggundulan hutan, pencemaran udara, dan lainnya. Perusahaan menganggap semua yang dilakukannya sebagai eksternalitas dari usaha meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan korporasi (CSR) secara umum dapat didefinisikan sebagai komitmen berkelanjutan dari suatu perusahaan untuk bertanggung jawab secara ekonomik, legal, etis dan sukarela terhadap dampak-dampak dari tindakan ekonominya terhadap komunitas masyarakat dan lingkungan serta proaktif melakukan upaya-upaya berkelanjutan untuk mencegah potensi-potensi dampak negatif atau risiko aktivitas ekonomi korporasi terhadap masyarakat dan lingkungan serta meningkatkan kualitas sosial dan lingkungan yang menjadi stakeholder-nya. Definisi tersebut berimplikasi bahwa CSR suatu perusahaan tidak hanya terbatas pada tanggung jawab yang bersifat reaktif yaitu bertanggung jawab karena perusahaan telah menimbulkan dampak-dampak negatif (berdosa) bagi masyarakat dan lingkungan. Tapi, juga bertanggungjawab secara proaktif (dan interaktif) yaitu merumuskan program-program dan upaya-upaya berkesinambungan untuk mencegah potensi dampak negatif atau risiko aktivitas ekonomi korporasi terhadap masyarakat dan lingkungan serta meningkatkan kualitas sosial dan lingkungan yang menjadi *stakeholder-nya* (Lako, 2011).

Tanggung jawab tersebut juga mencakup menyajikan atau mengungkapkan informasi dan kinerja CSR secara jujur, transparan, kredibel dan akuntabel kepada para stakeholder untuk pengambilan keputusan. Intinya, tanggung jawab perusahaan (*corporate responsibility*) tidak hanya terbatas pada tanggung jawab ekonomi (*economic responsibilities*) yaitu bagaimana memaksimalkan laba untuk meningkatkan nilai ekuitas bagi pemegang saham atau pemilik perusahaan. Tapi, juga harus bertanggung jawab secara sosial (*social responsibilities*) dan secara lingkungan (*environment responsibilities*) secara integral. Alasannya, masyarakat dan lingkungan merupakan pilar utama penopang kinerja dan keberlanjutan bisnis suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Selama ini pemikiran ini secara tak disadari diabaikan pelaku bisnis. Dengan kata lain, perusahaan perlu menyeimbangkan tanggung jawab ekonomi dengan tanggungjawab sosial dan lingkungan sehingga bisa menghasilkan laba yang berkualitas atau laba yang ramah secara sosial dan lingkungan (*green profit*) atau laba yang berkelanjutan (*sustainable profits*) (Prasetya, 2015).

Hal inilah yang menyebabkan mengapa banyak perusahaan di Indonesia sudah mulai peduli terhadap *corporate social responsibility* (CSR), ada beberapa motif yang menyebabkannya. Pertama, para pebisnis menghadapi tekanan stakeholder eksternal yang kian menguat agar korporasi Indonesia menginternalisasikan CSR dalam tindakan bisnis dan mengungkapkan kinerjanya dalam pelaporan perusahaan (Lako, 2008). Tekanan tersebut berasal dari:

1. Tuntutan pelaku pasar internasional (market forces), terutama investor, kreditor, pemasok dan konsumen, agar perusahaan menghasilkan produk-produk atau jasa yang ramah sosial dan lingkungan.
2. Tekanan dari lembaga-lembaga keuangan nasional dan internasional yang mensyaratkan dimasukkannya isu-isu sosial dan lingkungan dalam perjanjian kontrak hutang/pinjaman; dan

3. Tekanan legislatif (DPR) dan pemerintah yang kian responsif terhadap isu-isu sosial dan lingkungan sehingga memunculkan produk-produk hukum (aturan) yang memaksa perusahaan peduli pada isu-isu CSR.

Kedua, perusahaan mulai menyadari bahwa dibalik pengorbanan sumberdaya ekonomik perusahaan untuk melaksanakan program-program CSR yang bisa menguras laba dan mengurangi jumlah dividen yang semestinya diterima pemilik atau pemegang saham, perusahaan bisa meraup manfaat berlipatganda (*multiplier benefits*) apabila peduli dan melaksanakan CSR secara berkelanjutan. Manfaat berlipat ganda tersebut, misalnya meningkatnya reputasi dan nama baik perusahaan, meningkatnya loyalitas karyawan, investor, kreditor dan pelanggan, menurunnya resistensi masyarakat dan lainnya. Sejumlah manfaat tersebut pada akhirnya akan mendatangkan sejumlah manfaat ekonomi (*economic benefits*) bagi perusahaan. Misalnya, meluasnya pangsa pasar dan meningkatnya volume penjualan, laba dan nilai ekuitas yang meningkat, apresiasi pasar terhadap harga saham/obligasi perusahaan, kesinambungan bisnis dan masih banyak lagi.

Aktifitas Corporate Social Responsibility

Ada berbagai pendapat mengenai aktivitas-aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai aktivitas sosial yang menunjukkan bentuk keterlibatan sosial perusahaan terhadap masyarakat. Kotler dan Lee (2005:23) merumuskan aktivitas yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial dalam 6 kelompok kegiatan : *promotion, marketing, corporate social marketing, corporate philanthropy, community volunteering, dan social responsibility business practices*. *Promotion* adalah aktivitas sosial yang dilakukan melalui *persuasive communications* dalam rangka meningkatkan perhatian dan kepedulian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan isu sosial yang sedang berkembang. *Marketing*, dilakukan melalui *commitment* perusahaan untuk menyumbangkan sebesar persentase tertentu hasil penjualannya untuk

kegiatan social. *Corporate Sosial Marketing*, dilakukan dengan cara mendukung atau pengembangan dan atau penerapan suatu *behavior change* dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. *Corporate Philantropy*, merujuk pada kegiatan yang diberikan langsung *Community Volunteering* merupakan bentuk aktivitas social yang diberikan perusahaan dalam rangka memberikan dukungan bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Dukungan tersebut dapat diberikan berupa keahlian, talenta, ide, dan atau fasilitas laboratorium. *Social Responsibility Business Practices*. *Social Responsibility Business Practices* merupakan kegiatan penyesuaian dan pelaksanaan praktik-praktik operasional usaha dan investasi yang mendukung peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat dan melindungi atau menjaga lingkungan, misalnya membangun fasilitas pengolahan limbah, memilih memilih supplier dan atau kemasan yang ramah lingkungan, dan lain-lain.

Berbeda dengan Kotler dan Lee. *the committee on Accounting for Corporate Social Performance of Nation Association of Accountants* (Mahoney, et. all, 2008) bentuk kegiatan sosial perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Keterlibatan komunitas (*Community Involvement*), mencakup aktivitas berbentuk donasi atau bantuan untuk kegiatan rohani, olahraga, bantuan bagi pengusaha kecil, pelayanan kesehatan masyarakat, bantuan penelitian dan sebagainya.
2. Sumberdaya manusia (*Human Resources*), meliputi program pendidikan dan pelatihan karyawan, fasilitas keselamatan kerja, kesehatan, kerohanian, serta tunjangan karyawan.
3. Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Fisik (*Environmental and Physical Resources*) terdiri dari antara lain keterlibatan perusahaan dalam pengolahan limbah, program penghijauan, pengendalian polusi, dan pelestarian lingkungan hidup.

4. Kontribusi produk atau jasa (*Product or services contribution*), mencakup keamanan dan kualitas produk, kepuasan konsumen, dan sebagainya.

Manfaat Aktifitas *Corporate Social Responsibility*

Kotler dan Lee (2005) menyatakan bahwa partisipasi perusahaan dalam berbagai bentuk tanggung jawab sosial dapat memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, antara lain:

1. Meningkatkan penjualan dan *market share*,
2. Memperkuat *brand positioning*,
3. Meningkatkan *image* dan pengaruh perusahaan,
4. Meningkatkan kemampuan untuk menarik hati, memotivasi, dan mempertahankan (*retain*) karyawan
5. Menurunkan biaya operasional, dan
6. Meningkatkan hasrat bagi investor untuk berinvestasi.

Satyo (Media Akuntansi, Edisi 47/Tahun XII/Juli 2005) menyatakan penyajian laporan berkaitan aktivitas sosial dan lingkungan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan antara lain meningkatkan citra perusahaan, disukai konsumen, dan diminati investor. Bukti-bukti tersebut menunjukkan beragam aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan terhadap *stakeholdersnya*. Tanggung jawab sosial perusahaan tersebut memberikan keuntungan bersama bagi semua pihak, baik perusahaan sendiri, karyawan, masyarakat, pemerintah maupun lingkungan. yang digunakan untuk menilai program yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat, seperti kegiatan pembaharuan urbanisasi, pertahanan militer, atau konstruksi jalan raya. Biaya pengeluaran dilakukan dengan mencari hubungan kegiatan tersebut secara langsung dan mengukur kegunaannya. Harahap (2011:369) menyatakan ada beberapa metode pengukuran akuntansi sosial, yaitu:

1. Menggunakan *Opportunity Cost Approach*, misalnya atas pembuangan limbah suatu perusahaan, dapat dihitung *social cost* dengan cara menghitung kerusakan wilayah rekreasi sebagai akibat pembuangan limbah tersebut, kerugian manusia dalam hidupnya, berapa berkurang kekayaannya.
2. Menggunakan daftar kuesioner, *survey*, lelang, dimana mereka yang merasa dirugikan ditanyai berapa besar jumlah kerugian yang ditimbulkannya atau berapa biaya yang harus dibayar kepada mereka sebagai kompensasi kerugian yang dideritanya.
3. Menggunakan hubungan antara kerugian massal dengan permintaan untuk barang perorangan dalam menghitung jumlah kerugian masyarakat.
4. Menggunakan reaksi pasar dalam menentukan harga. Misalnya vonis hakim akibat pengaduan masyarakat akan kerusakan lingkungan dapat juga dianggap sebagai dasar perhitungan.

Pengukuran Biaya Corporate Social Responsibility

Ada beberapa teknik pengukuran manfaat dan biaya sosial yaitu yang disulkan oleh Kotler, P.& Nance, L. (2005):

1. Penilaian pengganti (*Surrogate Valuation*).
2. Teknik survey (*Survey Techniques*).
3. Biaya perbaikan dan pencegahan (*Restoration or Avoidance Cost*).
4. Penilaian (*Appraisal*) oleh tim independen.
5. Putusan pengadilan (*Court Decisions*).
6. Analisa (*Analisis*).
7. Biaya pengeluaran (*Outlay Cost*).

Metode Penilaian Pengganti (*Surrogate Valuation*) menyatakan bahwa suatu nilai ganti terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi dapat dipilih sebagai cara menghitung kerugian saat nilai kerugian yang diinginkan

tidak dapat dipenuhi secara langsung. Teknik Survei (*Survey Techniques*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menanyakan secara langsung kepada masyarakat apa yang sangat berharga bagi mereka. Cara ini merupakan pendekatan survei yang tidak menyenangkan, namun dalam kenyataannya memberikan informasi yang lebih berharga dan lebih akurat dan sekaligus merupakan teknik yang mahal. Biaya Perbaikan atau Pencegahan (*Restoration or Avoidance Cost*) merupakan suatu cara untuk mengukur biaya sosial dengan memperkirakan pengeluaran uang yang sesungguhnya untuk mencegah atau menghindari bahaya atau kerusakan lingkungan. Penaksiran (*Appraisal*) merupakan penaksiran yang dilakukan oleh pihak independen dalam menilai barang berwujud seperti bangunan dan tanah. Teknik ini hampir sama dengan penilaian pengganti, hanya disini menggunakan tenaga ahli sebagai pihak penaksir independen. Putusan Pengadilan (*Court Decisions*) merupakan cara untuk menilai atau menghitung kerusakan atau biaya tertentu melalui putusan pengadilan. Penilaian ini akurat dalam jumlah dan diidentifikasi dengan menggunakan biaya sosial yang khusus. Pendekatan Analisis (*Analisis*) dilakukan melalui analisa ekonomi dan statistik terhadap data yang ada menghasilkan dalam suatu nilai yang sah dan pengukuran yang dapat dipercaya (Leisinger, K. M: 2007).

Akuntansi Untuk CSR

Makin meningkatnya kepedulian perusahaan pada CSR dan adanya regulasi yang mewajibkan perusahaan melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan, pertanyaan penting yang patut diajukan adalah bagaimanakah perlakuan akuntansi terhadap pengorbanan sumber-sumber ekonomik untuk CSR? Pertanyaan tersebut penting karena hingga saat ini pemerintah atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonsia (DSAK-IAI) belum menerbitkan ketentuan akuntansi atau standar akuntansi yang berterima umum untuk mengatur perlakuan akuntansi

(pengakuan, pengukuran, pencatatan, pelaporan dan pengungkapan informasi) terhadap pengorbanan sumber-sumberdaya ekonomik dan manfaat CSR dalam pelaporan keuangan (*financial reporting*) atau dalam pelaporan perusahaan (*corporate reporting*).

Karena belum ada aturan atau standar, kebanyakan perusahaan lalu memperlakukan pengorbanan sumber-sumber ekonomik untuk CSR sebagai beban periodik dan dilaporkan dalam pelaporan tahunan (*annual report*) atau melalui media pelaporan tersendiri (*green reporting, sustainability reporting, social reporting, triple bottom line reporting* atau lainnya).³ Sebelum membahas perlakuan akuntansi terhadap CSR, marilah terlebih dahulu kita identifikasi pengorbanan sumber-sumber ekonomi perusahaan untuk CSR. Secara umum, pengeluaran atau biaya (*costs*) untuk CSR dapat dibedakan dalam empat kelompok. Pertama, biaya-biaya yang terkait secara langsung dengan penciptaan manfaat ekonomi atau manfaat lainnya yang dapat diterima perusahaan pada periode yang akan datang (*future benefits*). Kedua, biaya-biaya yang terkait secara langsung dengan penciptaan manfaat ekonomi atau manfaat lainnya yang dapat diterima perusahaan pada periode sekarang (*current period benefits*). Ketiga, biaya-biaya yang berhubungan secara tak langsung dengan manfaat periode sekarang. Misalnya, biaya administrasi dan umum untuk CSR, biaya audit sosial dan lingkungan, biaya pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktik CSR. Keempat, biaya-biaya yang dipandang sebagai *costs* atau *losses* periodic ((Lyon dan Maxwell : 2008).

Menurut Lako (2008), perlakuan akuntansi untuk biaya CSR adalah; untuk pengorbanan sumber-sumber ekonomi untuk biaya CSR yang memiliki manfaat ekonomik pada periode-periode selanjutnya, perlakuan akuntansinya adalah sebagai pengeluaran investasi dan diamortisasi ke periode-periode selanjutnya. Misalnya, investasi pada teknologi yang ramah lingkungan, investasi pada proyek-proyek kemitraan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) dengan masyarakat sekitar, biaya

riset dan pengembangan CSR dan lainnya. Pengorbanan itu harus dilaporkan dalam neraca sebagai investasi CSR dalam kelompok Aset Tidak Berwujud (*intangible asset*). Untuk pengorbanan sumber-sumber ekonomi untuk CSR yang tidak memiliki manfaat ekonomik untuk periode-periode berikutnya, perlakuan akuntansinya adalah sebagai pengeluaran beban (*expense*) periodik dan langsung dilaporkan dalam laporan laba-rugi pada kelompok biaya non operasional. Rincian atas sejumlah informasi tersebut dapat diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Untuk aktivitas CSR yang sulit diukur secara moneter, perusahaan bisa mengungkapkan informasinya secara kualitatif dalam catatan atas laporan keuangan. Berkenaan dengan pelaporan dan pengungkapan informasi CSR, perusahaan bisa menggunakan beberapa media pelaporan berikut:

1. Melalui media pelaporan keuangan wajib perusahaan (*financial reporting*). Meski belum ada standar akuntansi yang mengaturnya namun perusahaan bisa menyajikan informasi CSR dalam laporan keuangan dengan menggunakan penalaran logis dari prinsip-prinsip akuntansi berterima umum (PABU).
2. Perusahaan bisa menggunakan media laporan tahunan (*annual report*) direksi kepada pemegang saham. Mayoritas perusahaan publik (*go public*) di Indonesia memanfaatkan media ini untuk mengungkapkan semua informasi CSR mereka agar diketahui para pemegang saham dan publik.
3. Apabila dirasakan belum memadai untuk mengungkapkan informasi CSR melalui media pelaporan keuangan dan laporan tahunan direksi, perusahaan dapat membuat media pelaporan tersendiri yang disebut *social and environment reporting*. Sejumlah perusahaan secara sukarela dan rutin menyusun dan menyajikan informasi tentang program-program, pengorbanan sumber-sumber ekonomik, aktivitas dan kinerja CSR dalam media pelaporan tersendiri untuk disajikan kepada para stakeholder. Ada yang menyebut sebagai *green*

reporting, sustainability reporting, triple bottom line reporting, social performace reporting dan lainnya.

Karena memiliki tiga dimensi tujuan yang terintegrasi maka akuntansi CSR disebut juga *trippel-bottom line accounting*. Intinya, pelaporan keuangan oleh suatu perusahaan harus mencakup informasi ekonomi, sosial dan lingkungan. Tujuannya, agar perusahaan bisa berkembang secara berkelanjutan. Hal ini disebabkan investor dan stakeholders akan kian mengapresiasi perusahaan karena mereka mendapatkan informasi yang lebih komprehensif tentang kinerja, risiko, *intangible values* dan prospek perusahaan.

Ada dua dimensi utama dalam akuntansi CSR. Pertama, melaporkan dan mengungkap *costs* dan *benefits* dari aktivitas ekonomi perusahaan yang secara langsung berdampak pada profitabilitas *bottom-line* (laba). *Costs* dan *benefits* tersebut bisa dihitung dan dikuantifisir secara akuntansi. Kedua, melaporkan *costs* dan *benefits* dari aktivitas ekonomi perusahaan yang berdampak langsung pada individu, masyarakat dan lingkungan. *Benefits* itu sulit dikuantifisir sehingga pelaporannya mesti dilakukan secara kualitatif. Dalam penerapannya, akuntansi pertanggungjawaban sosial mengalami berbagai kendala, terutama dalam masalah pengukuran elemen-elemen sosial dan dalam rangka penyajiannya di laporan keuangan. Masalah ini timbul karena tidak semua elemen sosial dapat diukur dengan satuan uang serta belum terdapatnya standar akuntansi yang baku mengenai pengukuran dan pelaporan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Akuntansi yang merupakan bagian dari dunia usaha ikut memberikan kontribusi dalam merespon kepedulian sosial perusahaan, melalui perkembangan akuntansi sosial termasuk di dalamnya pengungkapan aktivitas sosial dalam laporan keuangan perusahaan (Lako, 2008).

Kesimpulan

Berkembangnya dunia usaha semakin menuntut perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Akuntansi merespon kebutuhan masyarakat atas pelaksanaan tanggung jawab sosial masyarakat dengan menganjurkan perusahaan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosialnya. Laporan atas tanggung jawab sosial perusahaan kepada *stakeholder* ini disebut sebagai laporan akuntansi pertanggungjawaban sosial (*Social Responsibility Accounting*).

Akuntansi pertanggungjawaban sosial dapat digunakan perusahaan untuk membantu perusahaan dalam membuktikan klaim atas tanggung jawab sosial mereka, memonitor kinerja mereka yang berhubungan dengan perubahan nilai sosial, mengkomunikasikan informasi yang dapat dipercaya dan merespon umpan balik dari *stakeholder*. Hal ini juga memperkuat dasar perusahaan dalam jangka waktu panjang dengan menyediakan perusahaan informasi yang penting tentang apa yang terjadi pada lingkungan eksternal, mengembangkan relasi dengan komunitas, pekerja dan pemasok serta konsumen. Sampai saat ini, pelaporan atas akuntansi pertanggungjawaban sosial masih bersifat *voluntary disclosure* (pengungkapan suka rela) sehingga perusahaan tidak wajib untuk melaporkan akuntansi pertanggungjawaban sosialnya. Tetapi karena sifat akuntansi pertanggungjawaban sosial ini sangat penting (sama pentingnya dengan laporan atas keuangan perusahaan), maka sebaiknya perusahaan melaporkan pertanggungjawaban sosialnya karena pengungkapan atas tanggung jawab sosial akan membentuk suatu kepercayaan *stakeholder* dan hal ini akan menambah nilai bagi perusahaan. Untuk itu standar akuntansi yang mengatur pola pertanggungjawaban perusahaan ini dianggap urgen mengingat bahwa perusahaan dianggap sebagai salah pihak yang bertanggungjawab pada kerusakan lingkungan, berubahnya ekosistem dan degradasi moral yang terjadi.

Daftar Pustaka

- Ariyani, S., 2008. Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Profitabilitas dan Reaksi Pasar: Studi Empiris pada Emiten Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI).
- Gray, Rob. 2008. “*Social and Environmental Accounting and Reporting: From Ridicule to Revolution? From Hope to Hubris? – A Personal Review of Field*”. *Issues in Social and Environmental Accounting*. Vol. 2, No. 1, June 2008, pp. 3—18.
- Harahap, S. S. (2011). Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kotler, P., & Nance, L. (2005). *Corporate Social Responsibility: Doing The Most Good for Your Company and Your Cause*: John Wiley & Sons Inc.
- Lako, Andreas, 2008. Kewajiban CSR dan Reformasi Paradigma Bisnis dan Akuntansi. *Manajemen dan Usahawan Indonesia*. No.6/Th.XXVII. Lembaga Manajemen FEUI. hlm. 12-17
- Lako, Andreas. 2011. Dekonstruksi CSR dan Reformasi Paradigma Bisnis dan Akuntansi. Erlangga, Jakarta.
- Leisinger, K. M. (2007). *Corporate Philanthropy: The “Top of the Pyramid”*. *Business and Society Review*, 112(3),315-342.
- Lyon, Thomas P. dan John W. Maxwell. 2008. *Corporate Social Responsibility and the Environment: A Theoretical Perspective*. *Review of Environmental Economics and Policy*. volume 1, hlm. 1–22
- Mahoney, Lois, LaGore, W., dan Scazzero, J. A. 2008. “*Corporate Social Performance, Financial Performance for Firm that Restate Earnings*”. *Issues in Social and Environmental Accounting*. Vol. 2, No. 1, June 2008, pp. 104—130.

Prasetya, Pria Juni et al. 2015. “Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Intervening”. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 14, No 1, h 511-538.

Tenriwaru dan F. Nasaruddin 2020, Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. Ajar Vol. NO .01 (Februari) 2020, 68-87.

Profil Penulis



Dr. Tenriwaru., S.E., M.Si., Ak., CA.

Lahir di Ujungpandang Sulawesi Selatan, 9 Oktober 1970, memulai karier sebagai dosen tahun 2001 sebagai dosen Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako (Untad) Palu. Kemudian dengan alasan ikut suami yang berkarir di Universitas Negeri Makassar (UNM) maka kami mengajukan permohonan pindah ke Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan diloloskan oleh pimpinan di Untad Palu sejak tahun Agustus 2011. Dosen tetap di Jurusan Akuntansi UMI Makassar ini menyelesaikan pendidikan di Program S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar tahun 1998, Program Magister S2 Manajemen Keuangan Unhas tahun 2008. Pada tahun 2014 Kembali mengikuti kuliah pada Program Doktorat S3 di Ilmu Ekonomi konsentrasi Akuntansi di Unhas dari tahun 2014-2018. Selain di Universitas Muslim Indonesia, Tenriwaru pernah mengajar sebagai dosen luar biasa di Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar dan STIE Wirabakti Makassar. Aktif di berbagai organisasi profesi seperti di Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Makassar, Ikatana Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Wilayah Makassar, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) wilayah Makassar. Aktif juga di Peneleh Riset Institute sebagai wakil direktur. Aktif membawakan materi untuk webinar khususnya yang bertemakan akuntansi soasial dan CSR. Tenriwaru sangat menyenangi berinteraksi dengan alam dan manusia yang terasa membuat hidup sangat berkualitas. Di akhir pekan senang melakukan traveling untuk menikmati suasana alam terbuka dan bersama keluarga menghabiskan waktu di akhir pekan.

Email Penulis: tenriwaru@umi.ac.id

KONSEP ASET

Layly Dwi Rohmatunnisa', S.Pd., M.Akun

Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang

Pendahuluan

Setiap elemen yang terdapat dalam sebuah laporan keuangan memberikan makna sebagai petunjuk bagi pembaca untuk memperoleh gambaran realitas kegiatan perusahaan dengan jelas secara finansial tanpa harus mengamati sendiri secara fisis realitas finansial perusahaan. Salah satu komponen kerangka konseptual adalah pengidentifikasian elemen laporan keuangan. Pengidentifikasian tersebut meliputi pengertian, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Pembahasan elemen laporan keuangan kali ini akan berfokus pada aset. Aset merupakan elemen neraca yang akan membentuk informasi yang memberikan makna berupa posisi keuangan jika dikaitkan dengan elemen laporan keuangan lainnya seperti kewajiban dan ekuitas.

Pengertian Aset

FASB (Financial Accounting Standard Board) mendefinisikan aset sebagai manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti diperoleh atau dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Sedangkan, AASB (Australian Accounting Standards Board) menjelaskan bahwa aset merupakan potensial jasa atau manfaat ekonomis masa depan yang dikendalikan

dengan peloporan entitas sebagai hasil dari transaksi atau kejadian masa lalu.

Aset dinilai memiliki sibagai manfaat ekonomi dan bukan sebagai sumber ekonomis (*resources*), karena manfaat ekonomis tidak membatasi bentuk atau jenis sumber ekonomis yang dapat dikategorikan sebagai aset. Selain itu, pengendalian aset tidak dibatasi hanya perusahaan bisnis, tapi secara luas juga organisasi non bisnis. Berdasarkan pada definisi aset, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga karakteristik utama yang harus dipenuhi agar suatu objek dapat dikategorikan sebagai aset:

Manfaat Ekonomis

Aset harus memiliki nilai manfaat ekonomis di masa depan yang cukup pasti. Misalkan seperti kas memiliki manfaat atau potensi jasa karena memiliki daya beli atau daya tukar dalam unit moneter. Objek selain kas juga harus memiliki nilai manfaat ekonomis yang dapat ditukarkan dengan kas, barang, atau jasa, sehingga dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa, atau dapat digunakan untuk melunasi kewajibannya.

FASB merekomendasikan dua faktor untuk dipertimangkan ketika menilai apakah suatu saat suatu pos atau objek masih dapat memenuhi syarat seagai properti yaitu:

1. Apakah suatu pos yang dikendalikan oleh entitas isnis apakah pengendalian awal mengandung manfaat ekonomi masa depan atau tidak.
2. Apakah seluruh atau seagian manfaat ekonomik masih dipertahankan pada saat penilaian.

Dikendalikan Entitas

Aset harus dimiliki dan dikendalikan oleh entitas.entitas harus mampu untuk mendapatkan, memelihara, menahan, menukarkan, menggunakan manfaat ekonomis serta mencegah pihak lain menggunakan manfaat tersebut.

Sebagaimana Most (1982) dalam (Suwardjono 2005) menjelaskan bahwa pengendalian suatu aset dapat dicapai dengan cara-cara berikut:

1. Pembelian (*by purchase*)
2. Pemberian (*by gift*)
3. Penemuan (*by discovery*)
4. Perjanjian (*by agreement*)
5. Produksi/transformasi (*by production/transformation*)
6. Penjualan (*by sale*)
7. Lain-lain seperti pertukaran (*by barter*), peminjaman (*by loan*), penjaminan (*by bailment*), pengkonsignaan (*by consignment*), dan berbagai transaksi komersial (*by commercial transactions*) yang diakui hukum atau kebiasaan bisnis.

Hadir Akibat Transaksi Masa Lalu

Kehadiran aset sebagai akibat dari transaksi atau kejadian masa lalu adalah kriteria untuk memenuhi definisi. Kepemilikan atau penguasaan suatu aset harus didahului oleh transaksi atau kejadian ekonomis yang telah terjadi. Sebagai contoh adalah pembayaran tunai atas penjualan sebelumnya, penjualan kredit, suransi di bayar di muka, dan transaksi lainnya.

Karakteristik Pendukung

Mengacu pada FASB, sejumlah karakteristik pendukung yang terkait dengan *cost*/ biaya, berwujud, pertukaran, dapat dipisahkan, dan dapat ditegakkan secara hukum. Karakteristik pendukung ini memperkuat atau lebih memastikan keberadaan aset tetapi tidak adanya pendukung tersebut tidak menghalangi objek untuk memenuhi syarat sebagai aset.

1. Melibatkan *cost*

Aktivitas pemerolehan aset akan ada *cost* yang terkait. Ketika biaya-biaya yang timbul dari perolehan suatu objek melalui penjualan/pembelian dan atau pertukaran objek tersebut dapat diklasifikasikan sebagai

aset meskipun nilai biaya harus dinilai secara tepat sebagai dasar untuk pencatatan awal. Pada hakekatnya adalah berada pada nilai ekonomis yang akan diperoleh di masa yang akan datang.

Adanya biaya penting dalam penerapan definisi biaya karena dua alasan yaitu: (1) sebagai bukti perolehan suatu aset dan (2) sebagai metrik yang cukup objektif untuk aset tersebut.

2. Berwujud

Wujud bukanlah menjadi hal mutlak suatu objek untuk bisa dikatkan sebagai aset. Miasalkan seperti goodwill, hak paten, dan objek tak berwujud lainnya yang dapat dikategorikan sebagai aset lanacar dan tidak masuk dalam aset berwujud, karena objek tersebut memiliki nilai tersendiri. Ada tiga kriteria untuk mengkategorikan suatu objek ke dalam aset tidak berwujud, yaitu:

1. Apakah objek tersebut diperoleh dari transaksi dengan pihak independen? Hal ini bertujuan menghindari penilaian lebih atas aset tak berwujud.
2. Apakah manfaat ekonomis di masa depan dapat diidentifikasi? Hal ini berkaitan dengan kemampuan perusahaan mendapat keuntungan di masa datang.
3. Apakah biaya pos tersebut dapat dipisahkan dengan biaya aset lain yang diperoleh? Hal ini untuk memastikan bahwa objek yang tidak berwujud memenuhi kriteria utama untuk suatu aset.

3. Pertukaran

Dalam memenuhi definisi aset, suatu sumber ekonomis harus dapat ditukarkan dengan sumber ekonomis lainnya. Syarat ini diajukan untuk menilai seberapa besar manfaat ekonomi akan menjadi cukup pasti dan terukur dengan baik jika suatu aset tersebut memiliki nilai ukur maupun nilai tukar.

4. Dapat dipisah

Syarat dari suatu aset untuk dapat ditukarkan harus dapat dipisahkan dengan sumber ekonomis lain atau berdiri sendiri, akan tetapi argument lain menyatakan keterpisahan dan dan ketertukaran hanyalah merupakan syarat untuk memperoleh manfaat aset. Dengan argumen diatas FASB tidak memasukkan keterpisahan sebagai kreteria untuk mendefinisikan aset. Posisi keuangan harus ditentukan dengan pengukuran nilai berbagai aset dan kewajiban secara individual. Kalau syarat ini dimasukkan sebagai kriteria aset, goodwill tidak akan memenuhi syarat untuk disebut dan diakui sebagai aset.

5. Ditegakkan secara hukum

Penguasaan atau hak atas aset tidak harus didukung secara yuridis formal. Klaim seperti piutang usaha tidak harus didukung oleh dokumen yang mempunyai daya paksa secara hukum untuk memenuhi definisi aset. Meskipun demikian, hak paksa yang melekat pada hak-hak hukum bukan merupakan syarat mutlak untuk mengakui adanya aset kalau suatu entitas dapat memperoleh dan menguasai manfaat dengan cara lain.

Pengukuran

Prochazka (2011) menjelaskan sebagai berikut: *“Measurement of accounting elements is one of the crucial factors in the process of preparing financial statements, which fairly present economic activity of an accounting entity. Elements of financial statements can be measured by various attributes, corresponding to the nature of an element and the purpose for which the element has been incurred by entity. The reliability and relevance of the attribute measured are the key points of measuring assets, liabilities, equity and other elements”*.

Salah satu kriteria pengakuan aset adalah manfaat ekonomis yang akan datang dapat diukur pengukuran dapat diartikan penentuan jumlah rupiah yang harus

dilekatkan pada suatu objek aset pada saat perolehan, yang akan dijadikan data dasar untuk mengikuti aliran fisik objek tersebut. Jika suatu sumber daya yang diperoleh suatu entitas tidak handal (*reliable*) pada elemen pengukurannya, maka sumber daya tersebut tidak dapat diakui sebagai aset melainkan diakui sebagai pendapatan ketika terjadi transaksi.

Secara akuntansi (aliran informasi), aliran fisis suatu sumber ekonomik atau objek harus dipresentasi dalam jumlah rupiah sehingga hubungan antar objek bermakna sebagai informasi. *Cost* merupakan representasi kuantitatif suatu objek. *Cost* menjadi data dasar untuk mengikuti aliran fisis kegiatan ekonomik badan usaha. Sebagai aliran informasi, *cost* juga memiliki tiga tahapan perlakuan akuntansi:

1. Pengukuran (*measurement*), pengakuan (*recognition*), dan klasifikasi (*classification*) pertama kali pada saat perolehan aset. Untuk selanjutnya seluruh kegiatan dana edalam tahap ini disebut pengukuran saja.
2. Pencatatan berikutnya dalam rangka mengikuti aliran fisis aset berupa alokasi, distribusi dan penggabungan untuk kepentingan internal/manajerial atau untuk kepentingan pengekosan produk. Untuk selanjutnya seluruh kegiatan dalam tahap ini disebut penelusuran (*tracing*).
3. Pembebanan kependapatan periode berjalan atau periode periode yang akan datang. Kos yang belum menjadi beban pendapatan (*biaya*) akan tetap melekat pada objek menjadi aset badan usaha. Untuk selanjutnya seluruh kegiatan dalam tahap ini disebut pembebanan ke pendapaatan (*charging to revenues*).

Penilaian

Pengukuran adalah penentuan angka satuan pengukur terhadap suatu objek untuk menunjukkan makna tertentu objek tersebut. Ojek dapat berupa barang, jasa, binatang, tubuh manusia, dan benda atau konstruk lainnya. Makna dapat berupa nilai, luas, berat, volume,

tinggi, umur, indeks prestasi, dan sebagainya. Di dalam akuntansi istilah pengukuran dan penilaian sering tidak dibedakan karena adanya asumsi bahwa akuntansi menggunakan unit moneter untuk mengukur makna ekonomik suatu objek, pos, atau elemen. Pengukuran biasanya digunakan akuntansi untuk menunjukkan proses penentuan jumlah rupiah yang harus dicatat untuk menunjuk proses penentuan jumlah rupiah yang harus dicatat untuk objek pada saat pemerolehan. Dalam penilaian suatu pos untuk tujuan penyajian, akuntansi dapat menggunakan berbagai dasar penilaian (*bases for valuation*) bergantung pada makna yang ingin direpresentasi melalui pos statemen keuangan. Penilaian pos aset dimaksudkan untuk menentukan berapa jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada tiap pos aset dan apa dasar penilaiannya.

Tujuan Penilaian

Karena aset merupakan elemen pembentuk posisi keuangan sebagai informasi semantik sebagai investor dan kreditor, tujuan penilaian aset harus berpaut dengan tujuan pelaporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang dapat membantu investor dan kreditor dalam menilai jumlah, saat dan ketidakpastian aliran kas bersih ke badan usaha. Jadi tujuan penilaian aset adalah merepresentasi atribut pos-pos aset yang berpaut dengan tujuan pelaporan keuangan dengan menggunakan basis penilaian yang sesuai.

Konsep Dan Basis Penilaian

Hendriksen dan Van Breda (1992) dalam (Suwardjono 2005) membahas konsep dan dasar penilaian aset untuk tujuan pelaporan keuangan dari dua dimensi yaitu arah aliran aset dan waktu. Bila suatu aset telah dikuasi oleh suatu entitas, masalah penilaian yang muncul adalah dasar apa yang digunakan untuk mempresentasikan makna atau atribut aset secara tepat. Nilai yang diperoleh atas dasar pertukaran pemerolehan disebut dengan nilai masukan (*input/entry value*). Nilai masukan didasarkan atas jumlah rupiah kas atau penghasilan lainnya (non kas) yang harus dikeluarkan atau dikorbankan untuk

memperoleh aset atau objek jasa tertentu yang masuk dalam unit usaha (perusahaan). Sedangkan jika dilihat dari nilai pertukaran pemanfaatan disebut nilai keluaran (*output/exit value*). Nilai keluaran didasarkan pada jumlah rupiah kas atau penghargaan lainnya (non kas) yang diterima suatu unit usaha apabila suatu aset atau potensi jasa akhirnya keluar dari unit usaha melalui proses pertukaran atau konversi. Penilaian keluaran lebih berpaut dengan aset yang tujuannya adalah untuk dijual atau dikonversi menjadi kas dan bukan digunakan untuk kegiatan produksi.

Penilaian Menurut FASB

Konsep-konsep penilaian yang dibahas diatas menjadi dasar untuk menjelaskan berbagai dasar yang dapat digunakan untuk mengukur atau menilai elemen statement keuangan sesuai dengan atribut yang ingin direpresentasi oleh pengukuran. Bila dikaitkan dengan aset, dasar penilaian menurut FASB (SFAC No. 5, prgf 67) dapat disarikan sebagai berikut ini:

1. *Historical Cost*

Tanah, gedung, perlengkapan, perlengkapan pabrik, dan kebanyakan sediaan dilaporkan atas dasar kos historisnya yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang dikorbankan untuk memperolehnya.

2. *Current (replacement) Cost*

Beberapa sediaan disajikan sebesar nilai sekarang atau penggantinya yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang harus dikorbankan kalau aset tertentu yang sejenis diperoleh sekarang.

3. *Current Market Value*

Beberapa jenis investasi dalam surat berharga disajikan atas dasar nilai pasar sekarang yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang dapat diperoleh kesatuan usaha dengan menjual aset tersebut dalam kondisi perusahaan yang normal (tidak akan dilikuidasi).

4. *Net Realizable Value*

Beberapa jenis piutang jangka pendek dan sediaan barang disajikan sebesar nilai terrealisasi bersih yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang akan diterima (tanpa didiskon) dari aset tersebut dikurangi dengan pengorbanan (kos) yang diperlukan untuk mengkonversi aset tersebut menjadi kas atau setaranya.

5. *Present (or Discounted) Value of Future Cash Flows*

Piutang dan investasi jangka panjang disajikan sebesar nilai sekarang penerimaan kas di masa mendatang sampai piutang terlunasi (dengan tarif diskon implisit) dikurangi dengan tambahan kos yang mungkin diperlukan untuk mendapatkan penerimaan tersebut.

6. *Fair value*

Berdasarkan FAS 157, nilai wajar adalah harga yang dapat diterima untuk menjual aset atau membayar transfer kewajiban di pasaran saat tanggal pengukuran. Menurut (Yongkui 2013) *“The introduction of fair value can be attributed to the modern measurement concept, according to which, a measurement attribute which reflects the company’s real value should be introduced, so that the enterprise’s market value can be reflected as much as possible in the book value of equity. However, there is an intrinsic conflict between fair value and asset specificity, using fair value to measure specific asset will enlarge the gap between the book value and market value of the enterprise’s equity. Therefore, the future accounting model will not necessarily be dominated by fair value; rather, it is very likely to be a mixed measurement model incorporating historical cost, fair value, and value-in-use.”*

Pengakuan

Mengutip Belkaoui (1993, hlm. 194-195) menunjukkan kondisi perlu (*necessary*) dan kondisi cukup (*sufficient*) yang merupakan penguji (*test*) yang cukup rinci untuk mengakui aset yaitu:

1. Deteksi adanya aset (*Detection of Existence Test*).

Untuk mengakui aset, harus ada transaksi yang menandai timbulnya aset.

2. Sumber ekonomik dan kewajiban (*Economic Resources and Obligation Test*).

Untuk mengakui aset, suatu objek harus merupakan sumber ekonomik yang langka, dibutuhkan, dan berharga.

3. Berkaitan dengan entitas (*Entity Association Test*).

Untuk mengakui aset, kesatuan usaha harus mengendalikan atau menguasai objek aset.

4. Mengandung nilai (*Non-zero Magnitude Test*).

Untuk mengakui aset, suatu objek harus mempunyai manfaat yang dapat ditentukan besarnya secara moneter.

5. Berkaitan dengan waktu pelaporan (*Temporal Association Test*).

Untuk mengakui aset, semua penguji diatas harus dipenuhi pada tanggal pelaporan (tanggal neraca).

6. Verifikasi (*Verification Test*).

Untuk mengakui aset, harus ada bukti pendukung untuk meyakinkan bahwa kelima penguji diatas dipenuhi.

Apa yang dikemukakan Belkaoui di atas sebenarnya adalah apa yang disebut dengan kaidah pengakuan (*recognition rules*) yang merupakan petunjuk teknis atau prosedur untuk menerapkan empat kriteria pengakuan (*recognition criteria*) FASB yaitu definisi, keterukuran, keberpautan, dan keterandalan. Masalah akuntansi yang

menyangkut pengakuan biasanya berkaitan dengan masalah apakah suatu kos atau jumlah rupiah yang terlibat dalam transaksi atau kejadian tertentu dapat diasetkan. Hal ini biasanya berkaitan dengan eksplorasi minyak dan gas bumi, rugi selisih kurs valuta asing, sewa guna, riset dan pengembangan, bunga selama masa konstruksi aset tetap, dan sumber daya manusia.

Pengungkapan

Apabila sebagian atau seluruh bunga dikapitalisasi, tentu saja akan terdapat sebagian informasi yang hilang. Sehingga diperlukan adanya pengungkapan (*disclosure*) mengenai hal ini sehingga laporan keuangan dapat dipercaya dan tidak menyesatkan para penggunanya. Agar laporan keuangan tetap informatif, hal-hal yang harus diungkapkan sebagai penjabar laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Apabila tidak ada kos bunga yang dikapitalisasi, total bunga yang terjadi selama periode dibebankan sebagai biaya perioda tersebut.
2. Apabila sebagian kos bunga dikapitalisasi, bunga total yang terjadi menjadi bagian yang dikapitalisasi.

Penyajian

Prinsip akuntansi yang diterima umum, terutama standar akuntansi, menetapkan penyajian dan pengungkapan tiap pos-pos aset. Meskipun aset didefinisikan secara umum sebagai manfaat ekonomis masa depan yang dikuasai dan dikendalikan oleh entitas dan yang benar-benar timbul dari transaksi yang sah, tiap pos aset diidentifikasi lebih lanjut dan spesifik sesuai dengan sifat pos tersebut. Pengungkapan dan penyajian pos-pos aset harus dipelajari dari standar yang mengatur tiap pos. Secara umum, prinsip akuntansi yang diterima umum memberi pedoman penyajian dan pengungkapan aset sebagai berikut:

1. Aset disajikan di sisi debit atau kiri dalam neraca berformat akun atau di bagian atas dalam neraca berformat laporan.
2. Aset diklasifikasi menjadi aset lancar dan tetap.
3. Aset diurutkan penyajiannya atas dasar likuiditas atau kelancarannya, yang paling lancar dicantumkan pada urutan pertama.
4. Kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan pos-pos tertentu harus diungkapkan (misalnya metoda depresiasi aset dan dasar penilaian sediaan barang).

Aset Dalam Kacamata FASB vs SAK

Tabel 8.1 Ringkasan Komparasi Aset menurut FASB vs SAK

Elemen	Pemaknaan	FASB	SAK
Definisi	Economic Benefits	potensi jasa dari aset tersebut	manfaat ekonomi yang diharapkan mengalir ke badan usaha
	Pemaknaan kata "cukup pasti (probable)	Menekankan kata ini dalam pendefinisian	Menekankan kata ini dalam kriteria pengakuan
	Objek pengakuan: dikuasai oleh perusahaan, tidak harus dimiliki oleh perusahaan	menyatakan bahwa objek akan diakui sebagai aset apabila objek tersebut dikuasai oleh perusahaan, tidak harus dimiliki oleh perusahaan. Konsep yang mendukung untuk argumen ini adalah konsep dasar substansi mengungguli bentuk yuridis (<i>substance over form</i>).	Sama
	Kriteria "akibat"	memiliki kriteria	Sama

Elemen	Pemaknaan	FASB	SAK
	transaksi masa lalu”	“akibat transaksi atau peristiwa masa lalu”.	
Pengukuran	Usulan kriteria dan dasar pengukuran	mengusulkan dasar pengukuran yang sama untuk digunakan sesuai dengan makna yang diinginkan.	Sama
Pengakuan		empat kriteria fundamental untuk melakukan pengakuan, yaitu <i>definitions, measurability, relevance, reliability</i>	dua kriteria utama untuk melakukan pengakuan, yaitu memenuhi definisi dan keterukuran
			SAK menyatakan bahwa pos yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui Jika: (1) ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan; dan (2) pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
Penyajian	Penyajian aset	a) Aset disajikan di sisi debit atau kiri dalam neraca berformat akun atau di bagian atas dalam neraca	Sama

Elemen	Pemaknaan	FASB	SAK
		<p>berformat laporan.</p> <p>b) Aset diklasifikasi menjadi aset lancar dan tetap.</p> <p>c) Aset diurutkan penyajiannya atas dasar likuiditas atau kelancarannya, yang paling lancar dicantumkan pada urutan pertama.</p> <p>d) Kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan pos-pos tertentu harus diungkapkan (misalnya metoda depresiasi aset tetap dan dasar penilaian sediaan barang).</p>	

Daftar Pustaka

- Belkaoui, Ahmed Riahi. Accounting Theory. Fouth Worth: The Dryden Press, 1993.
- Financial Accounting Standards Board (FASB). Statement of Financial Accounting Concepts. Homewood, IL: Irwin, 1991.
- Procházka, D. (2011). "The Role Of Fair Value Measurement In The Recent Financial Crunch." Prague Economic Papers 1(1): 71-88.
- Suwardjono (2005). Teori Akuntansi. Yogyakarta, BPFE Yogyakarta.
- Yongkui, Z. (2013). "Financial Accounting Measurement Concept, Asset Specificity, and the Application of Fair Value to Ecotourism Enterprises " Journal of Convergence Information Technology(JCIT) 8 (1).

Profil Penulis



Layly Dwi Rohmatunnisa', S.Pd., M.Akun

Penulis mulai menekuni bidang akuntansi dan manajemen sejak tahun 2009. Hal tersebut saat penulis memutuskan untuk masuk ke Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 2 Blitar dengan jurusan akuntansi dan berhasil lulus pada tahun 2012. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi jurusan Pendidikan Akuntansi di Universitas Negeri Malang dan berhasil menyelesaikan studi tahun 2016. Kemudian, tahun 2018 penulis berhasil menyelesaikan studi S2 di prodi Akuntansi konsentrasi Akuntansi Manajemen di Universitas Negeri Malang. Mulai saat itu penulis mulai terjun ke dunia pendidikan dan mulai serius melakukan penelitian dan menulis artikel di bidang akuntansi dan atau manajemen. Peneliti mulai aktif menulis sebagai penunjang untuk menjadi dosen profesional dan memberikan kontribusi positif untuk perkembangan dunia pendidikan di Indonesia.

Email Penulis: r.laylydwi@gmail.com

KONSEP LIABILITAS DAN EKUITAS

Aniek Murniati, S.Sos., M.SA

Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang

Pengertian Liabilitas

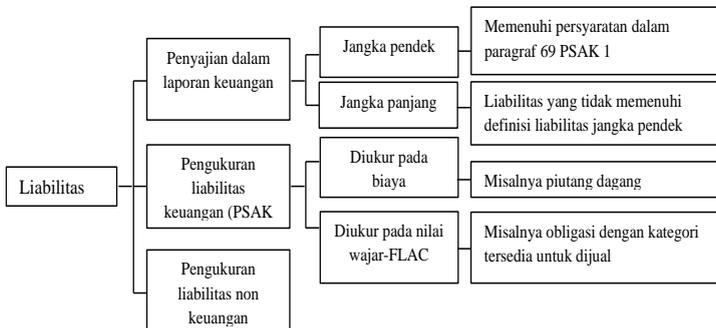
Menurut IFRS (PSAK 57), liabilitas adalah kewajiban kini dari perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaian yang diharapkan dapat menghasilkan arus keluar dari sumber daya perusahaan dalam mewujudkan manfaat ekonomi. Berdasarkan pengertian diatas dapat difahami secara sederhana bahwa liabilitas adalah kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak lain untuk mendapatkan nilai ekonomi. Contohnya utang pembelian persediaan barang dagangan secara kredit makan akan menimbulkan utang. Beberapa contoh liabilitas selain hutang dagang adalah utang sewa gedung, utang pajak, dan masih banyak contoh lainnya. Di dalam akuntansi, liabilitas merupakan salah satu komponen persamaan dasar akuntansi, yaitu: *Aset = Liabilitas + Ekuitas*.

Dari rumus ini dapat dipahami bahwa liabilitas berbanding terbalik dengan aset. Untuk setiap hak yang dimiliki perusahaan atas aset, terdapat kewajiban atau liabilitas atas aset tersebut. Hal ini dapat dijelaskan bahwa aset adalah sumber daya atau kekayaan perusahaan yang peruntukannya untuk menghasilkan pendapatan, sedangkan liabilitas adalah kewajiban kepada pihak lan. Berdasarkan pengertian liabilitas dlam

PSAK 57, agar mudah diahami liabilitas memiliki karakteristik antara lain:

1. Kewajiban adalah hasil dari transaksi di masa lalu yang menimbulkan tanggung jawab.
2. Kewajiban merupakan bentuk pinjaman dari perorangan atau lembaga yang diperuntukkan sebagai alat untuk meningkatkan pendapatan.
3. Kewajiban harus diselesaikan dengan cara mentransfer sejumlah aset, baik berupa layanan atau lainnya.
4. Kewajiban memiliki konsekuensi dan kebijakan, dimana salah satu pihak tidak menyelesaikan tugasnya.

Menurut Kerangka Dasar Pengukuran dan Pengungkapan Laporan Keuangan (KDP2LK) liabilitas adalah utang entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus kas keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Setiap utang mempunyai konsekuensi berupa kemungkinan menyerahkan aset atau menyediakan jasa. Karakteristik esensial dari liabilitas yaitu (1) entitas mempunyai utang masa kini, (2) timbul sebagai akibat dari transaksi atau peristiwa masa lalu, dan (3) dapat diukur atau dinyatakan jumlahnya ke dalam unit moneter.



Sumber: Akuntansi Keuangan Menengah (Berdasarkan SAK) (Bahri, dkk, 2021)
Peraga 9.1 Penyajian dan Pengukuran Liabilitas

PSAK 1 mengharuskan entitas menyajikan liabilitas jangka pendek terpisah dari liabilitas jangka panjang. Entitas perbankan atau keuangan dapat menyajikan liabilitas berdasarkan urutan likuiditasnya dan tanpa memisahkan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Menurut PSAK 1 kriteria klasifikasi liabilitas jangka pendek sebagai berikut:

1. Entitas mengharapkan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus akuntansi normalnya.
2. Entitas memiliki liabilitas untuk tujuan diperdagangkan.
3. Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan.
4. Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian utang selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan.

Untuk tujuan pengukuran, liabilitas dikategorikan ke dalam dua kategori yaitu (1) liabilitas dapat diketahui nilainya dengan pasti seperti utang usaha, utang wesel, utang jangka panjang yang akan jatuh tempo pada periode berikutnya, pendapatan diterima dimuka, utang terkait imbalan kerja, utang pajak penghasilan, beban yang masih harus dibayar, dan (2) jenis liabilitas yang nilainya diukur dengan estimasi seperti provisi (Bahri, dkk, 2021).

Pengukuran atau penilaian utang menyangkut ketidakpastian karena berdasarkan pengertian utang berkaitan dengan arus keluar sumber daya yang bermanfaat potensial di masa mendatang. Utang yang termasuk kategori nilainya dengan pasti baik eksistensi liabilitas maupun jumlah yang harus dibayar untuk penyelesaian maka keduanya sudah dapat ditentukan pada saat terjadinya utang karena adanya kontrak, perjanjian, dan dokumen transaksi. Utang yang termasuk kategori nilainya diukur dengan estimasi merupakan setiap utang yang eksistensi liabilitas sudah pasti, namun jumlah yang sesungguhnya dari utang tersebut tidak atau belum dapat ditentukan pada saat terjadinya utang atau

saat timbulnya utang. Jumlah atau nilai moneter dari utang harus diestimasi sehingga dapat disajikan di dalam laporan keuangan meskipun dalam jumlah yang diperkirakan.

Jenis-Jenis Liabilitas

Liabilitas dibagi menjadi tiga berdasarkan jangka waktu pembayarannya, yaitu:

1. Liabilitas Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang jatuh tempo pembayarannya kurang dari satu tahun. Di neraca, kewajiban lancar dicatat terpisah dengan kewajiban tidak lancar. Contoh liabilitas lancar diantaranya

- a. Utang dagang, yaitu liabilitas atau kewajiban yang berasal dari transaksi pembelian barang atau jasa untuk dijual.
- b. Utang wesel, yaitu kewajiban berbunga dengan jaminan tertentu, yang jatuh tempo kurang dari satu tahun, serta tercantum dalam peraturan tertulis.
- c. Utang biaya, yaitu kewajiban atas beban perusahaan yang belum dibayarkan secara tunai.
- d. Utang pajak, yaitu kewajiban atas pajak yang belum disetorkan kepada pemerintah.
- e. Pendapatan dibayar muka, yaitu kewajiban yang muncul karena pembayaran sudah diterima oleh perusahaan namun pekerjaannya belum diselesaikan kepada pelanggan.
- f. Utang dividen, yaitu kewajiban perusahaan yang harus dibayar kepada para pemegang saham dan lain-lain.

2. Liabilitas Jangka Panjang

Kewajiban atau liabilitas tidak lancar atau kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang jatuh temponya lebih dari satu tahun. Biasanya kewajiban jangka panjang diambil perusahaan untuk pengembangan bisnis dan investasi. Karena usia

pinjaman lebih dari satu tahun, kewajiban jangka panjang mensyaratkan beberapa batasan untuk melindungi kedua belah pihak.

Liabilitas jangka panjang memiliki peran yang penting dalam menentukan solvabilitas perusahaan. Apabila perusahaan belum mampu menyelesaikan kewajiban jangka panjangnya, maka perusahaan memiliki status krisis solvabilitas. Contoh kewajiban jangka panjang diantaranya:

- a. Utang hipotik, yaitu kewajiban jangka panjang yang jaminannya berupa properti
- b. Utang obligasi, yaitu kewajiban berupa surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan, yang jatuh temponya minimal satu tahun
- c. Kredit noveltasi, yaitu kewajiban jangka panjang yang diterbitkan oleh bank
- d. Utang sewa, yaitu kewajiban atas penyewaan aset untuk masa lebih dari satu tahun

3. Liabilitas Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi biasa juga disebut sebagai kewajiban berdasarkan kejadian luar biasa. Kewajiban kontinjensi berpotensi timbul karena peristiwa di masa lalu, namun belum pasti akan muncul sebagai kewajiban. Kewajiban ini tidak sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan. Di akuntansi, kewajiban kontinjensi tidak dicatat dalam laporan keuangan, namun sebagai catatan tambahan di bagian lampiran. Ada dua syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban ini bisa dicatat, yaitu: Kewajiban itu sangat mungkin terjadi atau kekayaan perusahaan telah digunakan atau telah dikorbankan, Kewajiban itu dapat diukur secara terpercayanya. Contoh kewajiban kontinjensi diantaranya gugatan terhadap kerusakan produk, garansi pembelian, hingga tuntutan ke pengadilan.

Jenis Liabilitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 9.1 Jenis-jenis likuiditas

Jenis Liabilitas	Penjelasan
Utang dagang (<i>account receivable/trade receivable</i>)	Utang yang timbul ketika entitas melakukan pembelian secara tunai.
Utang bank jangka pendek	Utang yang diperoleh dari bank dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang.
Wesel bayar	Kontrak yang menyatakan bahwa 1 pihak akan melakukan pembayaran sejumlah tertentu kepada pihak lain di masa mendatang.
Utang pajak	Pihak yang belum dibayarkan ke kas negara.
Utang dividen	Dividen yang telah diumumkan namun belum dibayarkan.
Beban yang masih harus dibayar	Beban yang telah terjadi namun sampai tanggal pelaporan belum dibayarkan.
Pendapatan diterima di muka	Pendapatan yang telah diterima secara tunai namun pendapatannya belum diperoleh.
Utang terkait gaji karyawan	Beban gaji yang telah terjadi namun belum dibayarkan.
Uang muka pelanggan (deposit)	Uang yang dibayarkan pelanggan sebagai deposit dan akan diberikan kembali kepada pelanggan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa liabilitas atau kewajiban dapat disajikan dalam berbagai bentuk antara lain:

- a. Utang usaha, adalah suatu kewajiban jangka pendek untuk membayar pihak lain atas pembelian produk atau persediaan yang dibeli secara kredit. Utang usaha ini ada perjanjian

kredit yang nanti juga akan menimbulkan denda jika ada keterlambatan pembayaran dan diskon jika pembayaran pada masa potongan. Perusahaan mencatat hutang dagang dalam buku pembantu hutang untuk mencegah beberapa transaksi mengacaukan buku besar.

- b. Hutang Bank atau Hutang Jangka Pendek Utang yang diperoleh dari bank dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang, yang timbul sebagai akibat pinjaman yang diberikan bank kepada perusahaan yang didasarkan atas permohonan perusahaan yang bersangkutan.
- c. Wesel Bayar, Kontrak yang menyatakan bahwa 1 pihak akan melakukan pembayaran sejumlah tertentu kepada pihak lain di masa mendatang. Wesel bayar ini berupa dokumen tertulis yang digunakan sebagai pernyataan bahwa perusahaan benar memiliki hutang terhadap pihak tertentu.
- d. Utang Pajak, pajak yang harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak.
- e. Hutang deviden, bagian dari laba perusahaan yang diputuskan untuk dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk deviden atau Dividen yang telah diumumkan namun belum dibayarkan.
- f. Beban yang masih harus dibayar, Beban yang telah terjadi namun sampai tanggal pelaporan belum diperoleh, belum dibayarkan.
- g. Pendapatan Diterima dimuka, Pendapatan yang telah diterima secara tunai namun pendapatannya belum diperoleh.
- h. Utang Gaji Karyawan, Beban gaji yang telah terjadi namun belum dibayarkan
- i. Utang Uang Muka Pelanggan/Deposit, Uang yang dibayarkan pelanggan sebagai deposit dan akan diberikan kembali kepada pelanggan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Kewajiban yang masih harus dibayar adalah tanggung jawab yang telah diambil oleh bisnis, biasanya tanpa dokumen pendukung, seperti faktur pemasok.

Misalnya, kewajiban yang masih harus dibayar muncul ketika perusahaan menggunakan produk atau layanan sebelum menerima faktur pemasok. Departemen akuntansi biasanya mencatat kewajiban yang masih harus dibayar jika faktur tidak sampai pada akhir periode akuntansi. Departemen keuangan membuat entri jurnal, yang merupakan kredit ke akun kewajiban yang masih harus dibayar dan debit ke akun pengeluaran. Departemen akuntansi membuat banyak akun kewajiban yang masih harus dibayar sebagai akrual terbalik untuk memungkinkan perangkat lunak akuntansi membatalkannya pada periode akuntansi berikutnya.

Konsep Ekuitas

Pengertian Ekuitas

Pandangan akuntansi tentang konsep kepemilikan tertuang dalam PSAK no.21 yang membahas tentang akuntansi ekuitas. Di dalam PSAK no.21 tersebut dinyatakan bahwa ekuitas merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada, dan dengan demikian tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan tersebut. Definisi ekuitas pada dasarnya adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam definisi diatas menunjukkan bahwa ekuitas bukan pengorbanan sumber ekonomik masa datang. Karena definisi diatas bergantung pada bagaimana aset dan kewajiban diukur. Definisi ekuitas mengesankan bahwa ekuitas adalah sumber pendanaan dari berbagai sumber selain dari utang. Ekuitas adalah sejumlah uang yang akan dikembalikan kepada pemegang saham suatu perusahaan, jika seluruh asset perusahaan dicairkan dan seluruh hutang perusahaan dibayar. Nilainya ditentukan dari total pencairan seluruh asset perusahaan dikurangi dengan total hutang perusahaan yang harus dibayar.

Tujuan dari pelaporan ekuitas pemegang saham dalam suatu perusahaan adalah agar dapat menyediakan

informasi kepada yang berkepentingan mengenai efisiensi dan pengurusan manajemen perusahaan.

a. Karakteristik Ekuitas

Ekuitas sama dengan aktiva neto, yaitu selisih antar ktiv perusahaan dengan hutang perusahaan. Ekuitas dapat bertambah atau berkurang karena kenaikan atau penurunan aktiva neto baik yang berasal dari sumber bukan pemilik (pendapatan dan biaya) maupun investasi oleh pemilik atau distribusi pada pemilik. Ekuitas menyediakan informasi kepada yang berkepentingan tentang efisiensi dan kepengurusan manajemen. Menyediakan informasi tentang riwayat serta prospek investasi pemilik dan pemegang ekuitas lainnya. Serta tanggungjawab yuridis pemilik. Informasi yang harus disampaikan terkait tentang euitas pemegang saham minimal dalah sumber ekuitas, pembatasan pembagian deviden dan likuidasi. Elemen-elemen ekuitas

- 1) Modal disetor
- 2) Modal saham (Capital Stock sebagi modal yuridis)/ Legal Capital
- 3) Modal setoran tambahan (additional pai-incapitl
- 4) Modal setoran lain
- 5) Laba Ditahan

Sebuah laba kotor dari sebuah bisnis atau perusahaan dimana laba itu sendiri belum diperhitungkan untukdibagi keberbagai sector yang berhk menerima dana seperti pemegang saham atau investor.

b. Teori Ekuitas

Teori yang menjelaskan sudut pandang yang digunakan dalam akuntansi berkaitan dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dengan kata lain, penyusunan dan penyajian laporan keuangan sangat tergantung pada sudut pandang yang digunakan yaitu siapa yang dianggap paling berkepentingan terhadap laporan keuangan.

c. Teori Pemilikan

Pada awalnya teori ini muncul sebagai perwujudan dari sistem pembukuan berpasangan. Teori ini memusatkan perhatiannya kepada pemilik. Persamaan akuntansi yang digunakan: $\Sigma \text{aset} - \Sigma \text{liabilitas} = \text{Modal}$

Aset merupakan kekayaan pemilik, sementara hutang merupakan kewajiban pemilik. Kepemilikan dianggap sebagai nilai bersih dari perusahaan untuk pemilik. Selama berjalannya usaha maka nilai perusahaan sama dengan investasi awal ditambah akumulasi laba bersih setelah dikurangi prive untuk pemilik. Jadi teori proprietary menganut teori proprietary sangat cocok diterapkan untuk organisasi perusahaan perseorangan dan firma oleh karena dalam bentuk organisasi ini ada hubungan personal antara manajemen perusahaan dengan pemilik perusahaan. Hal ini disebabkan teori proprietary tidak dapat langsung digunakan untuk bentuk perusahaan perseorangan terbatas seperti halnya untuk perusahaan perseorangan dan firma. Konsep laba komprehensif yang diadopsi FASB juga menggunakan dasar teori proprietary yaitu memasukkan semua item yang mempengaruhi pemilik selama periode itu kecuali pengambilan dividen dan transaksi modal.

d. Teori Entitas

Teori entitas muncul untuk mengatasi kelemahan yang melekat pada teori proprietary. Perkembangan saat ini kenyataannya kegiatan usaha menyebabkan perusahaan menjadi unit usaha yang berdiri sendiri terpisah dari identitas pemilik. Hal ini berarti terdapat pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan perusahaan. Dengan demikian, transaksi/ kejadian yang dicatat dan dipertanggung jawabkan adalah transaksi yang melibatkan perusahaan. Perusahaan dianggap bertindak atas nama kepentingannya sendiri terpisah dari pemilik. Teori entitas didasarkan atas persamaan akuntansi:

$$\Sigma \text{aset} = \Sigma \text{utang} + \Sigma \text{modal}$$

Elemen yang ada pada sisi kanan persamaan sering disebut hutang, tetapi sesungguhnya adalah ekuitas dengan hak yang berbeda di dalam persamaan. Perbedaan utama antara hutang dan ekuitas pemilik adalah hak kreditur dapat dinilai secara independen dari penilaian yang lain jika perusahaan dalam keadaan solvent. Hak pemegang saham/ pemilik diukur dari penilaian aset yang diinvestasikan kembali. Jadi, hutang adalah kewajiban khusus perusahaan, dan aset menunjukkan hak perusahaan menerima barang barang dan jasa khusus atau manfaat lainnya.

Penilaian aset harus mencerminkan pengukuran manfaat yang diterima oleh perusahaan. Laba bersih suatu perusahaan umumnya diekspresikan dalam bentuk perubahan bersih modal pemilik, tidak termasuk perubahan yang berasal dari deklarasi dividen dan transaksi modal.

Hal ini tidak sama dengan teori proprietary yang mengatakan bahwa laba bersih adalah laba bagi pemegang saham. Laba bersih dalam konsep entitas menggambarkan sisa perubahan posisi ekuitas setelah dikurangi semua klaim, termasuk bunga hutang jangka panjang dan pajak penghasilan. Perbedaan antara teori proprietary dan teori entitas menimbulkan perbedaan dalam melakukan penilaian aset. Dengan teori proprietary, aset harus dinilai dengan nilai sekarang (*current value*) oleh karena ekuitas pemilik dianggap sebagai kekayaan bersih. Sedangkan dengan teori entitas, perusahaan tidak berhubungan dengan nilai sekarang oleh karena penekanannya adalah akuntabilitas cost kepada pemilik atau pemegang saham lainnya. Dengan demikian dasar pengukuran yang relevan adalah historical cost.

Daftar Pustaka

- Bahri, S. (2020). *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS* (I. Radhitya (ed.); 3rd ed.). Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Bahri, S., Wahyuningsih, S. D., & Muslichah. (2021). *Akuntansi Keuangan Menengah (Berdasarkan SAK)* (1st ed.). Mitra Wacana Media.
- Hanafi, M, Mamduh, dan Halim, Abdul. (2016). Analisis Laporan Keuangan. *BPFE*. Yogyakarta
- Martani, Dwi. Dkk. (2016). Akuntansi Keuangan Menengah. *Salemba Empat*. Jakarta.
- Keiso, Donald E. Weygandt, Jerry J. Warfield, Terry D. (2007). *Akuntansi Intermediate*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2014. *Standar Akuntansi Keuangan*. Penerbit Salemba, Jakarta.

Profil Penulis



Aniek Murniati, S.Sos., M.SA

Ketertarikan penulis terhadap ilmu ekonomi dan akuntansi dimulai pada tahun 2001 silam. Hal tersebut membuat penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Brawijaya dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Administrasi Bisnis pada tahun 2001. Sebelumnya, penulis berhasil menyelesaikan sekolahnya di SMA Negeri 2 Bojonegoro dan lulus pada tahun 1996. Setelah mendapat gelar S1 di Universitas Brawijaya, penulis melanjutkan studi S2 jurusan akuntansi di universitas yang sama.

Penulis memiliki kepakaran di bidang teori akuntansi, komputer akuntansi, bisnis, akuntansi manajemen, sistem informasi akuntansi. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: aniek051078@gmail.com

KONSEP PENDAPATAN

Dr. Riyanto Setiawan Suharsono, SE., M.SA., Ak., CA., CSRS.

Universitas Muhammadiyah Jember

Pengertian

Ikatan Akuntan Indonesia memberikan pengertian pendapatan yaitu sebagai keuntungan ekonomi yang dihasilkan suatu entitas selama periode akuntansi yang menunjukkan arus kas masuk atau naiknya aset, penurunan kewajiban yang harus dibayarkan, yang berdampak pada naiknya jumlah modal. Keuntungan ekonomi tersebut juga dihasilkan dari berbagai macam aktivitas yang dilakukan oleh entitas seperti penjualan, komisi, bunga, dividen, royalti dan sewa.

Konsep pendapatan menurut PSAK No. 23 tahun 2017 menerangkan bahwa, “Pendapatan adalah arus kas masuk dari kegiatan atau transaksi ekonomi yang dilakukan suatu entitas yang menyebabkan kenaikan modal entitas yang tidak diakibatkan karena penambahan modal”. Untuk selanjutnya aturan mengenai pendapatan dalam PSAK No. 23 tahun 2017 direvisi dan digantikan dalam PSAK No. 72 tahun 2020.

Organisasi internasional seperti *Financial Accounting Standards Board* (FASB) menyatakan konsep pendapatan adalah peningkatan arus masuk atau peningkatan aset entitas dan penurunan kewajiban entitas yang berasal dari transaksi yang dilakukan seperti pengiriman dan produksi barang / jasa dan aktivitas lainnya yang berasal dari operasional entitas kecuali penambahan investasi atau modal dari pemilik.

Definisi pendapatan menurut *Accounting Principle Board* merupakan peningkatan jumlah aset dan penurunan jumlah kewajiban serta pengukuran dengan menggunakan prinsip akuntansi diterima umum yang dihasilkan dari beberapa aktivitas transaksi untuk menghasilkan keuntungan yang akan menambah modal dari perusahaan.

Pendapatan dalam Ilmu Ekonomi mempunyai pengertian bahwa hasil kelola terkait aset yang telah digunakan oleh masyarakat dalam suatu waktu tertentu akan mendapatkan hasil kelola yang sama kondisinya di masa yang akan datang. Ini menunjukkan bahwa ada perubahan dalam aset dan kekayaan yang dikelola selama periode waktu tertentu.

Proses Pendapatan

Ditinjau dari proses terjadinya, maka proses pendapatan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Proses Pembentukan Pendapatan (*Earning Process*)

Suatu proses pembentukan pendapatan yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan untuk mencapai hasil usaha yang diharapkan yang meliputi kegiatan produksi, kegiatan pemasaran, kegiatan pengumpulan piutang dan kegiatan-kegiatan lainnya yang ikut memberikan kontribusi dalam hasil akhir pendapatan dengan dikurangi biaya yang dikeluarkan.

2. Proses Realisasi Pendapatan (*Realization Process*)

Suatu proses pembentukan pendapatan yang berasal dari kegiatan sesudah produk selesai dibuat dan dijual dalam suatu kontrak penjualan. Jadi pendapatan disini terjadi ketika sudah memasuki tahap akhir produksi dan produk siap untuk diserahkan kepada konsumen. Jika kontrak penjualan telah dilakukan sebelum produk selesai dan pendapatan belum diterima, maka belum bisa dikatakan pendapatan telah terjadi.

Manfaat Pendapatan

Pendapatan biasanya ditunjukkan dalam laporan laba rugi yang mencerminkan kinerja dan keberhasilan perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Laporan laba rugi memperlihatkan pendapatan yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode akuntansi dan biaya yang harus dikeluarkan selama periode tersebut serta akhir periode yang mencatat adanya laba usaha perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, pendapatan mempunyai beberapa manfaat, yaitu :

1. Sebagai pengukur kinerja dan keberhasilan manajemen perusahaan.

Manfaat sebagai alat pengukur akan terlihat saat semakin tinggi pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan yang akan menunjukkan keberhasilan perusahaan.

2. Sebagai alat pembanding antara modal yang disetor dengan penghasilan yang didapat dari hasil usaha.

Manfaat yang dihasilkan yaitu dengan membandingkan modal yang telah disetor oleh pemilik (*owner*) dengan hasil usaha yang berasal dari operasional perusahaan.

3. Sebagai alat untuk memprediksi besarnya deviden yang dibagikan kepada pemegang saham di masa yang akan datang.

Manfaat sebagai alat yang memprediksi besarnya deviden bisa diketahui dari besar dan kecilnya pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan.

Karakteristik Pendapatan

Suwardjono (2010) menjelaskan pendapatan mempunyai karakteristik tertentu yang berasal dari transaksi dan operasional yang dilakukan oleh entitas yang terdiri dari:

1. Arus kas masuk atau kenaikan aset entitas

Kenaikan ini disebabkan karena adanya transaksi yang dilakukan yang berasal dari pengiriman dan produksi barang / jasa ke konsumen yang menimbulkan aliran dana masuk dari konsumen sehingga menciptakan keuntungan atau laba bagi entitas yang terkait.

2. Kegiatan yang menunjukkan operasional entitas yang terus-menerus.

Kegiatan ini menunjukkan hasil penjualan barang dan jasa yang merupakan kegiatan utama dari suatu entitas.

3. Pelunasan kewajiban, penurunan kewajiban dan pengurangan kewajiban.

Kegiatan ini disebabkan karena adanya pembayaran hutang, pembayaran uang muka, dan pelaksanaan pengiriman barang / jasa ke konsumen.

4. Dihasilkan oleh suatu entitas

Kegiatan ini disebabkan karena adanya kenaikan aset yang berdampak pada pendapatan suatu entitas.

5. Hasil penjualan produk

Kegiatan usaha dari entitas yang menghasilkan produk fisik yang diperjualbelikan yang menghasilkan suatu pendapatan

6. Pertukaran produk

Kegiatan yang merupakan hasil transaksi atau pertukaran produk dengan pihak lain.

7. Menyandang beberapa nama atau mengambil beberapa bentuk

Kegiatan entitas yang meliputi beberapa pos dengan menggunakan berbagai bentuk dan nama apapun.

Sumber Pendapatan

Sumber pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan pada umumnya terdiri dari:

1. Pendapatan Operasional

Pendapatan perusahaan yang dihasilkan dari kegiatan usaha perusahaan, baik dari hasil penjualan atau penyerahan barang/jasa ke konsumen. Pendapatan ini bersifat normal sesuai dengan sifat dan tujuan perusahaan serta dapat terjadi secara berulang-ulang selama perusahaan menjalankan kegiatannya.

Pendapatan operasional ini berbeda-beda sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan oleh perusahaan. Salah satu sumber utama pendapatan operasional perusahaan berasal dari penjualan barang / jasa ke konsumen yang merupakan usaha utama dari perusahaan.

Penjualan ini dapat dibedakan dalam bentuk:

- a. Penjualan kotor yaitu merupakan semua hasil atau penjualan barang-barang maupun jasa sebelum dikurangi dengan berbagai potongan-potongan atau pengurangan lainnya untuk dibebankan kepada pelanggan atau yang membutuhkannya.
- b. Penjualan bersih yaitu merupakan hasil penjualan yang sudah diperhitungkan atau dikurangkan dengan berbagai potongan-potongan yang menjadi hak pihak pembeli.

Jenis pendapatan operasional timbul dari berbagai cara, yaitu:

- a. Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilaksanakan sendiri oleh perusahaan tersebut.

- b. Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha dengan adanya hubungan yang telah disetujui, misalnya penjualan konsinyasi.
 - c. Pendapatan dari kegiatan usaha yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan para investor.
2. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan perusahaan yang dihasilkan dari sumber lain di luar kegiatan usaha perusahaan yang bisa disebut juga sebagai pendapatan lain-lain. Jenis pendapatan non operasional ini dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Pendapatan yang diperoleh dari penggunaan aktiva atau sumber ekonomi perusahaan oleh pihak lain yaitu:
 - 1) Bunga yaitu pembebanan untuk penggunaan kas atau setara kas atau jumlah terutang kepada entitas;
 - 2) Royalti yaitu pembebanan untuk penggunaan asset jangka panjang entitas, sebagai contoh paten, merek dagang, hak cipta, dan piranti lunak computer; dan
 - 3) Dividen yaitu distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan proporsi kepemilikan mereka atas kelompok modal tertentu.
- b. Pendapatan yang diperoleh dari penjualan aktiva di luar barang dagangan atau hasil produksi. Contohnya: penjualan surat – surat berharga, penjualan aktiva tak berwujud.

Penilaian Pendapatan

Menurut SFAC (*Statement of Financial Accounting Concept*) No. 5 terdapat empat kriteria yang harus dipenuhi sebelum suatu item dapat diakui, yaitu:

1. *Definisi*, item dalam pertanyaan harus memenuhi definisi dalam satu dari tujuh unsur laporan keuangan, yaitu: aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian.
2. *Dapat diukur*, item tersebut harus memiliki atribut relevan yang dapat diukur secara andal, yakni karakteristik, sifat atau aspek yang dapat dikuantifikasikan dan diukur. Contohnya biaya historis, biaya sekarang ini, nilai pasar, nilai bersih yang dapat direalisasi dan nilai sekarang.
3. *Relevansi*, informasi mengenai item tersebut mampu membuat suatu perbedaan dalam pengambilan keputusan.
4. *Realibilitas*, informasi mengenai item tersebut dapat digambarkan secara wajar, dapat diuji dan netral.

Pedoman penilaian pendapatan telah diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan yang mengatur bagaimana suatu transaksi akan diperhitungkan dan dicatat sebagai suatu pendapatan untuk kemudian dimasukkan ke dalam salah satu akun di suatu laporan keuangan. Dasar penilaian pendapatan, yaitu:

1. Biaya Historis (*Historical Cost*) yaitu metode penilaian aset dan kewajiban yang berdasarkan pada nilai aset dan kewajiban pada saat perolehan bukan nilai saat ini. Aset dicatat sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh asset tersebut pada saat perolehan. Liabilitas dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau dalam keadaan tertentu (sebagai contoh, pajak penghasilan), pada jumlah kas atau setara kas yang diekspektasikan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha yang normal.
2. Biaya Kini (*Current Cost*) yaitu metode penilaian aset dan kewajiban yang berdasarkan pada nilai aset dan kewajiban sekarang atau saat ini. Aset

dicatat sebesar jumlah kas atau setara kas yang seharusnya akan dibayarkan jika asset yang sama atau asset yang setara diperoleh sekarang. Liabilitas dicatat sebesar jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini.

3. Nilai Realisasi atau Penyelesaian (*Realization/Settlement Value*) yaitu aset dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang sama atau setara aset yang sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal. Aset dicatat sebesar jumlah kas atau setara kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal. Liabilitas dicatat sebesar nilai penyelesaiannya; yaitu, jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan yang diekspektasikan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal.
4. Nilai Sekarang (*Present Value*), aset dinyatakan sebesar kas masuk bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan bisa memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Aset dicatat sebesar arus kas masuk neto masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diekspektasikan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Liabilitas dicatat sebesar arus kas keluar neto masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang yang diekspektasikan akan diperlukan untuk menyelesaikan liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal.

Dasar pengukuran yang lazimnya digunakan entitas dalam penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis. Ini biasanya digabungkan dengan dasar pengukuran yang lain. Sebagai contoh, persediaan biasanya dicatat sebesar nilai terendah dari biaya historis atau nilai terealisasi neto (*lower of cost or net realizable value*), sekuritas yang dapat dipasarkan dapat dicatat

sebesar nilai pasarnya, dan liabilitas dicatat sebesar nilai sekarang. Selain itu, beberapa entitas menggunakan dasar biaya kini sebagai respon dari ketidakmampuan model akuntansi biaya historis dalam menghadapi dampak perubahan harga asset non-moneter.

Pengakuan Pendapatan

Menurut PSAK No. 23 Tahun 2017 kriteria pengakuan pendapatan biasanya diterapkan secara terpisah pada setiap transaksi. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kriteria pengakuan tersebut pada komponen-komponen yang dapat diidentifikasi secara terpisah dari suatu transaksi tunggal, agar mencerminkan substansi dari transaksi tersebut. Contohnya, jika harga penjualan dari suatu produk termasuk jumlah yang dapat diidentifikasi untuk jasa berikutnya, maka jumlah tersebut ditangguhkan dandiakui sebagai pendapatan selama periode jasa tersebut dilaksanakan. Sebaliknya, kriteria pengakuan diterapkan pada dua atau lebih transaksi bersama-sama jika transaksi tersebut terkait sedemikian rupa sehingga pengaruh komersialnya tidak dapat dimengerti tanpa melihat pada rangkaian transaksi tersebut secara keseluruhan. Sebagai contoh, entitas menjual barang, dan pada saat yang sama menyetujui perjanjian yang terpisah untuk membeli kembali barang tersebut barang tersebut di kemudian hari, sehingga meniadakan pengaruh substantive dari transaksi tersebut, dalam hal ini kedua transaksi tersebut diberlakukan bersamaan.

Pengakuan pendapatan dari suatu peristiwa ekonomi dapat dilakukan apabila terpenuhi kondisi sebagai berikut:

1. Penjualan Barang

PSAK Nomor 23 Tahun 2017 menjelaskan bahwa entitas harus mengakui pendapatan dari suatu penjualan barang jika semua kondisi berikut dipenuhi:

- a. Entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli;
- b. Entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual;
- c. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal;
- d. Kemungkinan besar manfaat ekonomik yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas; dan
- e. Biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur secara andal.

2. Penjualan Jasa

Dalam PSAK Nomor 23 Tahun 2017 mengenai pengakuan pendapatan atas transaksi penjualan jasa adalah sebagai berikut: jika hasil transaksi yang terkait dengan penjualan jasa dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada akhir periode pelaporan. Hasil transaksi dapat diestimasi secara andal jika seluruh kondisi berikut ini dipenuhi:

- a. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal.
- b. Kemungkinan besar manfaat ekonomik sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas.
- c. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal.
- d. Biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur secara andal.

Jika hasil transaksi terkait dengan penjualan jasa tidak dapat diestimasi secara andal maka pendapatan diakui hanya sebesar beban yang telah diakui yang dapat dipulihkan. Selama tahap awal transaksi, hasil dari suatu transaksi sering kali tidak dapat diestimasi secara andal. Namun demikian, besar kemungkinan entitas tersebut akan memperoleh kembali biaya transaksi yang telah terjadi. Oleh karena itu, pendapatan diakui hanya yang berkaitan dengan biaya yang telah terjadi yang diharapkan dapat dipulihkan. Karena hasil transaksi tersebut tidak dapat diestimasi secara andal maka tidak ada laba yang diakui.

Bunga, Royalti, dan Dividen

Berdasarkan PSAK No. 23 Tahun 2017 paragraf 29, pendapatan yang timbul dari penggunaan asset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen diakui dengan dasar yang dijelaskan di paragraf 30, jika:

1. Kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas; dan
2. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal.

PSAK No. 23 Tahun 2017 paragraf 30, pendapatan diakui dengan dasar sebagai berikut:

1. Bunga diakui menggunakan metode suku bunga efektif;
2. Royalti diakui dengan dasar akrual sesuai dengan substansi dari perjanjian yang relevan; dan
3. Dividen diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.

Metode Pengakuan Pendapatan yang dikemukakan oleh Belkoui (2019) dalam suatu periode akuntansi terdiri dari 2 metode yaitu :

1. Accrual Basis

Accrual Basis merupakan teknik pencatatan akuntansi dari suatu transaksi ekonomi yang diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi meskipun kas belum diterima atau dibayar. Metode accrual basis ini mengakui beban saat transaksi terjadi meskipun kas belum dibayarkan, dan mengakui pendapatan meskipun kas belum diterima. Transaksi dengan menggunakan accrual basis sudah dicatat oleh perusahaan karena transaksi yang terjadi mempunyai dampak ke perusahaan di masa depan dan mencerminkan kinerja perusahaan. Jurnal yang digunakan saat pengakuan pendapatan:

- a. Pada saat diakui pendapatan yang ditandai dengan perpindahan kepemilikan dari penjual ke pembeli

Piutang	Rp. xxx
Penjualan	Rp. xxx

- b. Pada saat kas diterima

Jurnal:

Kas	Rp. xxx
Piutang	Rp. xxx

2. Cash Basis

Cash Basis merupakan tehnik pencatatan akuntansi dari suatu transaksi ekonomi yang diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat kas diterima. Pencatatan dengan menggunakan cash basis menunjukkan bahwa perusahaan baru akan mencatat dan mengakui adanya pendapatan saat kas diterima misalnya saat terjadinya penjualan barang / jasa ke konsumen serta akan mencatat adanya

Daftar Pustaka

- Baridwan, Zaki (2015). *Intermediate Accounting*. Edisi 8. Cetakan Ketujuh. Penerbit BPFY Yogyakarta
- Belkaoui, Ahmed Riahi (2019). *Teori Akuntansi*. Edisi 5. Penerbit Salemba Empat.
- Harahap, Sofyan Syafri. (2001). *Teori Akuntansi*. Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2002). *Standar Akuntansi Keuangan*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 23 tahun 2017.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 72 tahun 2020.
- Tuanakotta, Theodorus M. (2000). *Teori Akuntansi*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Scott, William R. (2009). *Financial Accounting Theory. Fifth edition*. Penerbit Pearson. Prentice Hall.
- Suwardjono (2005). *Teori Akuntansi*. Yogyakarta. Penerbit BPFY Yogyakarta.
- Sialagan, Hamonangan (2020). *Teori Akuntansi*. Penerbit LPPM UHN Press.

Profil Penulis



Dr. Riyanto Setiawan Suharsono, S.E., M.SA., Ak., CA., CSRS.

Penulis memiliki keilmuan di bidang Akuntansi. Penulis aktif meneliti di bidang keilmuan Akuntansi. Penulis telah menyelesaikan pendidikan Sarjana Akuntansi di tahun 1998 di Universitas Merdeka Malang dengan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE).. Penulis kemudian bekerja menjadi praktisi akuntansi di beberapa instansi. Di tahun 2009, penulis melanjutkan pendidikan Profesi Akuntansi di Universitas Brawijaya dan mendapatkan gelar Akuntan (Ak.) di tahun 2010. Selanjutnya penulis meneruskan ke pendidikan Magister Akuntansi di Universitas Brawijaya dan selesai di tahun 2012 dengan mendapatkan gelar (MSA.). Lima tahun kemudian, tepatnya di tahun 2017 penulis kembali melanjutkan pendidikan Doktor di Universitas Merdeka Malang dan mendapatkan gelar Doktor (Dr.) di tahun 2021.

Penulis mendapatkan kepakaran sebagai *Chartered Accountant* dari Ikatan Akuntan Indonesia dan kepakaran dalam *Sustainability Reporting* dari *National Centre for Sustainability Reporting* (NCSR). Penelitian-penelitian dari penulis banyak didanai dari internal perguruan tinggi dan Kemendikbud. Penulis juga melakukan pengabdian kepada masyarakat agar ilmu yang didapat bisa berguna bagi masyarakat luas.

Email Penulis : riyantosetiawan550@gmail.com

Leni Saleh, SEI., M.Sc., M.Sc (Tan).

Universitas Lakidende

Pendahuluan

Perkembangan suatu Negara senantiasa diikuti dengan perkembangan perusahaan-perusahaan yang ada dinegara tersebut. Suatu perusahaan memiliki peran yang sangat signifikan dalam membantu kemajuan pembangunan suatu Negara. Setiap perusahaan akan melaksanakan aktivitas produksi yang tentunya memerlukan bahan baku untuk industri dalam perusahaan tersebut. Ketersediaan bahan baku industri akan memudahkan suatu perusahaan dalam melaksanakan proses produksi sesuai dengan kebutuhan konsumen. Ketidaktersediaan bahan baku untuk industri maka aktivitas produksi tidak akan terlaksana dengan baik dan sempurna. Bahan baku adalah merupakan salah satu item yang sangat penting terlaksananya aktivitas operasional perusahaan, sehingga ketersediaan akan jumlah bahan baku harus selalu ada. Dalam hal ini, bahan baku harus selalu tersedia pada jumlah yang ditetapkan atau dibutuhkan. Bila ketersediaan jumlah bahan baku sedikit akan berdampak pada proses produksi dan secara tidak langsung akan mengakibatkan kerugian, hal ini disebabkan karena sumber daya yang lain yaitu tenaga kerja tidak bekerja atau menganggur.

Di era industri 4.0 ini persaingan antar perusahaan baik perusahaan domestik maupun internasional semakin

tinggi baik itu dalam bidang industri barang dan jasa maupun perdagangan. Semakin banyaknya perusahaan baru yang berdiri baik dalam bidang industri yang sama akan membangkitkan rasa persaingan yang tinggi antar perusahaan. Oleh karena itu, suatu perusahaan harus mempunyai berbagai macam cara dan strategi dalam menghadapi persaingan tersebut. Diantara strategi yang menjadi pilihan yaitu efisiensi dan efektivitas biaya agar perusahaan tetap dapat bersaing dalam pasar industri. Efisiensi biaya berhubungan dengan pengambilan keputusan oleh perusahaan dalam mengelola biaya industri dalam perusahaan tersebut. Informasi yang berkaitan dengan perusahaan harus menggambarkan secara detail dan akurat sesuai dengan kondisi yang terjadi atau yang ada di perusahaan tersebut. Karena itu, pengetahuan akan akuntansi biaya dan manajemen bisa menjadi salah satu faktor pendukung suatu perusahaan agar mampu mengumpulkan, mengolah dan menghasilkan informasi dan keputusan yang relevan, akurat dan efisien.

Akuntansi biaya dalam suatu perusahaan tidak hanya diharapkan dapat mencatat biaya sesuai faktanya, tetapi juga dituntut supaya dapat memotivasi manajemen dan karyawan dalam melakukan pengurangan biaya, hal ini agar suatu perusahaan mampu memiliki keunggulan dalam segi biaya. Akuntansi biaya dapat menitikberatkan kegiatan pengolahan informasinya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Akuntansi biaya dapat menyediakan informasi biaya yang mengharuskan manajemen dan karyawan untuk mengelola kegiatan, sehingga dapat mendorong terjadinya perbaikan secara berkesinambungan dalam menghasilkan produk perusahaan. Oleh karena itu, informasi akuntansi bagi perusahaan sangat penting, sehingga perusahaan berusaha untuk melaksanakan sistem informasi akuntansi biaya yang dapat menghasilkan informasi yang relevan dan akurat serta efisien.

Setiap perusahaan pada dasarnya menjalankan usahanya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang dihasilkan tentunya berkaitan dengan

tingkat penjualan produksi yang dihasilkan dan biaya yang dikeluarkan selama kurun waktu memproduksi barang tersebut. Beberapa strategi yang harus dijalankan suatu perusahaan diantaranya adalah strategi penentuan harga jual. Harga jual harus dapat menutupi jumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam memproduksi suatu barang atau produk. Strategi penentuan harga jual merupakan hal yang penting dalam menghadapi persaingan terlebih di era digital ini. Agar harga jual yang telah ditetapkan tidak dirasa terlalu tinggi oleh konsumen atau pelanggan, sehingga daya beli konsumen atau pelanggan tidak akan berpindah ke pihak pesaing perusahaan tersebut. Disisi lain, strategi penentuan harga jual, sangat penting untuk dilakukan suatu perhitungan besarnya biaya-biaya yang dikeluarkan secara detil dan akurat, agar dapat menghasilkan informasi dan keputusan dalam menentukan harga jual akan barang atau produk lebih teliti dan akurat sehingga dapat meminimalisir kerugian dan dapat memperoleh keuntungan atau laba sesuai dengan tujuan perusahaan.

Masalah yang sering terjadi dalam suatu perusahaan biasanya adalah masalah yang berkaitan dengan siklus produksi karena perusahaan belum memiliki sistem akuntansi biaya produksi yang baik. Dalam siklus produksi perusahaan tidak memiliki dokumen-dokumen pendukung sehingga kalkulasi harga pokok produksi hanya menggunakan patokan harga tertentu. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap keputusan harga jual produk perusahaan. Dalam penentuan biaya, perusahaan tidak menghitung biaya overhead pabrik sebagai bagian dari harga pokok produksi sehingga perhitungan biaya produksi belum lengkap yang mengakibatkan laba kotor yang disajikan perusahaan juga tidak akurat. Penetapan harga pokok produksi yang lengkap dan akurat sangat dibutuhkan sebagai dasar atau pedoman dalam menentukan harga jual untuk dapat bersaing dalam pasar. Jika perhitungan harga pokok produksi tidak tepat maka penentuan harga jual produk juga tidak tepat. Perhitungan harga pokok produksi yang *understated* karena tidak termasuk komponen biaya overhead pabrik akan menyebabkan harga jual terlalu

rendah sehingga perusahaan tidak mendapatkan laba maksimum (David Kurniawan, 2012).

Pengertian Akuntansi Biaya dan Konsep Biaya

Akuntansi Biaya

Menurut Mulyadi (2009) akuntansi biaya adalah suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, penyajian biaya dan penjualan barang atau jasa dengan metode tertentu. Sasaran dari kegiatan akuntansi biaya adalah biaya itu sendiri. Dengan kata lain akuntansi biaya adalah bagian dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, dimana akuntansi biaya merupakan salah satu cabang akuntansi yang menjadi instrument manajemen dalam memonitor dan merekam semua kegiatan transaksi biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan secara runtut dan menyediakan informasi biaya dalam bentuk laporan biaya.

Akuntansi biaya adalah sebuah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian biaya-biaya pembuatan dan penjualan barang yang telah jadi (produk) atau penyerahan jasa dengan cara-cara tertentu. jika dilihat dari kegunaan dan fungsinya, akuntansi biaya dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang menghasilkan informasi biaya yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajemen suatu perusahaan. Akuntansi biaya juga merupakan salah satu pengkhususan dalam pengetahuan bidang akuntansi, seperti akuntansi keuangan, akuntansi pemerintahan, akuntansi pajak dan lainnya. Ciri pokok yang membedakan akuntansi biaya dengan akuntansi lainnya yaitu kajian datanya. Akuntansi biaya mengkaji data biaya untuk digolongkan, dicatat, dianalisis dan dilaporkan dalam laporan informasi akuntansi. Akuntansi biaya pernah dianggap hanya berlaku dalam perusahaan manufaktur, tetapi pada saat ini setiap jenis dan ukuran organisasi memperoleh manfaat dari penggunaan akuntansi biaya. Misalnya akuntansi biaya yang digunakan institusi keuangan, perusahaan transportasi, firma jasa profesional, rumah

sakit, lembaga pendidikan serta aktivitas pemasaran dan administratif dalam perusahaan manufaktur (Sofia Prima Dewi dan Septian, 2013).

Konsep Biaya

Menurut Hansen dan Mowen (2015) Biaya adalah nilai kas atau ekuivalen kas yang dikorbankan untuk memperoleh barang (produk) atau jasa yang diharapkan dapat membawa manfaat pada masa sekarang dan pada masa yang akan datang pada perusahaan. Biaya dikatakan setara dengan kas karena sumber non kas dapat ditukar dengan barang dan jasa yang dibutuhkan.

Biaya merupakan kas barang atau jasa yang telah memberikan manfaat yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. Biaya akan dikurangkan dari pendapatan untuk menentukan laba atau rugi pada suatu periode sehingga biaya akan dicantumkan dalam laporan laba rugi (Siregar dkk, 2013).

Menurut Mulyadi (2010) menyatakan bahwa secara arti yang luas biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Ada empat unsur pokok dalam pengertian biaya tersebut adalah : (a) biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi, (b) diukur dalam satuan uang, (c) yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi, dan (d) pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu.

Dengan kata lain konsep biaya telah berkembang sesuai kebutuhan akuntan, ekonom, dan pihak lainnya yang berkepentingan. Secara garis besar arti biaya adalah sebagai nilai tukar, pengeluaran, pengorbanan untuk memperoleh manfaat. Dalam akuntansi keuangan, pengeluaran atau pengorbanan pada saat akuisisi diwakili oleh penyusutan saat ini atau di masa yang akan datang dalam bentuk kas atau aktiva lain.

Klasifikasi Biaya

Biaya secara luas dapat diklasifikasi sebagai berikut ini:

Biaya berdasarkan Unsur Produk

- a. Bahan yang digunakan terdiri dari bahan utama yang dipakai di dalam produksi yang selanjutnya diproses menjadi produk jadi melalui penambahan upah langsung dan biaya overhead pabrik (BOP). Dimana bahan yang digunakan ada dua yaitu
 - 1) Bahan Langsung adalah semua bahan yang bisa dikenal sampai menjadi produk jadi, bisa dengan mudah ditelusuri dan merupakan bahan utama produk jadi.
 - 2) Bahan tidak langsung adalah semua bahan yang dimasukkan ke dalam proses produksi yang tidak bisa dengan mudah ditelusuri.
- b. Tenaga Kerja/Buruh yaitu usaha fisik atau usaha mental yang dikeluarkan di dalam menghasilkan produksi suatu produk. Jenis tenaga kerja yang digunakan ada dua yaitu:
 - 1) Tenaga kerja langsung adalah semua tenaga kerja yang secara langsung terlibat dengan proses produksi produk jadi dan dapat juga ditelusuri dengan mudah, merupakan biaya tenaga kerja langsung utama dalam menghasilkan suatu produk.
 - 2) Tenaga kerja tidak langsung adalah semua tenaga kerja yang secara terlibat dalam proses kegiatan produksi menjadi produk jadi, tetapi bukan tenaga kerja langsung.
- c. Overhead Pabrik adalah merupakan semua biaya yang terjadi di pabrik selain bahan langsung dan upah tenaga kerja langsung, merupakan kumpulan dari berbagai rekening yang terjadi di dalam eksploitasi pabrik.

Biaya Hubungannya Dengan Produksi

Biaya yang berhubungan dengan produksi barang atau produk terbagi dua yaitu:

1. Biaya Prima (*Prime Cost*) adalah biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung, dalam hal ini biaya tersebut berhubungan langsung dengan produksi produk jadi.
2. Biaya Konversi (*Conversion Cost*) adalah merupakan biaya yang berhubungan dengan pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Biaya konversi terdiri dari dua bagian yaitu biaya tenaga kerja langsung dan overhead pabrik.

Biaya Hubungannya Dengan Volume

Biaya yang berhubungan dengan volume terbagi atas empat bagian yaitu sebagai berikut:

1. Biaya Variabel (*Variable Cost*) adalah biaya yang secara total cenderung tidak tetap atau berubah-ubah secara proporsional sesuai dengan perubahan volume produksi sedangkan per unitnya cenderung tetap.
2. Biaya Tetap (*Fixed Cost*) adalah biaya yang dalam unit tidak tetap atau berubah-ubah dan dalam total selalu konstan, meskipun dalam batas interval tertentu.
3. Biaya Semi variabel (*Semi variable Cost*) adalah biaya yang mengandung dua hal pokok biaya yaitu biaya tetap dan biaya variabel.
4. Biaya Penutupan (*Shutdown Cost*) adalah merupakan biaya tetap yang akan dibebankan ketika perusahaan tidak melakukan kegiatan produksi.

Biaya Pembebanannya terhadap Departemen

Biaya yang berhubungan dengan pembebanan pada departemen terbagi dua yaitu:

1. Departemen produksi adalah sebuah departemen yang secara langsung member kontribusi untuk memproduksi suatu produk dan memasukkan departemen dimana proses konversi atau proses produksi berlangsung.
2. Departemen jasa adalah merupakan sebuah departemen yang berhubungan dengan proses produksi barang secara tidak langsung dan berfungsi memberikan layanan untuk departemen lainnya

Biaya Daerah Fungsional

Yang termasuk dalam biaya daerah fungsional yaitu:

1. Biaya manufaktur adalah biaya yang berhubungan dengan produksi suatu produk atau barang, yang merupakan jumlah dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik.
2. Biaya pemasaran adalah biaya yang dibebankan pada penjualan suatu produk (barang) atau jasa pada keluarnya barang dari gudang sampai ke tangan konsumen.
3. Biaya administrasi adalah merupakan biaya yang dibebankan untuk mengarahkan, mengawasi dan mengoperasikan perusahaan dan memasukkan gaji yang dibayar untuk manajemen dan staf pembukuan dalam suatu perusahaan.

Periode Pembebanannya terhadap Pendapatan

Klasifikasi biaya pada periode pembebanan terhadap pendapatan dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Biaya produk adalah biaya yang secara langsung bisa diidentifikasi dari proses kegiatan sampai dengan ke produk jadi, yang meliputi biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik.

2. Biaya periodik adalah biaya yang secara tidak langsung berhubungan dengan produk jadi dan karenanya tidak dimasukkan dalam unsure persediaan barang. Biaya periodic terbagi atas dua yaitu:
 - a. Revenue expenditure yaitu bila manfaat biaya hanya satu periode produksi.
 - b. Capital expenditure :yaitu bila manfaat biaya lebih dari satu periode produksi.

Biaya dengan Hubungannya PengawasanManajemen

Klasifikasi biaya berdasarkan biaya dengan hubungannya pengawasan manajemen adalah sebagai berikut:

1. Biaya rekayasa adalah perkiraan unsur biaya yang dibebankan dengan jumlahnya yang paling tepat dan wajar.
2. Biaya kebijakan adalah semua unsur biaya yang jumlahnya bervariasi sesuai dengan kebijakan manajer pusat pertanggungjawaban.
3. Biaya Komite adalah merupakan biaya yang merupakan konsekuensi komitmen yang sebelumnya telah dibuat dan yang tidak dapat dihindarkan.

Perilaku Biaya

Pemahaman dan pengetahuan pada perilaku biaya dapat membantu seorang manager dalam membuat prediksi akan biaya yang dibutuhkan perusahaan. Prediksi biaya adalah ramalan atau perkiraan biaya untuk tingkat jumlah kegiatan tertentu. Perilaku biaya adalah gambaran perubahan suatu biaya yang berkaitan dengan perubahan jumlah (volume) kegiatan. Perilaku biaya juga merupakan suatu keadaan yang menjelaskan akan perubahan biaya seiring dengan perubahan produksi akan barang atau dengan kata lain suatu pola yang menjelaskan bagaimana perubahan jumlah biaya bervariasi atas perubahan kegiatan usaha.

Dengan demikian, secara umum perilaku biaya dapat kita definisikan respon akan perubahan biaya pada perubahan level kegiatan tertentu, dimana level kegiatan yang dimaksud yaitu dimana total biaya tetap dan total biaya variable tidak akan berubah. Perilaku biaya berdasarkan hubungannya dengan volume kegiatan produksi dibagi menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut:

1. Biaya variable

Biaya variable adalah biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume produksi dalam rentang relevan, tetapi secara per unit tetap. Seperti contohnya yaitu bahan baku langsung, biaya perlengkapan, biaya penjualan, dan lain sebagainya.

2. Biaya tetap

Biaya tetap adalah biaya yang secara totalitas bersifat tetap dalam rentang relevan tertentu, tetapi secara per unit berubah. Seperti contohnya yaitu biaya depresiasi, pajak bumi dan bangunan, biaya sewa, biaya konsultan, gaji bagian produksi, pajak properti, dan lain sebagainya.

3. Biaya semi variabel

Biaya semi variabel adalah biaya didalamnya mengandung unsur tetap dan mengandung unsur variabel. Seperti contohnya yaitu biaya listrik, biaya air, dan lain sebagainya.

Penggolongan Biaya

Penggolongan biaya dalam akuntansi biaya umumnya ditentukan dengan tujuan apa yang hendak dicapai oleh perusahaan tersebut dengan penggolongan biaya tersebut. Menurut Mulyadi (2010) penggolongan atas biaya adalah sebagai berikut:

1. Biaya Berdasarkan obyek Pengeluaran

Contoh dari biaya berdasarkan obyek pengeluaran yaitu bahan baku, maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan biaya bahan baku.

2. Biaya Berdasarkan Fungsi Pokok dalam perusahaan

Biaya berdasarkan fungsi pokok dalam sebuah perusahaan manufaktur, terdiri dari atas tiga fungsi pokok, yaitu sebagai berikut:

- a. Biaya produksi adalah biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi barang atau produk jadi yang siap dijual.
- b. Biaya pemasaran adalah biaya-biaya yang terjadi untuk pada saat melakukan aktivitas pemasaran produk.
- c. Biaya administrasi dan umum adalah merupakan biaya-biaya untuk mengkoordinasikan aktivitas produksi dan pemasaran barang atau produk.

3. Biaya Berdasarkan Hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai.

Hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai yaitu bisa berupa produk atau departemen. Dalam hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai, biaya dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Biaya langsung merupakan biaya yang terjadi, yang penyebab satu satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai.
- b. Biaya tidak langsung merupakan biaya yang terjadinya tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai.

4. Biaya Berdasarkan Perilaku Biaya dalam Hubungannya dengan Perubahan Volume Kegiatan.

Biaya yang berdasarkan dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan biaya dikelompokkan menjadi empat yaitu sebagai berikut:

- a. Biaya variabel merupakan biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan.

- b. Biaya semi variabel merupakan biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan.
 - c. Biaya semi tetap merupakan biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu.
 - d. Biaya tetap merupakan biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar volume kegiatan tertentu.
5. Biaya Berdasarkan dengan Jangka waktu manfaatnya.

Biaya ini dimaksudkan atas dasar jangka waktu manfaatnya, dimana penggolongan biaya ini menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- a. Pengeluaran modal (*capital expenditure*) merupakan biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi (biasanya periode akuntansi adalah satu tahun kalender).
- b. Pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*) merupakan biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut.

Menurut Anwar, Lidia, dan Indrayenti (2010) menggolongkan biaya menjadi enam bagian yaitu sebagai berikut:

- 1. Biaya berdasarkan fungsi pokok perusahaan, dimana biaya ini dikelompokkan menjadi 7 bagian yaitu sebagai berikut:
 - a. Biaya produksi

Biaya produksi adalah semua biaya yang berhubungan dengan fungsi produksi atau kegiatan pengolahan bahan baku menjadi selesai.

b. Biaya bahan baku

Biaya bahan baku adalah harga perolehan dari bahan baku yang dipakai dalam pengolahan produk.

c. Biaya tenaga kerja langsung

Biaya tenaga kerja adalah balas jasa yang diberikan kepada karyawan pabrik yang manfaatnya dapat diidentifikasi atau diikuti jejaknya pada produk tertentu yang dihasilkan perusahaan.

d. Biaya overhead pabrik

Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung, seperti : biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tak langsung, biaya penyusutan aktiva tetap, dan lain-lain.

e. Biaya pemasaran

Biaya pemasaran adalah biaya dalam rangka penjualan produk selesai sampai dengan pengumpulan piutang menjadi kas. Biaya pemasaran dikelompokkan menjadi:

- 1) Fungsi penjualan
- 2) Fungsi penggudangan produk selesai
- 3) Fungsi pengepakan dan pengiriman
- 4) Fungsi advertensi
- 5) Fungsi pemberian kredit dan pengumpulan piutang
- 6) Fungsi pembuatan faktur dan administrasi penjualan

f. Biaya administrasi dan umum

Biaya administrasi dan umum adalah semua biaya yang berhubungan dengan fungsi administrasi dan umum. Biaya keuangan adalah

semua biaya yang terjadi dalam melaksanakan fungsi keuangan, seperti : biaya bunga.

2. Penggolongan biaya sesuai dengan periode akuntansi dimana biaya ini meliputi: \
 - a. Pengeluaran modal (*Capital Expenditure*)

Pengeluaran modal adalah pengeluaran yang dapat memberikan manfaat pada beberapa periode akuntansi atau pengeluaran yang akan dapat memberikan manfaat pada periode akuntansi yang akan datang.
 - b. Pengeluaran penghasilan (*Revenues Expenditure*)

Pengeluaran penghasilan adalah pengeluaran yang akan memberikan manfaat hanya pada periode akuntansi dimana pengeluaran terjadi.
 3. Penggolongan biaya sesuai dengan tendensi perubahannya terhadap aktivitas atau volume, dimana penggolongan biaya ini meliputi:
 - a. Biaya tetap (*fixed cost*)

Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan atau aktifitas sampai dengan tingkat tertentu.
 - b. Biaya variabel (*variabel cost*)

Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya akan berubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan.
 - c. Biaya semi variabel (*semi variabel cost*)

Biaya semi variabel adalah biaya yang jumlah totalnya akan berubah sesuai dengan perubahan volume kegiatan akan tetapi sifat perubahannya tidak sebanding.
 4. Penggolongan biaya sesuai dengan objek atau pusat biaya yang dibiayai, penggolongan biaya ini meliputi:
 - a. Biaya langsung (*direct cost*)
-

Biaya langsung adalah biaya yang terjadinya atau manfaatnya dapat diidentifikasi kepada objek atau pusat biaya tertentu. seperti : biaya produk yang merupakan biaya langsung adalah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung.

b. Biaya tidak langsung (*indirect cost*)

Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadinya atau manfaatnya tidak dapat diidentifikasi pada objek atau pusat biaya tertentu, atau biaya yang manfaatnya dinikmati oleh beberapa objek atau pusat biaya. seperti: biaya produk yang merupakan biaya tidak langsung adalah biaya overhead pabrik (biaya penyusutan gedung pabrik, biaya pemeliharaan mesin pabrik, biaya bahan penolong, dan sebagainya).

5. Penggolongan biaya untuk tujuan pengendalian biaya, penggolongan biaya ini meliputi:

a. Biaya terkendalikan (*controllable cost*)

Biaya terkendalikan adalah biaya yang secara langsung dapat dipengaruhi oleh seorang pimpinan tertentu dalam jangka waktu tertentu.

b. Biaya tidak terkendali (*uncontrollable cost*)

Biaya tidak terkendali adalah biaya yang tidak dapat dipengaruhi seorang pimpinan atau pejabat tertentu berdasarkan wewenang yang dia miliki atau tidak dapat dipengaruhi oleh seorang pejabat dalam jangka waktu tertentu.

6. Penggolongan biaya sesuai dengan tujuan pengambilan keputusan. Penggolongan biaya ini meliputi:

a. Biaya relevan (*relevant cost*)

Biaya relevan adalah biaya yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan, oleh karena itu biaya tersebut harus diperhitungkan di dalam pengambilan keputusan.

b. Biaya tidak relevan

Biaya tidak relevan adalah biaya yang tidak akan mempengaruhi pengambilan keputusan, oleh karena itu biaya ini tidak perlu diperhitungkan atau dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Beberapa contoh pengambilan keputusan.

Daftar Pustaka

- Anwar Chairul, Lidia Fasi Ashari dan Indrayenti.(2010). *Harga Pokok Produksi dalam Kaitannya Dengan Penentuan Harga Jual Untuk Pencapaian Target Laba Analisis (Studi Kasus PT Indra Brother's Di Bandar Lampung)*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Volume 1 Nomor 1 September 2010.
- David Kurniawan. (2012). *Penerapan sistem Akuntansi Biaya Untuk Meningkatkan tingkat Akurasi Biaya Produksi (studi Praktik Kerja pada PT Hamparan Plastindo Raya)*. Jurnal ilmiah Mahasiswa Akuntansi: Volume 1.No. Januari 2012.
- Hansen, Don R. dan Maryanne M. Mowen 2015.*Managerial Accounting*. Buku 1, Edisi 8. Jakarta: PT. Salemba Empat.
- Mulyadi. (2009). *Akuntansi Biaya, Penentuan Harga Pokok dan Pengenalan Biaya*
Yogyakarta: Sekolah Tinggi YKPN.
- Mulyadi. (2010). *Akuntansi Biaya*. Edisi Kelima. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Siregar, Baldric, Bambang Suripto, Dody Hapsoro, Eko Widodo Lo, Erlina Herowati, Lita Kusumasari, Nurofik. 2013. *Akuntansi Biaya*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sofia Prima Dewi dan Septian Bayu Kristanto. (2013). *Akuntansi Biaya*. Penerbit IN MEDIA.

Profil Penulis**Leni Saleh, SEI., M.Sc., M.Sc (Tan).**

Tempat tanggal lahir 31 Maret 1982. Lulus S1 di Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Makassar tahun 2004. Lulus Magister Program Studi Ekonomi Pertanian Pascasarjana Universitas Gadjah Mada tahun 2010, dan lulus Magister Sains Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada pada Program Studi Ketahanan Nasional pada tahun 2012. Saat ini menjadi dosen tetap Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lakidende dan dosen lb di Program Studi Ekonomi Syari'ah dan Perbankan Syari'ah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari. Mampu matakuliah Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian, Pengujian Produk, Pengemasan Hasil Pertanian, Ekonomi Perusahaan, Ekonomi Perusahaan dan Kewirausahaan (Entrepreneurship). Aktif menulis berbagai jurnal ilmiah, narasumber dan peserta dalam beberapa seminar dan pelatihan tentang kewirausahaan, Teknologi Pengolahan Hasil pertanian, seminar agribisnis berbasis pangan lokal dan seminar pertanian lainnya. Terakhir book chapter internasional penulis telah terbit dan dapat diakses secara online.

Email Penulis: salehleni8@gmail.com

Hadriana Hanafie, S.E., M.M.

STIE Wira Bhakti

Pengertian

Laba atau keuntungan dapat didefinisikan dengan dua cara. Laba dalam ilmu ekonomi murni didefinisikan sebagai peningkatan kekayaan seorang investor sebagai hasil penanam modalnya, setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut (termasuk di dalamnya, biaya kesempatan). Sementara itu, laba dalam akuntansi didefinisikan sebagai selisih antara harga penjualan dengan biaya produksi. Perbedaan diantara keduanya adalah dalam hal pendefinisian biaya. (Wikipedia). Laba merupakan elemen yang paling menjadi perhatian pemakai karena angka laba diharapkan cukup kaya untuk merepresentasi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Akan tetapi, teori akuntansi sampai saat ini belum mencapai kematapan dalam pemaknaan dan pengukuran laba.

Dari sudut pandang perekayasa akuntansi, konsep laba dikembangkan untuk memenuhi tujuan menyediakan informasi tentang kinerja perusahaan secara luas. Sementara itu, pemakai informasi mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Teori akuntansi laba menghadapi dua pendekatan: satu laba untuk berbagai tujuan atau beda tujuan beda laba. Teori akuntansi diarahkan untuk memformulasi laba dengan pendekatan pertama. Pengertian laba secara umum adalah kenaikan kemakmuran dalam suatu periode yang dapat dinikmati.

Konsep ini membedakan antara laba dan kapital. Kapital bermakna sebagai sediaan (stock) potensi jasa atau kemakmuran, sedangkan laba bermakna aliran (flow) kemakmuran. Lebih lanjut, laba dapat dipandang sebagai perubahan aset bersih sehingga berbagai dasar penilaian kapital dapat diterapkan.

Laba adalah kenaikan modal (aset bersih) yang berasal dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dari suatu badan usaha, dan dari semua transaksi atau kejadian lain yang mempunyai badan usaha selama satu periode, kecuali yang timbul dari pendapatan (*revenue*) atau investasi pemilik. Pengertian laba secara umum adalah selisih dari pendapatan di atas biaya-biayanya dalam jangka waktu (periode) tertentu. Dalam teori ekonomi juga dikenal adanya istilah laba, tetapi pengertian laba di dalam teori ekonomi berbeda dengan pengertian laba menurut akuntansi.

Laba atau rugi sering dimanfaatkan sebagai ukuran untuk menilai prestasi perusahaan atau sebagai dasar ukuran penilaian yang lain, seperti laba per lembar saham. Unsur-unsur yang menjadi bagian pembentuk laba adalah pendapatan dan biaya. Dengan mengelompokkan unsur-unsur pendapatan dan biaya, akan dapat diperoleh hasil pengukuran laba yang berbeda antara lain: laba kotor, laba operasional, laba sebelum pajak, dan laba bersih. Laba menjadi informasi yang dilihat oleh banyak seperti profesi akuntansi, pengusaha, analis keuangan, pemegang saham, ekonom, fiskus, dan sebagainya. Hal ini menyebabkan adanya berbagai definisi untuk laba. Menurut Suwardjono (2008:464) laba dimaknai sebagai imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Ini berarti laba merupakan kelebihan pendapatan di atas biaya (biaya total yang melekat kegiatan produksi dan penyerahan barang/ jasa).

Teori Laba

Pada badan usaha koperasi, laba disebut sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU akan didistribusikan kepada

koperasi dan anggota sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Menurut teori laba, tingkat laba pada setiap perusahaan biasanya berbeda pada setiap jenis industri. Beberapa teori yang menerangkan perbedaan tersebut sebagai berikut:

1. Teori Laba Menanggung Risiko

Teori ini, menjelaskan keuntungan ekonomi di atas normal akan diperoleh perusahaan dengan risiko diatas rata-rata.

2. Teori Laba Friksional

Teori ini menekankan bahwa keuntungan meningkat sebagai suatu hasil dari friksi keseimbangan jangka panjang.

3. Teori Laba Monopoli

Teori ini mengatakan bahwa beberapa perusahaan dengan kekuatan monopoli dapat membatasi output dan menekankan harga yang lebih tinggi daripada bila perusahaan beroperasi dalam kondisi persaingan sempurna.

4. Teori Laba Inovasi

Dalam teori inovasi, laba yang diatas normal dapat timbul sebagai hasil inovasi yang berhasil. Walau demikian, perusahaan yang telah berhasil dalam inovasi tidaklah kebal dari serangan persaingan dari perusahaan-perusahaan imitator. Perusahaan perlu melakukan inovasi terus-menerus.

5. Teori Laba Efisiensi Manajerial

Teori ini menekankan bahwa perusahaan yang dikelola secara efisien akan memperoleh laba di atas rata-rata laba normal.

Fungsi Laba

Laba yang tinggi adalah pertanda bahwa konsumen menginginkan output yang lebih dari perusahaan. Sebaliknya, laba yang rendah atau rugi adalah pertanda

bahwa konsumen menginginkan kurang dari produk/komoditi yang ditangani dan metode produksinya tidak efisien. Ditinjau dari konsep koperasi, fungsi laba bagi koperasi tergantung pada besar kecilnya partisipasi ataupun transaksi anggota dengan koperasinya. Semakin tinggi partisipasi anggota, maka idealnya semakin tinggi manfaat yang diterima oleh anggota. Tujuan pelaporan laba adalah sebagai indikator efisiensi penggunaan dana yang tertahan dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembaliannya, pengukuran prestasi manajemen dan kompensasi, dasar penentuan besarnya perencanaan pajak, dan dasar pembagian dividen.

Jenis-Jenis Laba

Laba adalah salah satu hal yang paling penting dalam sebuah perusahaan. Laba terdiri atas beberapa jenis, yaitu:

1. Laba kotor adalah selisih dari hasil penjualan dengan harga pokok penjualan.
2. Laba Operasional merupakan hasil dari aktivitas-aktivitas yang termasuk rencana perusahaan kecuali ada perubahan-perubahan besar dalam perekonomiannya, dapat diharapkan akan dicapai setiap tahun. Oleh karena itu angka ini menyatakan kemampuan perusahaan untuk hidup dan mencapai laba yang pantas sebagai jasa pada pemilik modal.
3. Laba sebelum dikurangi pajak atau EBIT (Earning Before Tax) merupakan laba operasi ditambah hasil dan biaya di luar operasi biasa. Bagi pihak-pihak tertentu terutama dalam hal pajak, angka ini yang terpenting karena jumlah ini menyatakan laba akhir yang dicapai perusahaan.
4. Laba Setelah Pajak Atau Laba Bersih, Laba Bersih adalah laba setelah dikurangi berbagai pajak. Laba dipindahkan kedalam perkiraan laba ditahan. Dari perkiraan laba ditahan ini akan diambil sejumlah tertentu untuk dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham.

Kegiatan Laba

Urutan yang sering dipakai untuk menilai berhasil atau tidaknya manajemen suatu perusahaan untuk laba yang diperoleh nantinya, laba ini akan dipergunakan oleh perusahaan. Di dalam standar akuntansi keuangan PSAK no. 25 (menurut IAI) disebutkan sebagai berikut “Laporan laba rugi merupakan laporan utama untuk melaporkan kinerja suatu perusahaan, terutama tentang profitabilitas dibutuhkan untuk mengambil keputusan tentang sumber ekonomi yang dikelola oleh sebuah perusahaan di masa yang akan datang. Informasi tersebut juga sering digunakan untuk memperkirakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan kas dan aktiva yang akan disamakan dengan kas di masa yang akan datang. Informasi tentang kemungkinan perubahan kinerja juga penting dalam hal ini.”

Laporan Laba/Rugi

Pengertian

Laporan laba-rugi adalah laporan yang disusun secara sistematis berdasarkan standar akuntansi yang memuat tentang hasil operasi selama satu tahun atau periode akuntansi (Bahri, 2020). Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba (atau rugi) bersih.

Komponen Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi terdiri dari semua pendapatan baik pendapatan usaha (operasi) dan pendapatan di luar usaha (operasi), semua beban-beban baik beban usaha (operasi) maupun beban di luar usaha (operasi). Komponen-komponen laporan laba rugi, yaitu:

1. Pendapatan (penghasilan)

Untuk kepentingan akuntansi maka pendapatan diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu:

a. Pendapatan usaha

Pendapatan usaha adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pokok entitas. Pendapatan usaha diperoleh dari penjualan barang dan jasa.

b. Pendapatan di luar usaha

Pendapatan di luar usaha adalah pendapatan yang diperoleh bukan dari hasil kegiatan pokok. Entitas juga memperoleh pendapatan sampingan berupa pendapatan bunga, pendapatan dividen, pendapatan sewa, dan sebagainya.

2. Beban-beban

Beban dikelompokkan sesuai fungsi pengeluarannya. Beban biasanya dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

a. Beban usaha

Beban usaha adalah semua beban yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan usaha. Pada umumnya, beban usaha dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu:

1) Beban pemasaran

Beban pemasaran mencakup keseluruhan beban-beban yang digunakan untuk menyelenggarakan pemasaran atau penjualan barang atau jasa dan pengangkutan. Contohnya, yaitu gaji pramuniaga, iklan (*advertising*), beban perjalanan, beban angkut penjualan, beban lembur, dan sebagainya.

2) Beban administrasi

Beban administrasi mencakup beban-beban yang terjadi dalam menyelenggarakan pengarahannya, pengawasan, dan pelaksanaan tugas-tugas entitas. Contohnya, yaitu gaji pegawai kantor, beban sewa kantor, beban listrik, beban air dan telepon, beban perlengkapan, beban asuransi, beban rapat, pertemuan, dan sebagainya

b. Beban di luar usaha

Beban di luar usaha adalah mencakup beban-beban yang digunakan untuk kegiatan di luar kegiatan pokok atau utama entitas. Contohnya, yaitu beban bunga dan beban lain-lain.

Bentuk Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi menurut Bahri, 2020 yang baik secara umum ada dua bentuk laporan, yaitu:

1. Bentuk Langkah Tunggal atau Metode Sifat Beban

Laporan laba rugi bentuk langkah tunggal adalah semua pendapatan dan semua beban dikelompokkan menjadi satu. Dengan demikian, penyajian pendapatan maupun beban dikelompokkan sesuai dengan sifatnya dan bukan berdasarkan fungsi dalam entitas. Laporan laba rugi bentuk tunggal hanya dikenal dengan satu jenis laba.

2. Bentuk Langkah Bertahap atau Metode Beban Fungsional

Laporan laba rugi bentuk langkah bertahap mengenal berbagai bentuk tahap laba sebelum laba bersih setelah pajak. Pendapatan dan beban dikelompokkan sesuai dengan fungsinya. Penyajiannya memberikan informasi yang relevan dan lebih akurat kepada pengguna laporan. Entitas harus mengungkapkan informasi tambahan berdasarkan sifat beban.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Berdasarkan SAK laporan laba rugi mencakup laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (laporan penghasilan komprehensif) menyajikan informasi tambahan atas bagian laba maupun penghasilan komprehensif lain (laba rugi, total penghasilan komprehensif lain, dan penghasilan komprehensif untuk periode berjalan yaitu total laba rugi dan penghasilan komprehensif lain).

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, sekurang-kurangnya mencakup penyajian pos-pos berikut selama satu periode akuntansi:

1. Pendapatan.
2. Biaya keuangan.
3. Bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan entitas patungan (*joint ventures*) yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.
4. Beban pajak.
5. Suatu jumlah tunggal yang mencakup total dari:
 - a. Laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan.
 - b. Keuntungan atau kerugian setelah pajak yang diakui dengan pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau dari pelepasan aset dalam rangka operasi yang dihentikan.
6. Laba rugi.
7. Pendapatan komprehensif lainnya, yang dibagi lagi menjadi masing-masing komponen yang ada.
8. Bagian dari penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan entitas patungan (*joint ventures*) yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.
9. Jumlah laba rugi komprehensif (*total comprehensive income*).

Setelah laba rugi tahun berjalan maka terdapat akun penghasilan komprehensif lainnya. Akun penghasilan komprehensif lainnya diklasifikasikan ke penghasilan komprehensif lain yang direklasifikasikan ke laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi. Penghasilan komprehensif lain yang tidak direklasifikasikan ke laba rugi akan direklasifikasikan ke laba ditahan (saldo laba). Laba bersih tahun berjalan ditambah dengan penghasilan komprehensif lain bersih (penghasilan komprehensif lain setelah dikurangi pajak) dinamakan laba komprehensif. Laba bersih menambah laba ditahan (saldo laba),

sedangkan akun penghasilan komprehensif lain menjadi bagian terpisah dalam ekuitas selain modal saham dan laba ditahan (saldo laba). Penghasilan komprehensif lainnya berasal dari kejadian-kejadian berikut:

1. Revaluasi Aset Tetap (PSAK 16 Aset Tetap) dan Revaluasi Aset Tak Berwujud (PSAK 19 Aset Tak Berwujud).
2. Keuntungan dan Kerugian yang Timbul dari Penjabaran Laporan Keuangan dari Kegiatan Usaha Luar Negeri (Penjabaran Laporan Keuangan PSAK 10)
3. Imbalan Kerja (Program Imbalan Pasti) PSAK 24
4. Keuntungan dan Kerugian dari Pengukuran Kembali Aset Keuangan Sebagai Tersedia untuk Dijual (Instrumen Keuangan PSAK 55)
5. Bagian Efektif dari Keuntungan dan Kerugian Instrumen Lindung Nilai Dalam Rangka Lingkung Nilai Arus Kas (Instrumen Keuangan PSAK 55)

Penghasilan komprehensif lain adalah perubahan aset atau liabilitas yang tidak memengaruhi laba pada periode berjalan seperti selisih revaluasi aset tetap, pajak penghasilan terkait, dan selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing (Bahri et al., 2021). Entitas dapat menyajikan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan dua pendekatan:

1. Pendekatan Laporan Tunggal (*Single Statement Approach*)

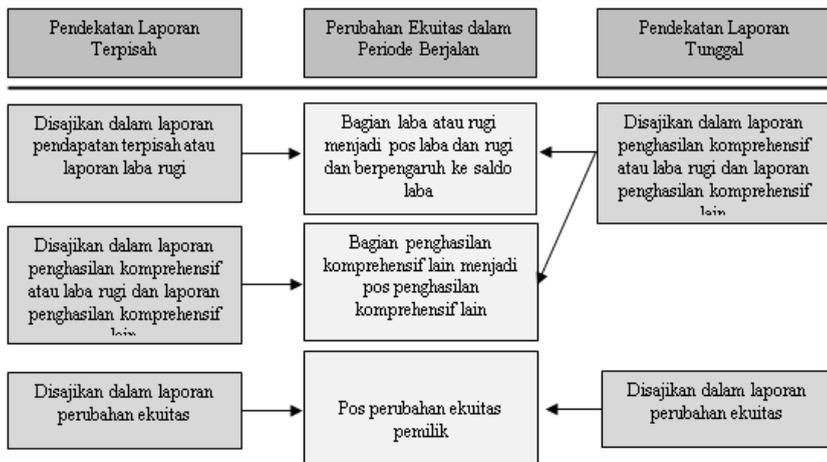
Laporan tunggal adalah bagian penghasilan komprehensif lain disajikan bersama. Penyajian pendekatan ini adalah pendapatan dan beban yang diakui pada periode berjalan atau laba rugi periode berjalan disajikan terlebih dahulu dan dilanjutkan bagian penghasilan komprehensif lain periode berjalan yang disajikan dalam satu laporan dengan judul laporan "Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain".

2. Pendekatan Laporan Terpisah (*Two Statement Approach*)

Laporan laba rugi mendahului laporan yang menyajikan penghasilan komprehensif. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang diakui selama periode berjalan disajikan dalam laporan terpisah atau disajikan dalam dua laporan.

- Laporan pertama yang menyajikan penghasilan dan beban yang diakui selama periode berjalan dengan judul laporan “Laporan Laba Rugi”.
- Laporan kedua menyajikan laba atau rugi periode berjalan dan selanjutnya penyajian penghasilan komprehensif lain dengan judul laporan “Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain”.

Kesimpulan kedua pendekatan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain disajikan pada gambar berikut.



Sumber: Akuntansi Keuangan Menengah (Berdasarkan SAK) (Bahri et al., 2021)

Gambar 12.1 Penyajian Pendekatan Laporan Terpisah dan Laporan Tunggal

Penyesuaian Reklasifikasi Penghasilan Komprehensif Lain
 Penghasilan komprehensif lain juga meliputi penyesuaian klasifikasi (reklasifikasi). Penyesuaian klasifikasi ulang

adalah jumlah yang diklasifikasi ulang ke laba rugi pada periode berjalan yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada periode berjalan atau sebelumnya. Hal penting yang juga diperhatikan adalah penentuan waktu penghasilan komprehensif lain diklasifikasikan untuk laba rugi.

Tidak Direklasifikasi	Direklasifikasi
Perubahan surplus revaluasi aset tetap	Keuntungan dan kerugian yang timbul dari menerjemahkan laporan keuangan operasi asing
Perubahan surplus revaluasi aset takberwujud	Keuntungan dan kerugian atas pengukuran kembali aset keuangan yang tersedia untuk dijual
Keuntungan dan kerugian aktuarial atas program imbalan pasti	Bagian efektif dari keuntungan atau kerugian instrumen lindung nilai dalam lindung nilai arus kas
Keuntungan dan kerugian atas investasi pada instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	

Sumber: Akuntansi Keuangan Menengah (Berdasarkan SAK) (Bahri et al., 2021)

Peraga 12.2 Reklasifikasi Komponen Penghasilan Komprehensif Lain

Daftar Pustaka

- Bahri, S. (2020). *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS* (I. Radhitya (ed.); 3rd ed.). Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Bahri, S., Wahyuningsih, S. D., & Muslichah. (2021). *Akuntansi Keuangan Menengah (Berdasarkan SAK)* (1st ed.). Mitra Wacana Media.
- Horngren, Charles T dan Walter T. Harrison. 2007. *Accounting*. Edisi 7. Pearson Education.
- Lam, Nelson dan Peter Lau. 2014. *Intermediate Financial Reporting: An IFRS Perspektif*. 2nd Ed. McGraw_Hill Education
- Suwardjono. 2008. *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFÉ.
- Stice, James D., Earl K. Stice, dan K. Fred Skousen. 2010. *Intermediate Accounting*. Edisi 17. South-Western/Cengage Learning.
- <http://cafe-ekonomi.blogspot.com/2009/09/artikel-tentang-laba.html>. 5 januari 2012
- <http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/rugi.aspx>
- <http://umihanasumi.blogspot.com/2011/10/teori-laba.html>
- http://110.138.206.53/bahanajar/modul_online/ekonomi/MO_36/akt105_05.hht
- http://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_laba_rugi

Profil Penulis



Hadriana Hanafie, S.E., M.M.

Penulis adalah alumni Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Indonesia Jurusan Akuntansi 1999, dan melanjutkan Magester Manajemen di kampus yang sama yaitu Universitas Muslim Indonesia dan selesai tahun 2000, Tugas pokok sebagai Tenaga Pengajar Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wira Bhakti Makassar

Penulis memiliki kepakaran di bidang Akuntansi Keuangan, dan Akuntansi Manajemen. untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis aktif sebagai peneliti, dan beberapa penelitian telah dipublikasi di Jurnal Internasional Bereputasi. Selain peneliti, penulis juga aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

Email Penulis: hadriana.hanafi@wirabhaktimakassar.ac.id

PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN

Justita Dura, S.E., M.Ak, CRA., CSRS., CPMSA

Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang

Pendahuluan

Seiring perkembangan sistem akuntansi yang sangat luas, perlu adanya transparansi dalam pengungkapan laporan keuangan. Secara konseptual, pengungkapan laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang secara teknis menjadi langkah akhir dalam sebuah proses akuntansi yang menyajikan informasi tentang catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan catatan atas laporan keuangan dalam perusahaan merupakan suatu hal yang penting karena adanya ketidakpastian pasar. Catatan atas laporan keuangan ini sebagai media transparansi yang digunakan untuk membantu investor dalam berinvestasi di pasar modal. Salah satu tujuan utama pengungkapan laporan keuangan adalah untuk pengambilan keputusan. Untuk itu, perlu pengungkapan data keuangan dan informasi yang relevan dengan cara yang tepat.

Pengertian Pengungkapan Laporan Keuangan

Pengungkapan laporan keuangan dalam arti luas merupakan sebuah penyampaian informasi keuangan tentang kondisi perusahaan yang tertuang dalam laporan tahunan. Pengungkapan ini dilakukan untuk memenuhi

kebutuhan informasi para pemangku kepentingan (stakeholders). Pengungkapan ini disajikan dalam pos laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan serta pengungkapan implementasi yang terkait dalam laporan keuangan (Evans, 2010).

Menurut Wolk, Tearney, and Dold (2001) pengungkapan merupakan informasi dan komunikasi lengkap yang tertuang dalam laporan keuangan sebagai media diskusi manajemen untuk proyeksi tahun yang akan datang. Sedangkan menurut Bushman & Smith (2003:76) pengungkapan merupakan transparansi perusahaan sebagai ketersediaan informasi yang dapat dipercayai para pemangku kepentingan mengenai posisi keuangan, kesempatan investasi, kinerja perusahaan, menilai risiko yang terjadi di masa yang akan datang.

Selanjutnya pengertian pengungkapan laporan keuangan menurut Stice (2010) menyatakan bahwa pengungkapan sebagai media pelaporan yang secara rinci tertuang dalam catatan pada laporan keuangan. Media pelaporan yang disediakan untuk optimalisasi kebutuhan operasi pasar modal dengan tujuan memberikan informasi yang disampaikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan untuk mencapai tujuan dari pelaporan keuangan (Nuswandari, 2009). Sedangkan menurut Siegel dan Shim (2005:147) pengungkapan laporan keuangan merupakan informasi yang diberikan sebagai lampiran pada laporan keuangan dalam bentuk catatan kaki yang menyediakan penjelasan posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan.

Tujuan Pengungkapan Laporan Keuangan

Pengungkapan laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh pemakai laporan keuangan untuk pengambilan keputusan (Hendriksen, 2002). Menurut Chariri et al (2007:382) tujuan pengungkapan laporan keuangan adalah:

1. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditor, dan pemakai lainnya dalam mengambil keputusan yang rasional.

2. Memberikan informasi untuk membantu investor, kreditor dan pemakai lainnya untuk menilai jumlah pengakuan tentang penerimaan kas bersih.
3. Memberikan informasi tentang sumber-sumber ekonomi suatu perusahaan
4. Menyediakan informasi tentang *performance* keuangan suatu perusahaan selama 1 periode.
5. Menyediakan informasi yang bermanfaat bagi manajer dan direktur sesuai kepentingan pemilik.
6. Untuk membandingkan antar perusahaan dan antar tahun mengenai aliran kas masuk dan keluar di masa mendatang
7. Untuk membantu investor dalam menetapkan return dan investasinya.

Tujuan yang positif dari pengungkapan pada laporan keuangan untuk memberikan informasi yang penting dan relevan kepada para pemakai laporan keuangan sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang baik Theodarus (1986:223). Menurut Belkaoui (2006), pengungkapan atau *disclosure* memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut:

1. Menjelaskan item-item yang diakui dan memberikan pengukuran yang relevan bagi item-item tersebut, selain pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan.
2. Menjelaskan item-item yang diakui dan menyediakan pengukuran yang bermanfaat bagi item-item tersebut.
3. Untuk memberikan informasi yang akan membantu investor dan kreditor menilai risiko dan potensial dari item-item yang diakui dan tidak diakui.
4. Memberikan informasi penting yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk melakukan perbandingan dalam satu tahun dan di antar beberapa tahun.

5. Memberikan informasi mengenai aliran kas masuk dan keluar di masa depan.

Jenis Pengungkapan

Menurut Chariri dan Ghazali (2007), terdapat dua jenis pengungkapan, yaitu:

1. Pengungkapan Wajib (*mandatory disclosure*)

Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan yang diatur oleh peraturan yang ditetapkan suatu badan otoriter. Dalam hal ini diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-38/PM/1996, yang menyatakan bahwa semua perusahaan yang melakukan penawaran umum dan perusahaan publik berkewajiban menyampaikan laporan tahunannya. Kemudian peraturan itu diperbarui dengan Surat Edaran Ketua Bapepam No. SE-02/PM/2002 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik untuk setiap jenis industry. Setiap perusahaan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangannya kepada masyarakat. Pengungkapan ini bertujuan untuk mencegah informasi yang menyesatkan untuk pemakai laporan keuangan.

2. Pengungkapan Sukarela (*voluntary disclosure*)

Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan yang tidak diwajibkan oleh peraturan yang sudah ditetapkan dalam standar akuntansi atau badan pengawas, tetapi apabila diungkapkan akan dianggap relevan bagi penggunanya. Pengungkapan ini dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan, sehingga investor dapat mengatur strategi bisnisnya dan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi. Semakin luas pengungkapan dari waktu ke waktu, dipengaruhi perkembangan bidang ekonomi, sosial, budaya di suatu negara, kepemilikan perusahaan serta peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang.

Kriteria Pengungkapan Laporan Keuangan

Menurut Chariri dan Ghazali (2007), luas atau tingkatan pengungkapan ada tiga, yaitu sebagai berikut:

1. Pengungkapan yang cukup (*adequate disclosure*)

Pengungkapan ini merupakan pengungkapan yang mempunyai tujuan minimal dalam pelaporan keuangan supaya tidak menyesatkan pengambil keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga informasi yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor.

2. Pengungkapan yang wajar (*fair disclosure*)

Pengungkapan wajar merupakan pengungkapan yang bertujuan untuk memberikan perlakuan yang sama dan sifatnya umum bagi pemakai laporan keuangan. Pengungkapan ini secara tidak langsung dapat memberikan informasi yang layak terhadap para stakeholder.

3. Pengungkapan yang lengkap (*full disclosure*)

Pengungkapan yang lengkap merupakan pengungkapan yang memberikan informasi secara lengkap, relevan, dan materialitas. Pengungkapan ini sering dianggap memberikan informasi yang berlebihan, artinya semakin banyak informasi yang diungkapkan justru semakin bahaya karena informasi yang tidak penting dirinci secara detail agar dapat mengaburkan informasi yang signifikan sehingga laporan tersebut sulit untuk diinterpretasikan.

Metode Pengungkapan Laporan Keuangan

Menurut Suwardjono (2008), metode pengungkapan berkaitan dengan masalah bagaimana secara teknis informasi disajikan kepada pemakai dalam satu perangkat statement keuangan beserta informasi lain yang berpaut. Informasi dapat disajikan dalam pelaporan keuangan diantaranya sebagai: pos statement keuangan, catatan kaki (catatan atas statement keuangan),

penggunaan istilah teknis (terminologi), penjelasan dalam kurung, lampiran, penjelasan auditor dalam laporan auditor, dan komunikasi manajemen dalam bentuk surat atau pernyataan resmi.

Adapun penjelasan dari masing-masing metode pengungkapan yang biasanya digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pos Statement (Laporan) Keuangan.

Informasi keuangan dapat diungkapkan melalui statement keuangan dalam bentuk pos atau elemen statement keuangan.

2. Catatan kaki (foot notes).

Catatan kaki atau catatan atas laporan keuangan merupakan metode pengungkapan untuk informasi yang tidak praktis atau tidak memenuhi kriteria untuk disajikan dalam bentuk pos atau elemen laporan keuangan.

3. Penjelasan dalam kurung.

Metode akuntansi, makna suatu istilah, penilaian alternatif, dan acuan merupakan informasi yang dapat disajikan dalam tanda kurung.

4. Istilah teknis.

Istilah yang tepat harus digunakan secara konsisten untuk nama pos, laporan, judul, atau subjudul.

5. Lampiran.

Laporan keuangan utama dapat dipandang seperti ringkasan eksekutif dalam pelaporan manajemen. Rincian, statement tambahan, daftar rincian, atau semacamnya dapat disajikan sebagai lampiran atau disajikan dalam seksi lain yang terpisah dengan laporan keuangan utama.

6. Komunikasi manajemen.

Komunikasi manajemen secara resmi dapat disampaikan bersamaan dengan penerbitan laporan tahunan dalam bentuk surat ke pemegang saham,

laporan dewan komisaris, laporan direksi, dan management's discussion and analysis (MDA).

7. Catatan dalam laporan auditor.

Laporan ini bertujuan mengungkapkan jenis-jenis informasi berikut :

- a. Dampak materil dari penggunaan metode akuntansi yang berbeda dengan yang lazim
- b. Dampak materil dari perubahan satu metode ke metode akuntansi yang lazim lainnya.
- c. Perbedaan pendapat antara auditor dan klien mengenai kelaziman suatu metode akuntansi yang digunakan dalam laporan.

Bentuk Pengungkapan Laporan Keuangan

Bentuk-bentuk pengungkapan laporan keuangan, sebagai berikut :

1. Ramalan Keuangan

Ramalan keuangan merupakan suatu prediksi keuangan perusahaan untuk masa depan yang memerlukan sebuah analisis dan evaluasi. Ramalan keuangan ini didasarkan pada informasi yang terpublish dari harga saham di pasar modal. Informasi ini akan membantu dalam keputusan berinvestasi. Namun tidak hanya keandalan dalam pembuatan ramalan telah menjadi masalah yang sangat memperhatikan manajemen yang takut akan dituntut akibat harapan yang tidak terpenuhi. Beberapa alasan lain yang membuat manajemen enggan membuat ramalan khusus dalam laporan keuangannya yaitu :

- a. Proyeksi dapat memberi kesan akurasi yang tidak berdasar.
 - b. Proyeksi cepat menjadi kuno, sehingga harus selalu dimutakhirkan
 - c. Ramalan dan proyeksi dapat digunakan oleh pesaing sehingga merugikan satuan usaha yang melaporkannya.
-

- d. Manajemen mungkin merasa dipaksa memenuhi ramalan yang diumumkan sehingga harus membuat keputusan jangka pendek yang bukan untuk kepentingan pemegang saham.
- e. Kegagalan perusahaan memenuhi proyeksinya menimbulkan ketidakpuasan pemegang saham dan mungkin menyebabkan adanya tuntutan hukum.

2. Kebijakan Akuntansi

Beragamnya prosedur akuntansi yang digunakan banyak perusahaan bahkan dalam perusahaan yang sama menyebabkan komparabilitas antara laporan keuangan menjadi sulit. Salah satu alternatif untuk keseragamannya adalah mengurangi jumlah alternatif. Cara lain selain mengurangi jumlah alternatif adalah dengan mengungkapkan metode-metode spesifik yang digunakan dalam setiap kasus dengan asumsi bahwa pembaca dapat menyajikan kembali laporan akuntansi itu guna mencapai komparabilitas. Informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan perlu untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.

3. Perubahan Akuntansi

Penggunaan prinsip dan prosedur akuntansi haruslah konsisten. Namun jika perusahaan akan melakukan perubahan maka perubahan itu harus diungkapkan dalam laporan keuangan ketika perubahan dilakukan disertai justifikasi untuk perubahan itu. Perubahan akuntansi mencakup perubahan dalam prinsip akuntansi, estimasi akuntansi dan satuan usaha yang melaporkan.

4. Pengungkapan peristiwa pasca laporan

Ada dua jenis peristiwa yang relevan yang mungkin terjadi setelah tanggal laporan dan sebelum selesainya laporan:

- a. Peristiwa yang secara langsung mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan

keuangan. Peristiwa-peristiwa ini harus diakui dengan suatu penyesuaian dalam laporan keuangan. Misalnya piutang yang dicatat terlalu tinggi karena pelanggan pailit dalam periode berjalan dan lain-lain.

- b. Peristiwa yang mengubah secara material kesinambungan keabsahan nilai-nilai neraca atau hubungan diantar pemegang equitas, atau secara materil mempengaruhi kegunaan aktivitas tahun lalu yang dilaporkan sebagai prediksi periode berjalan. Peristiwa-peristiwa ini tidak memerlukan penyesuaian, tapi sebaliknya diungkapkan. Misalnya: penjualan saham modal secara besar-besaran, kebijakan manajemen baru, dan lain-lain.

Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan

Dalam memutuskan informasi apa yang akan dilaporkan, praktik yang umum adalah menyediakan informasi yang mencukupi untuk mempengaruhi penilaian dan keputusan pemakai. Prinsip ini yang sering disebut dengan pengungkapan penuh (*full disclosure*), mengakui bahwa sifat dan jumlah informasi yang dimasukkan dalam laporan keuangan mencerminkan serangkaian *trade off* penilaian. *Trade off* ini terjadi antara (1) kebutuhan untuk mengungkapkan secara cukup terinci hal-hal yang akan mempengaruhi keputusan pemakai, dengan (2) kebutuhan untuk memadatkan penyajian agar informasi dapat dipahami. Disamping itu, penyusunan laporan keuangan juga harus memperhitungkan biaya pembuatan dan penggunaan laporan keuangan (Kieso dan Weygandt, 2011).

Tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami isi dan angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Terdapat tiga tingkatan pengungkapan yaitu pengungkapan penuh, pengungkapan wajar, dan pengungkapan cukup. Pengungkapan penuh mengacu pada seluruh informasi yang diberikan oleh perusahaan,

baik informasi keuangan maupun informasi non keuangan. Pengungkapan penuh tidak hanya meliputi laporan keuangan tetapi juga mencakup informasi yang diberikan padamanagement letter, company prospect dan sebagainya. Pengungkapan cukup adalah pengungkapan yang diwajibkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Sementara pengungkapan wajar adalah pengungkapan cukup ditambah dengan informasi lain yang dapat berpengaruh pada kewajaran laporan keuangan seperti *contingencies*, *commitments* dan sebagainya.

Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan

Kualitas Pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan dikenal dengan berbagai konsep antara lain:

- a. Kecukupan (*adequacy*)
- b. Kelengkapan (*comprehensiveness*)
- c. Informatif (*informativeness*)
- d. Tepat waktu (*time lines*)

Imhoff (1992) menunjuk pada tingkat kelengkapan sebagai karakteristik kualitas pengungkapan, sementara Singhvi dan Desai (1971) menunjuk pada kelengkapan (*completeness*), akurasi (*accuracy*), dan keandalan (*reliability*) sebagai karakteristik kualitas pengungkapan.

Pengungkapan Dalam Laporan Keuangan

Tujuan yang positif dari disclosure adalah untuk memberikan informasi yang penting dan relevan kepada para pemakai laporan keuangan, sehingga dapat membantu mereka dalam membuat keputusan dengan cara yang terbaik. Sejalan dengan tujuan dasar akuntansi, salah satu tujuan yang dicapainya adalah penyajian informasi yang cukup sehingga perbandingan dari hasil yang diharapkan dapat dilakukan. Laporan keuangan perusahaan disajikan dalam Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Modal ditujukan kepada pemegang saham, investor, dan kreditur. Disamping ketiga pihak tersebut, pengungkapan

juga diberikan kepada pegawai, konsumen, pemerintah dan masyarakat umum, tetapi pihak-pihak ini dipandang sebagai penerima kedua dari laporan keuangan dan bentuk-bentuk lain pengungkapan. Kriteria untuk mengakui transaksi atau peristiwa tertentu dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut :

a. Definisi (*Definition*)

Suatu pos akan masuk dalam struktur akuntansi apabila memenuhi definisi elemen laporan keuangan.

b. Keterukuran (*Measurability*)

Suatu pos harus memiliki makna tertentu yang relevan dan dapat diukur jumlahnya dengan reliabilitas yang tinggi.

c. Relevansi (*Relevance*)

Informasi yang terdapat dalam pos tersebut memiliki kemampuan untuk membuat suatu perbedaan dalam keputusan yang diambil pemakai laporan keuangan.

d. Reliabilitas (*Reliability*)

Informasi yang dihasilkan harus sesuai dengan keadaan yang digambarkan atau direpresentasikan serta dapat diuji kebenarannya (*verifiable*) dan netra.

Laporan keuangan dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan (*stewardship*) tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh pemilik perusahaan. Manajemen perusahaan bertanggungjawab (*stewardship*) atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan. Agar pembaca laporan keuangan memperoleh gambaran yang jelas maka laporan keuangan yang disusun harus berdasarkan pada prinsip akuntansi yang lazim. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas dan arus kas perubahan dengan menerapkan PSAK secara benar disertai pengungkapan yang diharuskan PSAK dalam catatan atas laporan keuangan.

Praktik Pengungkapan Laporan Keuangan

Praktik pengungkapan laporan tahunan memperlihatkan respons manajer terhadap kebutuhan pengaturan pengungkapan dan insentif mereka untuk menyediakan informasi laporan keuangan pengguna secara sukarela. Di belahan dunia, pengungkapan bermakna kecil dan pengawasan serta pelaksanaan sukarela, karena manajer perusahaan tidak akan patuh dengan peraturan pengungkapan jika kepatuhan lebih menguras biaya daripada biaya non-kepatuhan yang diharapkan. Pada bagian ini akan meliputi tentang:

a. Pengungkapan Informasi Progresif

Pengungkapan informasi adalah pertimbangan tinggi yang relevan di dalam kesetaraan pasar dunia. EU's Fourth Directive menyatakan bahwa laporan tahunan seharusnya menyertakan sebuah indikasi pengembangan perusahaan di masa depan.

b. Pengungkapan Segmen

Pengungkapan segmen lebih membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami bagaimana bagian-bagian perusahaan menata semuanya. Setelah itu, alur produk dan wilayah di dunia memiliki resiko yang beragam, pengembalian, dan kesempatan pemisahan jalur usaha dan area geografis harus membuat penilaian yang lebih terpapar tentang keseluruhan perusahaan.

c. Pelaporan Pertanggungjawaban Sosial

Laporan pertanggungjawaban sosial mengacu pada pengukuran dan komunikasi informasi tentang pengaruh perusahaan terhadap kemakmuran pegawai, komunitas sosial dan lingkungan. Hal ini mencerminkan sebuah kepercayaan bahwa perusahaan bergantung pada pemegang saham dalam laporan tahunan kinerja terhadap lingkungan dan sosial mereka seperti halnya laporan keuangan yang mereka berikan kepada pemegang saham.

d. Pengungkapan Pengelolah Perusahaan

Pengelolah perusahaan berhubungan dengan sarana internal di mana perusahaan dijalankan atau dikendalikan tanggungjawab, akuntabilitas, hubungan di antara pemegang saham, anggota direksi, dan manajer yang disusun supaya mencapai sasaran perusahaan.

e. Pengungkapan dan Laporan Bisnis di Internet

Bursa saham, pengatur, dan perusahaan publik terus menggunakan internet untuk memberikan pengguna laporan keuangan dengan akses cepat untuk informasi perusahaan. Contoh, berita pertukaran saham sekarang lebih banyak menggunakan jasa elektronik untuk memberikan akses cepat bagi semua pengumuman dari perusahaan yang terdaftar. Semua layanan ini memberikan keuntungan penting bagi perusahaan dan investor.

Pengungkapan Laporan Keuangan di Negara Berkembang

Pengungkapan laporan tahunan perusahaan di negara-negara pasar berkembang secara umum kurang ekstensif dan kurang kredibel dibandingkan dengan pelaporan perusahaan di negara-negara maju. Sebagai contoh, pengungkapan yang tidak cukup dan yang menyesatkan dan perlindungan konsumen yang terabaikan disebut-sebut sebagai penyebab krisis keuangan Asia Timur di tahun 1997.

Tingkat pengungkapan yang rendah di negara-negara pasar berkembang tersebut konsisten dengan sistem tata kelola perusahaan dan keuangan di negara-negara itu. Pasar ekuitas tidak terlalu berkembang, bank dan pihak internal seperti kelompok keluarga menyalurkan kebanyakan kebutuhan pendanaan dan secara umum tidak terlalu banyak adanya kebutuhan akan pengungkapan publik yang kredibel dan tepat waktu, bila dibandingkan dengan perekonomian yang lebih maju.

Akan tetapi, investor menuntut informasi tentang perusahaan yang bias dipercaya dan tepat waktu di negara berkembang dengan pasar yang baru muncul. Regulator telah merespons tuntutan ini dengan membuat ketentuan pengungkapan yang lebih kuat, dengan meningkatkan pengawasan dan usaha pelaksanaan mereka. Bukti empiris praktik pengungkapan di negara-negara dengan pasar yang baru muncul masih terbatas sampai sekarang. Akan tetapi, seperti halnya dengan semua pasar modal negara ini dan perusahaan yang terdaftar ingin meningkatkan kehadiran mereka, peneliti mengembangkan bukti-bukti yang lebih banyak untuk semua kegiatan ini dan bagaimana mereka berbeda dari semua negara berkembang.

Daftar Pustaka

- Belkaoui, A.R. 2006. Accounting Theory: Teori Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Bushman, R., M., & Smith, A., J. 2013. Transparency, financial accounting information, and corporate governance. Financial Accounting Information and Corporate Governance. Economic Policy Review, 9 (1).
- Chariri, A dan Ghozali, I. 2007. Teori Akuntansi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Choi, Frederick D.S. & Meek, Gary K. 2012. Akuntansi Internasional. Buku 1 Edisi Enam. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Evans, T.G. 2003. Accounting Theory - Contemporary Accounting Issue. USA: Sounth Western.
- Harahap, Sofyan Syafri. (2008). Teori Akuntansi. Jakarta : Rajawali Pers
- Hendriksen, E.S. 2002. Teori Akuntansi. Jakarta: Erlangga.
- Imhoff, E.A., Jr. 1992. The Relation Between Perceived Accounting Quality and Economic Characteristic of the Firm. Jurnal of accounting and Public Policy, Vol.11 (2), pp.97-118
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. 2011. Intermediate Accounting Volume 1 IFRS Edition. United States of America : Wiley
- Nuswandari, Cahyani. 2009. Pengaruh Corporate Governance Perception Index Terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Jurnal Bisnis dan Ekonomi.
- Suwardjono. 2008. Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Yogyakarta: BPFÉ.
- Siegel, J.G., Shim, J.K. 2005. Kamus Istilah Akuntansi Edisi 3. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo

Singhvi, S.S., dan Desai, H.B. 1971. An Empirical Analysis of The Quality of Financial Disclosure. Accounting Review Vol. 46 No.1.

Stice, Earl K, Fred Skousen. 2010. Akuntansi Intermediate, Buku 1. Jakarta : Salemba Empat

Profil Penulis



Justita Dura, S.E., M.Ak, CRA., CSRS., CPMSA

Ketertarikan penulis terhadap ilmu akuntansi dimulai pada tahun 2005 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan memilih Jurusan Akuntansi dan berhasil lulus tahun 2009. Tiga tahun kemudian penulis melanjutkan studi S2 di Prodi Magister Akuntansi Universitas Trisakti Jakarta. Tahun 2017 penulis melanjutkan study S3 di Universitas Merdeka Malang.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Akuntansi dan Keuangan. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Email Penulis: justitadura@asia.ac.id

- 1 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN AKUNTANSI
Nelly Ervina, S.E., M.Si.
- 2 PROFESI AKUNTANSI
Syarifah Zuhra, S.S.T., M.E.
- 3 RUANG LINGKUP TEORI AKUNTANSI
Dr. Desak Nyoman Sri Werastuti, S.E., M.Si., Ak., CA.
- 4 STRUKTUR TEORI AKUNTANSI
Tatik Amani, S.E., M.Akun
- 5 TEORI AKUNTANSI DAN PERUMUSANNYA
Putu Ayu Anggya Agustina, S.E., M.Si., Ak
- 6 KERANGKA KONSEPTUAL
Dr. Wahidahwati, S.E., M.Si., Ak., C.A
- 7 STANDAR AKUNTANSI UNTUK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Dr. Tenriwaru., S.E., M.Si., Ak., CA.
- 8 KONSEP ASET
Layly Dwi Rohmatunnisa', S.Pd., M.Akun
- 9 KONSEP LIABILITAS DAN EKUITAS
Aniek Murniati, S.Sos., M.SA
- 10 KONSEP PENDAPATAN
Dr. Riyanto Setiawan Suharsono, SE., M.SA., Ak., CA., CSRS.
- 11 KONSEP BIAYA
Leni Saleh, SEI., M.Sc., M.Sc (Tan).
- 12 KONSEP LABA
Hadriana Hanafie, S.E., M.M.
- 13 PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN
Justita Dura, S.E., M.Ak, CRA., CSRS., CPMSA

Editor :

Syaiful Bahri, SE., M.SA., Akt., ACPA., CRA.

Untuk akses **Buku Digital**,
Scan **QR CODE**



Media Sains Indonesia
Melong Asih Regency B.40, Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
Email : penerbit@medsan.co.id
Website : www.medsan.co.id



ISBN 978-623-362-362-9 (PDF)



9 786233 623629